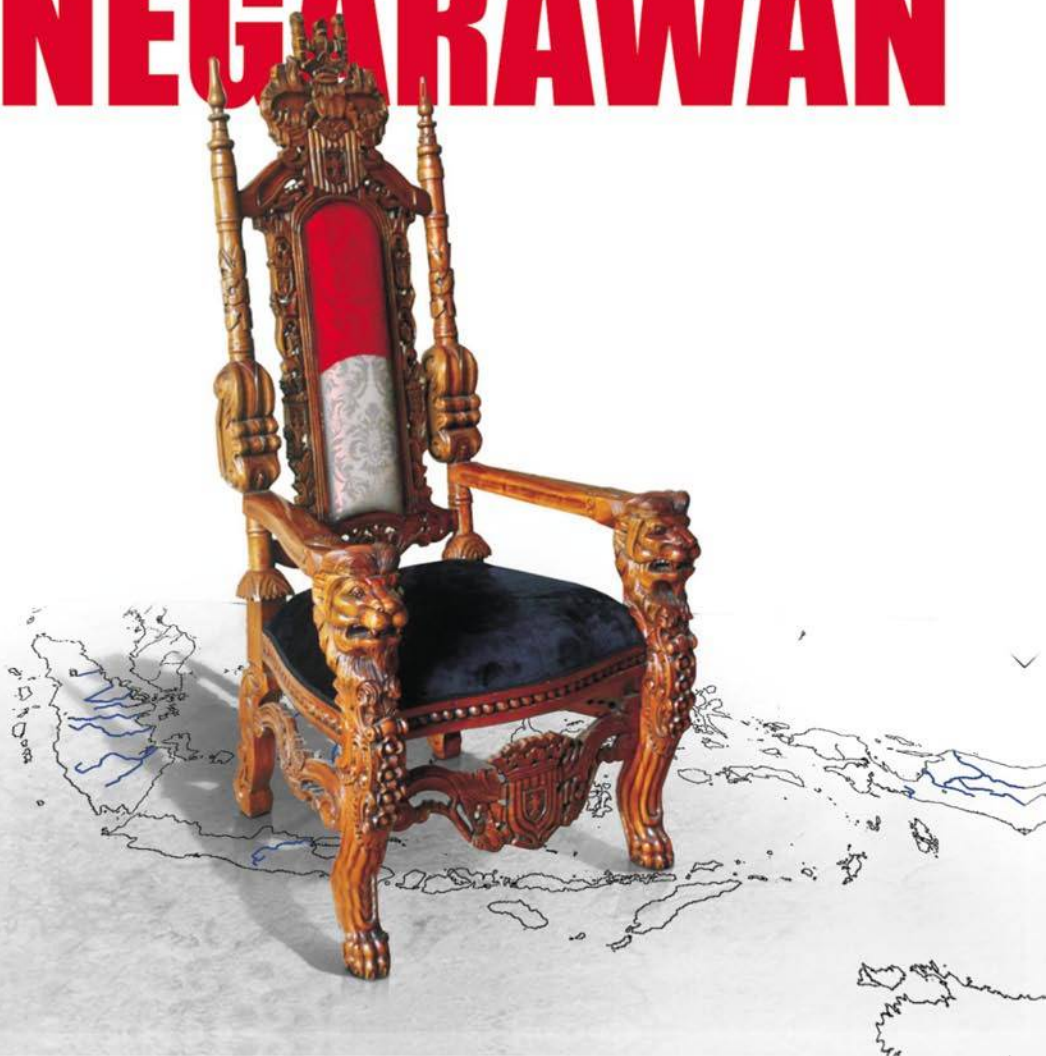


Hafidz Arfandi, Dinar Ramadhani,
Yunia Faizah Arsy, dkk.



*Belajar Merawat **Indonesia***

PRESIDEN NEGARAWAN



Hafidz Arfandi, Dinar Ramadhani,
Yunia Faizah Arsy, dkk.



Belajar Merawat Indonesia

PRESIDEN NEGARAWAN



Belajar Merawat Indonesia
PRESIDEN
NEGARAWAN

©DD, 2013

ISBN 978-602-7807-28-0

Penulis:

Hafidz Arfandi, Dinar Ramadhani, Yunia Faizah Arsy, dkk.

Penyunting:

Yusuf Maulana

Pemeriksa Aksara:

Ab. Rihab

Penata Letak:

Aryamuslim

Perwajahan Sampul:

Budi Yuwono

Hak Cipta dilindungi undang-undang

All Rights reserve

Cetakan I, Oktober 2013

Diterbitkan oleh

Dompot Dhuafa - Beastudi Indonesia

Jl. Raya Parung Km. 42 Ds. Jampang Kec. Kemang

Kab. Bogor, Jawa Barat 16310

Telp. (0251) 8610817, 8610818, 8612044

Faks. (0251) 8615016

Website: <http://beastudiindonesia.net>

Kata Pengantar

Berproses Menghadirkan Sang Negarawan



Pengelolaan beasiswa Dompot Dhuafa terus berproses hingga saat ini. Dua dekade ini, setidaknya telah menjalani tiga fase pengelolaan program beasiswa: Fase Akses (1993-2003), Fase Pengembangan Kepercayaan Diri dan Prestasi Akademik (2003-2010), Fase Pengembangan Kepemimpinan dan Jaringan (2010-saat ini).

Bisa kuliah di perguruan tinggi itu lumrah bagi anak orang kaya. Namun, tidak demikian bagi mereka keluarga miskin. Alih-alih bisa kuliah di perguruan tinggi, mimpi saja mereka tidak berani. Prestasi akademik mumpuni, tapi finansial keluarga bicara sebaliknya. Ibarat tanaman, mereka layu sebelum berkembang.

Kemiskinan seakan takdir yang tidak dapat diubah. Lahir sebagai orang miskin dan mati dalam keadaan miskin, baik secara harta maupun ilmu. Kemiskinan—kebodohan—keterbelakangan—kemiskinan terus berulang bagai rantai yang tak putus-putus.

Fase awal pengelolaan program beasiswa Dompot Dhuafa, berkonsentrasi membuka akses anak-anak berprestasi dari ke-

luarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan. Dengan izin Allah, adanya akses pendidikan telah mengubah takdir dan memutus rantai kemiskinan keluarga mereka. Pada fase ini, pengelolaan beasiswa dilakukan sangat sederhana, yakni sekadar memberikan uang beasiswa (*charity*) kepada anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu.

Persoalan orang miskin ternyata tidak hanya berhenti pada persoalan akses mendapatkan pendidikan. Tidak kalah penting adalah persoalan mental miskin. Akses sudah dibuka, tapi mental miskin kadung melekat kuat. Pada akhirnya mereka tereliminasi juga dalam ruang aktualisasi yang ada.

Fase selanjutnya, pengelolaan beasiswa Dompot Dhuafa mulai melakukan proses pembinaan dengan sistem asrama. Pada fase ini, selain diberikan bantuan biaya pendidikan, penerima manfaat juga diwajibkan mengikuti program pembinaan dalam asrama yang telah disediakan.

Adanya program pembinaan yang diberikan, terbukti menjadi obat mujarab. Mental miskin berubah menjadi mental siap berkompetisi dan berprestasi di manapun berada. Hari ini, tidak jarang akan ditemukan anak-anak berprestasi di perguruan tinggi favorit adalah penerima manfaat program beasiswa Dompot Dhuafa. Mahasiswa berprestasi tingkat nasional, juara PIMNAS, pemenang lomba dan kompetisi tingkat nasional dan internasional, para wisudawan dengan IPK *cumlaude*, dan berbagai prestasi akademik lainnya. Mereka adalah penerima manfaat beasiswa Dompot Dhuafa.

Terus tumbuh dan berkembang, pengelolaan program beasiswa Dompot Dhuafa memasuki fase pengembangan kepemimpinan dan jaringan. Kami menyadari bahwa persoalan

kemiskinan tidak berhenti pada persoalan akses, mental, maupun kompetensi, namun lebih dari itu adalah karena salah urus (struktural). Transparency Internasional Indonesia (TII) pada tahun 2012 merilis bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2012 turun dari peringkat 110 menjadi 118 dari 176 negara, dengan skor 32. Peringkat Indonesia sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Secara regional, Indonesia masih kalah dengan Singapura (skor IPK 87), Brunei Darussalam (55), Malaysia (49), Thailand (37), Filipina (34), dan Timor Leste (33).

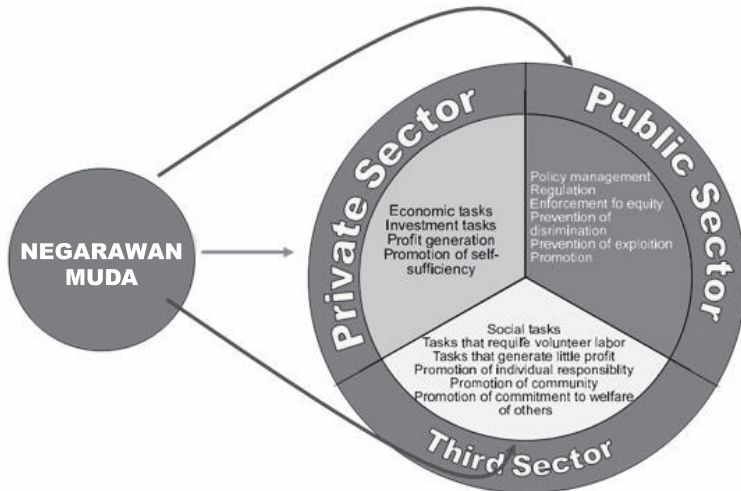
Rendahnya Indonesia menunjukkan betapa bermasalahnya pengelolaan negara ini akibat kejahatan korupsi. Korupsi telah menyuburkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Korupsi menjadikan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Korupsi menyebabkan aset-aset bangsa menjadi petaka bagi rakyatnya. Korupsi telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Negara ini menjadi tidak berdaya dan kehilangan martabatnya.

Negara ini tidak kurang manusia-manusia hebat, cerdas, dan berpendidikan. Kelas menengah bertambah dan terus meningkat, diisi orang-orang berpendidikan. Tapi ternyata koruptor adalah orang-orang cerdas dan berpendidikan juga. Negara ini miskin sosok negarawan. Sosok yang senantiasa berkhidmat untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negaranya, berjuang mewujudkan janji perjuangan para pendiri bangsa, dan senantiasa menghadirkan karakter dalam kepemimpinannya.

Belum hilang dalam ingatan kita, laporan di media massa yang memberitakan setidaknya ada enam profesor dari perguruan tinggi ternama yang telah ditangkap Komisi Pembe-

rantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi. Kini, kita harus sedih dan marah karena korupsi telah menusuk ke jantung republik. Penyakit korupsi menjangar ke penjaga konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap KPK karena kasus korupsi. Betapa nihilnya negarawan di republik ini.

Krisis negarawan, dan kesadaran akan pentingnya sosok negarawan di berbagai sektor kehidupan di negara ini, selama tiga tahun terakhir ini menjadi isu utama yang mengilhami pengembangan program beasiswa Dompet Dhuafa. Program yang dikembangkan adalah investasi sumber daya manusia (SDM) strategis, melalui program pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan terbentuk SDM unggul, berkarakter pemimpin, dan peduli demi mewujudkan Indonesia adil dan berdaya.



Pada fase ini, penerima manfaat beasiswa Dompot Dhuafa didorong menjadi negarawan-negarawan muda yang senantiasa belajar merawat Indonesia. Berkontribusi saat ini dan masa yang akan datang. Ketika masih di kampus didorong menjadi aktivis berprestasi dan memiliki karakter yang kuat. Pascakampus mereka melakukan mobilitas vertikal dan horizontal, masuk ke seluruh sektor kehidupan dan mengambil peran strategis di negara ini.

Tahun 2013 ini saja total penerima aktif program beasiswa Dompot Dhuafa kurang lebih 570 orang. Mereka tersebar lebih dari 30 perguruan tinggi di 13 provinsi di seluruh Indonesia. Adapun untuk jumlah alumni penerima program beasiswa sebanyak lebih dari 2500 orang. Mereka tidak lain sosok negarawan muda yang tersebar di berbagai sektor kehidupan yang berkhidmat untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

BUKU BELAJAR MERAWAT INDONESIA dengan tema Presiden Negarawan merupakan wakaf pemikiran dan upaya advokasi penerima manfaat beasiswa Dompot Dhuafa melalui program Beasiswa Aktivis Nusantara (BAKTI NUSA). BAKTI NUSA adalah investasi sumber daya manusia yang mengelola biaya untuk pendidikan, pembinaan, dan pelatihan, serta pendampingan bagi aktivis mahasiswa. Beasiswa ini bertujuan melahirkan SDM yang berkarakter pemimpin yang mampu berkontribusi dan berperan aktif di tengah masyarakat, bangsa, dan negara.

Gagasan-gagasan yang menghiasi buku ini memotret dan menganalisis persoalan kepemimpinan yang ada di negara ini. Tidak hanya mengkritik, para penulisnya yang sekaligus merupakan aktivis kampus, berusaha menawarkan gagasan

alternatif sosok presiden negarawan sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang ada di negara ini.

Seseorang dikatakan negarawan biasanya bila dia sosok politisi atau tokoh yang berprestasi ataupun berjasa di kancah politik nasional dan internasional. Cukuplah seperti itu? Bagi kami, pemahaman yang seperti ini tidaklah tepat. Sejatinya, negarawan berlaku pula bagi mereka yang berkiprah di luar dunia politik (praktis) ataupun pemerintahan. Menutup kemungkinan profesi lain sebagai negarawan tidaklah tepat. Menjadi negarawan bisa dilakukan di mana pun melalui profesi yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Terlebih lagi seorang yang dipercaya rakyat sebagai presiden. Kenegarawanan seorang presiden sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Koreksi pengertian negarawan semacam ini diulas dalam beberapa tulisan di buku ini.

Gagasan-gagasan yang bertebaran di buku ini sedikit atau banyak merefleksikan kegelisahan kaum muda, sekaligus pula mewakili suara serupa rakyat pada umumnya. Kehadiran pemimpin ataupun presiden negarawan harga mutlak. Namun, para aktivis BAKTI NUSA yang bersuara melalui tulisan tidak dimaksudkan untuk berhenti saat idenya dibaca banyak orang. Mereka juga dibawa dalam satu atmosfer yang membentuk kenegarawanan mereka. Hasilnya, syukur hingga mereka menjadi presiden negeri ini; walaupun tidak, mereka menjadi pemimpin di ranah profesinya masing-masing. Semuanya tetap dengan karakter negarawan. []

Daftar Isi



Berproses Menghadirkan Sang Negarawan	iii
Wacana dan Kritik Presiden Negarawan	1
Negarawan untuk Negara yang Hilang (Hafidz Arfandi)	2
Kepekaan dan Integritas Negarawan (Dinar Ramadhani) ..	14
Memunculkan Presiden Negarawan (Yunia Faizah Arsy)....	20
Andai Negarawan itu Karya Sastra (Asma Azizah).....	25
Model Negarawan Muda (Dini Fuadillah Sofyan).....	32
Heroisme Pemimpin (Fachry Aidulsyah)	35
Presiden Produk Panggung Politik (Annisya Rosdiana)	38
Pemimpin yang Dipersilakan (Elifas Omega Yusufadisyukur)	40
Keluarga Negarawan (Salsabila Khotibatunnisa)	43
Inspirasi Presiden Negarawan	47
Pemimpin Negarawan untuk Tanah Surga (Titis Sekti Wijayanti)	48
Pemimpin dengan Tiga Karakter Utama (Meyrizka Dwinanda)	55
Pelajaran Habibie tentang Presiden Negarawan (Rifqi Abdillah)	61

Beda Singapura dan Indonesia (Wildan Ghiffary)	68
Pelajaran “Patch” Adams untuk Negarawan (Maya Puspita Sari)	73
Mengubah Pribadi Kecewa Menjadi Negarawan (Ali Abdillah) ..	77
Presiden Peduli Pertanian (Toni Widiastanto)	81
Belajar Memimpin dari Meja Makan (Moh. Amar Khoerul Umam)	85
Dua Teladan Negarawan (Mandira Bienna Elmir)	88
Aksi Menjadi Presiden Negarawan	93
Tiga Modal Kepemimpinan Negarawan (Faisal A. Kamil)... ..	94
Melawan Virus Kucing Rakus (Nuroel Tri Isna Wijaya)	102
Menggagas Perjuangan Bersama Aktivistis Mahasiswa (Harry Utama Putra).....	105
Mahasiswa, dan Pemimpin Negarawan (Arnova Reswari) ..	109
Dokter Negarawan (Satria Adi Putra)	113
Negarawan Muda Bertani (Febrian Indra Rukmana)	117
Perang Negarawan (Dewi Ratna Diana Amelia)	121
Negarawan Teknolog (Muhammad Iqbal)	124
Profil Penulis	133
Profil BAKTI NUSA	140

Wacana dan Kritik Presiden Negarawan

Hafidz Arfandi

Negarawan untuk Negara yang Hilang



Indonesia, negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan 2/3 luas wilayahnya berupa perairan. Letaknya berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan dunia. Di tengah bentangan tersebut, tersebarlah 250 juta lebih penduduk yang akan mendapat kejutan bonus demografis berupa 50 persen lebih penduduk produktif pada 2030.

Potensi sumber daya alam yang melimpah luar biasa terkandung di perut bumi Indonesia. Emas, minyak, batu bara, hingga uranium ada. Di permukaan rangkaian cincin vulkanis membentuk daratan subur bagi terbentuknya sumber daya agraris yang potensial apalagi iklimnya yang kondusif ditambah potensi geotermal terbesar di dunia. Hamparan laut yang membentang dilewati jalur migrasi ikan tahunan yang menghasilkan potensi kelautan yang sangat besar, dengan palung-palung laut sebagai tangkapan mineral alami yang potensial.

Sayangnya, di tengah sumber daya yang melimpah, letak geografis yang strategis, dan bonus demografis penduduk, negeri ini masih terseok-seok. Pada 2012 masih tersisa 28 juta lebih penduduknya harus hidup dengan Rp 7.254,00 per hari. Jika indikator batas kemiskinan dinaikkan US\$ 2 per hari, pada 2011

ada angka kemiskinan sebesar 43,3 persen, atau 104,6 juta penduduk hanya mengonsumsi Rp 18.400,00 per hari (BPS, 2013). Padahal, pendapatan per kapita Indonesia berada pada US\$ 4271,51 atau sekitar Rp 40,5 juta per kapita per tahun atau Rp 1.11.232,00 per kapita per hari (dengan kurs acuan US\$ 1 sama dengan Rp 9.500,00). Kondisi ini menandakan terjadinya ketimpangan yang cukup besar (World Bank, 2011).

Tidak hanya itu, Erani Ahmad Yustika menyebutkan terjadinya ketimpangan penguasaan aset; 40 orang terkaya di Indonesia mampu menguasai aset setara APBN (2.000 triliun rupiah). Hal ini terkonfirmasi dengan angka statistik Indeks Gini Indonesia yang berada pada posisi 0,41 pada 2012 dengan tren setiap tahun cenderung meningkat (*Kompas*, 8 April 2013). Saat yang sama, tingkat pengangguran di Indonesia masih 8,1 Juta orang menganggur terbuka, dengan proporsi antara sektor formal dan informal sebesar 36 berbanding 64. Selain itu, sebanyak 30 persen dari total penduduk bekerja adalah setengah menganggur ataupun pekerja paruh waktu (BPS, 2013).

Negara yang Hilang

Paradoks di sektor ekonomi tersebut menunjukkan bahwa negeri ini adalah negeri warisan Hindia Belanda yang mengkhianati konstitusinya. Dalam pendekatan studi pascakolonial, kemerdekaan seharusnya tidak lagi mewariskan kultur dan sistem kolonial, melainkan melakukan penggaliannya sendiri pada karakter otentik bangsanya, dengan referensi kesejarahan yang ada (Fanon, 1963: 209). Pembukaan UUD 1945 memuat empat janji kemerdekaan, yakni “membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Empat janji tersebut hilang menjadi sebuah riwayat sejarah kemerdekaan yang semata-mata hidup dalam teks. Kesalahan terbesarnya adalah logika mengelola negeri ini tidak lebih dari melanjutkan cara-cara penjajah Hindia Belanda mengelolanya.

Nurcholis Madjid menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kegagalan epistemologi, tidak dapat ditemukan referensi apa yang menunjukkan sejarah Indonesia terbentuk dari Sabang hingga Merauke, kecuali referensi bahwa Indonesia adalah warisan dari daerah jajahan Belanda.

Parahnya, kegagalan Indonesia sebenarnya bukan semata kegagalan epistemologis, namun pula gagal dalam mencari referensi cara-cara mengelola negara. Memang perdebatan awal antara Soekarno, Hatta, Syahrir, dan tokoh-tokoh lain-lain tentang bagaimana ekonomi Indonesia dikelola menunjukkan adanya kemauan negeri ini untuk mandiri. Seperti ketika Hatta ditanya oleh seorang kawan Belandanya, “Bung, dengan apa negerimu akan dikelola, sementara negerimu tak punya orang mumpuni?” Hatta hanya menjawab pendek, “Dengan rakyat Indonesia yang akan kami didik.”

Sejarah pergulatan pemikiran dalam membentuk “Indonesia”, kemudian berhenti ditelan pertikaian politik, mulai dari politik ideologis (Nasionalis, Islamis dan Komunis) hingga konflik militer dan sipil. Kondisi diperparah dengan adanya dampak perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menyatakan tiga pasal yang selalu disembunyikan. Pertama, seluruh pegawai-pegawai birokrasi Hindia Belanda tidak boleh digeser

untuk menjalankan perannya untuk membantu Indonesia; kedua, seluruh investasi asing di negeri Belanda tidak boleh dikeluarkan dari Indonesia; ketiga, seluruh utang Hindia Belanda menjadi utang Republik Indonesia (Baswir, 2009).

Dampak tiga poin yang didapat dalam KMB itu luar biasa hingga saat ini. **Pertama**, birokrasi Indonesia berwatak aristokrasi kolonial yang bermental feodal masih eksis dan melembaga dalam tubuh semua birokrasi di Indonesia. **Kedua**, Kegagalan Indonesia untuk melembagakan konsep demokrasi Ekonomi Pancasila yang diamanahkan UUD 1945 pasal 33, berdasarkan kekeluargaan dan berbasis koperasi dalam berbagai industri strategis. **Ketiga**, Indonesia dikunci dengan berbagai perjanjian utang dengan pihak-pihak asing.

Kemuakan Presiden Soekarno terhadap hasil KMB diwujudkan dengan beberapa undang-undang revolusioner untuk menasionalisasi seluruh industri asing dan menolak masuknya investasi asing. Lahirlah UU Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1966. Selain itu, Soekarno juga memilih keluar dari PBB sebagai wujud penolakannya terhadap isi KMB dan kewajiban Indonesia membayar utang Hindia Belanda. Hasilnya, ketika terjadi gejolak politik, Soekarno berhasil dijatuhkan dari kursi kepresidenan. Dunia internasional pun berhasil mendesak pemerintah baru di bawah militer untuk mengubah lagi keputusan-keputusan Soekarno dengan janji investasi dan pinjaman untuk mengendalikan krisis ekonomi.

Soeharto yang menggantikan Soekarno, memang selama 32 tahun berhasil membangun Indonesia, tetapi logika pembangunannya tidak lebih seperti logika Hindia Belanda yang berorientasi pada eksplorasi sumber daya alam untuk dijual keluar,

dan memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan impor. Alhasil, ketergantungan Indonesia pada asing semakin menjadi-jadi. Namun, di balik rezim Soeharto yang otoriter masih tersirat juga sebuah kemampuan Indonesia dalam mengendalikan berbagai sektor strategis. Negara masih cukup kuat untuk memegang kendali, walaupun kendala *miss management* melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ketika Reformasi 1998 berhasil melengserkan Soeharto dari kursi kepresidenan, semua orang bersukacita. Di mana-mana bungalow merayakan kebebasan. Tetapi, seiring dengan itu, reformasi paling konyol dalam peradaban sebuah bangsa terjadi di negeri ini. Bersamaan euforia rakyat atas jatuhnya kekuasaan Soeharto, IMF membuat perjanjian Letter of Intent (LoI) yang berdampak sistematis meliberalkan berbagai sektor strategis di Indonesia, mulai dari pengelolaan APBN, perbankan (UU Perbankan dan UU Bank Indonesia), penanaman modal (UU Penanaman Modal Asing), sektor migas (UU Migas), sektor pertambangan (UU Pertambangan), pelabuhan (UU Pelayaran), kelistrikan (UU Kelistrikan), dan lain sebagainya. Semangat pembaharuan dan pemberantasan korupsi dimanipulasi justru sebagai agenda mengerdilkan seluruh kekuatan negara, dan sebaliknya menggantikannya dengan semangat pasar yang liberal.

Kondisi Indonesia ibarat ingin membuang air bekas memandikan bayi dengan sekaligus pula membuang bayinya. Dalam menyelesaikan *miss management* justru diselesaikan dengan menghancurkan atau mengerdilkan lembaganya. Negara menghilang dari perannya untuk menguasai segala sumber daya strategis yang diamankan konstitusi. Yang tersisa

tinggal birokrasi dengan mental koruptif, malas, dan pemburu rente.

Merindukan Negarawan

Banyak orang di mana-mana merindukan sosok negarawan. Sosok seperti apa negarawan? Apakah negarawan adalah sosok pemikir idealis seperti Soekarno di masa lalu dan lebih mementingkan mobilisasi emosional rakyat? Ataukah seperti Soeharto sang Bapak Pembangunan yang dengan gaya kepemimpinannya mampu menyeragamkan banyak suara rakyat negeri ini? Ataukah seperti Susilo Bambang Yudhoyono yang dengan retorika “saya prihatin” untuk menaklukkan hati rakyat?

Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, tetap perlu dihargai torehan prestasinya masing-masing. Mereka sudah memberikan jasa bagi negeri ini, dengan segala catatan putih dan hitamnya. Ke depan, pemimpin Indonesia haruslah bisa lebih baik dari mereka. Sosok negarawan yang benar-benar cakap.

Apakah dengan hadirnya presiden negarawan cakap persoalan Indonesia teratasi seketika? Bangsa ini perlu sadar bahwa agaknya bukan presiden yang cakap semata yang dibutuhkan, namun juga rakyat terpelajar yang paham apa yang perlu dikerjakan untuk menjawab empati janji tujuan Indonesia merdeka. Kita tidak ingin, wacana negarawan sekadar jargon tanpa kontekstualisasi atau sebagai apologi untuk menjawab kesalahan sistematis yang telah melembaga di negeri ini.

Negara di tengah globalisasi semakin terdesak oleh peranan aktor-aktor pasar yang semakin besar. Pertarungan pasar tidak

dapat dibendung lagi. Di sinilah perlunya kesadaran bersama dalam mengarahkan dan menyiapkan pertarungan pasar itu untuk memberikan dampak kesejahteraan pada negara. Pekerjaan ini berlebihan bila dibebankan hanya semata-mata pada satu orang bernama presiden. Lebih dari sekadar figur flamboyan, populis, dan dikenal luas media massa, sosok pemimpin yang dibutuhkan negeri ini bukan seorang *individual fighter*, melainkan *collective leader*.

Kita butuh seorang yang dengan kemampuannya mampu mengakumulasi seluruh energi rakyat, serta terus-menerus meyakinkan rakyat untuk dapat bersama-sama berbuat. Merangkul semua potensi yang ada di Indonesia dari berbagai kelas dan afiliasi, sipil dan militer, kelas menengah dan rakyat miskin, pengusaha dan buruh, kampus dan pabrik, dan seterusnya, untuk bisa membuat pembaharuan sesuai kapasitasnya sebagai aktor lokal ataupun internasional.

Tugas Pemimpin Indonesia

Tugas utama seorang presiden Indonesia adalah mengubah seluruh birokrasi pemerintah, mengganti mental proyek dengan mental efektivitas kerja yang cerdas dan inovatif. Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah dan sangat tidak populis untuk menarik simpati jajaran pegawai negeri sipil. Yang perlu dilakukan adalah merampingkan semua birokrasi pemerintah. Bukan dengan membuat *training* motivasi apalagi pengajian untuk pegawai birokrasi, melainkan menyusun kebijakan instrumental untuk mendorong adaptasi birokrasi menjadi aktor strategis atau dengan konsep *Entrepreneur Bureaucracy*. Keterbatasan negara, khususnya dalam hal finansial, harus dihadapi dengan strategi manajemen yang efektif dan efisien.

Hingga kini proporsi birokrasi menyita hampir 60 persen APBN dan APBD, sehingga perlu dioptimalkan menjadi setidaknya 30 persen saja dengan langkah.

Reformasi birokrasi menjadi agenda penting untuk memecahkan banyak hal berikutnya. Karena tanpa birokrasi yang efisien, keuangan negara hanya menjadi bancakan bagi banyak orang. Tanpa birokrasi yang efektif, lembaga intelektual seperti kampus sekalipun bakal berorientasi proyek dan berburu rente, melupakan kewajiban utamanya: berkontribusi pada ilmu pengetahuan.

Penyelesaian masalah dalam tubuh birokrasi menjadi modal penting untuk menata kembali berbagai sektor di hadapan pasar. Setidaknya ada tiga tugas penting dan mendesak yang perlu dilakukan negeri ini pascareformasi total di tubuh birokrasi.

Pertama, melakukan renegotiasi dengan berbagai kepentingan pasar agar negara mendapatkan lebih banyak keuntungan.

Selama ini Indonesia menjadi negara paling liberal dalam mengundang investor. Investor diberikan banyak kemudahan yang menguntungkan tanpa halangan apa pun. Halangan-halangan yang ada adalah kelakuan pejabat birokrasi yang korup. Jika birokrasi berhasil direformasi total secara sistemik, perlu renegotiasi terhadap pasar dengan tetap memberikan kesempatan pelaku pasar untuk berkembang dan mampu berdaya saing secara rasional. Saat yang sama, memberikan porsi keuntungan pada negara melalui pajak, investasi pembangunan infrastruktur, maupun mekanisme bagi hasil. Negosiasi tersebut perlu dipahami sebagai strategi pilihan rasional mengha-

dapi kekuatan kapital. China, India, Brasil, Turki, dan Venezuela menerapkan strategi ini, dengan menjadikan negara sebagai negosiator di hadapan pasar. Keuntungan yang diberikan negara harus dilembagakan agar benar-benar masuk ke pendapatan negara tanpa dikorupsi berbagai aktor.

Kedua, meningkatkan kapasitas industri strategis nasional, seperti pelabuhan, industri kapal, industri pesawat terbang, dan industri listrik terbarukan. Industri strategis nasional perlu ditumbuhkan untuk mewakili negara dan rakyat dalam kontes di hadapan pasar. Untuk mewujudkan misi ini perlu dilakukan upaya sistematis di antaranya memperkuat sumber daya manusia, bekerja sama alih teknologi dengan industri kompetitif di dunia, serta mekanisme jejaring industri dengan menahan barang mentah untuk dihubungkan bagi pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri,

Ketiga, *human investment* dengan mendidik orang-orang terbaik di negeri ini dengan kualitas pendidikan terbaik sekaligus menjamin mereka untuk tetap hidup layak sesuai dengan kapasitasnya. Selain itu, memastikan mereka tetap bekerja untuk kepentingan bangsa. Kebijakan ini pernah dilakukan Soekarno dengan mengirim banyak orang-orang terpelajar untuk mempelajari teknologi maritim dan dirgantara di berbagai negara.

Indonesia sampai saat ini selalu melahirkan anak-anak berprestasi di bidang sains. Saat anak-anak mereka mengharumkan nama bangsa, namun saat dewasa mereka sudah berpindah kewarganegaraan. Tidak sepenuhnya salah mereka, abainya pemerintah sering jadi penyebabnya. Untuk itulah perlu strategi sistematis untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Tidak ada salahnya dalam persoalan ini kita mengambil inspirasi dari China.

China menerapkan beasiswa penuh untuk 10 orang lulusan terbaik di semua kampus dan disekolahkan hingga jenjang doktor di berbagai kampus terbaik di dunia. Selepas itu, mereka direkrut menjadi bagian dari tim strategis (*think tank*) di bawah Partai Komunis China. Alhasil, hingga saat ini China menjadi negara dengan ekonomi raksasa yang tetap mampu efektif mengelola negaranya untuk bersaing di hadapan pasar global.

Tim *think tank* akan bisa bekerja efektif sekali lagi dengan dukungan birokrasi yang efektif dan efisien. Tanpa ada dukungan birokrasi yang efektif dan efisien, tim *think tank* hanya menjadi perumus ide-ide yang gagal menemukan instrumen pelaksanaannya, atau malah bisa membuka demoralisasi akibat membuka rahasia strategis negara.

Pelebagaan Demokrasi

Pelaksanaan perubahan-perubahan dengan menggerakkan seluruh potensi bangsa ini, yang diiringi perbaikan birokrasi dan agenda strategis untuk memenangkan pertarungan di hadapan pasar, tidak dapat dilaksanakan tanpa pelembagaan demokrasi. Demokrasi di Indonesia memang sudah berjalan sejak pascareformasi 1998. Namun, dari ciri-ciri yang tampak, demokrasi mengarah baru sebatas instrumentasi politik elit. Inilah yang membahayakan perjalanan bangsa kita. Demokrasi menjadi alat kekuasaan di tangan para elit ekonomi dan politik, yang terkadang piawai menggunakan isu-isu sensitif.

Barrington Moore (1969) menyebutkan demokrasi sebenarnya merupakan hasil dari konfigurasi kelas-kelas. Demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia tidak lebih merupakan hasil dari kemampuan kelas elit ekonomi untuk memobilisasi

rakyat untuk memilih saat pemilu. Lantas usai pemilu, bagaimana rakyat melakukan kontrol politik? Apakah lewat DPR yang sudah jelas-jelas para pencari rente? Kalau DPR gagal, bagaimana rakyat mengontrolnya?

Pelebagaan demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa berjalanya prasyarat demokrasi itu sendiri. David Easton (1971), pemikir sistem demokrasi liberal Amerika Serikat, memberikan prasyarat bagi berjalanya demokrasi liberal, yakni terhapusnya kesenjangan pendidikan, ekonomi, akses menuju informasi publik, dan diskriminasi terhadap akses politik. Apakah keempat kesenjangan itu sudah terhapuskan di Indonesia? Jika belum, demokrasi Indonesia tidak mungkin menganut demokrasi liberal *one people one vote*. Yang lahir justru suara rakyat hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan para elit.

Mengelola Indonesia

Dalam teori sosial, tidak ada teori yang mampu diterapkan secara universal di berbagai tempat dan berbagai waktu. Sebuah teori akan tepat jika memiliki kontekstualisasi ruang dan waktu. Dalam konteks inilah rumusan mengelola Indonesia perlu memikirkan tiga aspek. **Pertama**, melihat konteks yang tengah berjalan berikut seluruh konfigurasi aktornya serta *rule of the game* yang berjalan, sekaligus melihat pula tren global yang berkembang. **Kedua**, merumuskan konteks masa depan untuk diambil celahnya yang sesuai dengan modal potensial yang kita miliki. **Ketiga**, mengambil keputusan-keputusan terbaik sebagai pilihan strategis.

Dalam mengelola Indonesia perlu disadari bahwa kita tidak akan memiliki referensi yang pas karena Indonesia itu negara

yang khas, dengan karakter negara kepulauannya. Dalam kajian antropologi, ekologi, ataupun geografi manusia, disebutkan bahwa karakter lingkungan berdampak dalam pembentukan karakter sebuah etnis atau masyarakat.

Indonesia adalah negara kepulauan di tengah lalu lintas antarbenua, di samping juga negara agraris yang subur di atas rangkaian cincin vulkanis. Mengelola Indonesia harus mempertimbangkan pertemuan dari keunggulan karakter keduanya ini. Karakter laut yang terbuka permisif, ofensif, dan haus tantangan, dipadukan dengan agraris subur yang harmonis dan kreatif. Perpaduan karakter perlu diarahkan dalam mengelola potensi masyarakat Indonesia yang plural. Pemimpin negarawan seyogianya memiliki kemampuan ini. Pengetahuan tentang potensi Indonesia yang majemuk bisa membawanya sebagai *collective leader*.

Kaca mata strategis dan taktis perlu dijadikan bahan untuk menjawab persoalan untuk menentukan celah apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan negeri kepulauan terbesar, yang subur, penuh potensi sumber daya di Indonesia ini menjadi sebuah rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya untuk rakyat Indonesia, namun juga untuk membentuk peradaban dunia baru.

Sekali lagi, daripada sibuk bertanya siapa sosok pemimpin atau presiden negarawan, lebih baik kita mengorganisasikan diri untuk menjadi bagian rakyat yang sadar dan terus mereproduksi kaum intelektual progresif dan kaum teknokrat progresif yang sadar menempatkan diri untuk mengelola negeri ini. Dengan demikian, tidak penting lagi menantikan sosok tunggal ideal datang. Sudah waktunya kita semua bergerak! []

Dinar Ramadhani

Kepekaan dan Integritas Negarawan



*Kalo aku jadi presiden
Tolong beritahu siapa yang curang
Supaya nggak ada lagi kebobolan
Dan rakyatku pun jadi tenang*

Lirik lagu Sslank berjudul “Kalau Aku Jadi Presiden” di atas sedikit banyak menggambarkan suara hati dan kegelisahan rakyat Indonesia. Meski bukan lagu baru, maknanya masih berlaku hingga hari ini.

Hampir tujuh dekade sejak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, negara ini seolah masih dijajah, bahkan mungkin oleh presidennya sendiri. Hal ini bisa terjadi jika seorang pemimpin tidak lagi membela kepentingan rakyatnya sendiri, jika seorang pemimpin hanya ingin berkuasa, dan jika seorang pemimpin bukanlah orang yang tepat untuk memimpin. Kemungkinan kedua, penjajahan masih terjadi sebagai akibat rakyat negeri ini yang justru membiarkan dirinya sendiri terjajah. Pasrah dalam kesengsaraan, diam meskipun mengetahui ketidakadilan telah terjadi, mengumpat tanpa melakukan sesuatu yang pasti.

Presiden Negarawan

Padahal, sebagai presiden atau bukan, pemimpin atau rakyat biasa, kita tidak boleh diam begitu saja. Kita tidak ingin keadaan di lirik lagu di atas berlaku lebih lama lagi, bukan?

Di Mana Kepekaan?

Salah satu hal penting yang harus dimiliki seorang presiden adalah visi, yaitu tujuan yang dibawa untuk menakhodai yang dipimpinnya. Lantas bagaimana cara membuat visi? Tidak ada resep untuk membuat visi tertentu. Visi ini datang dari sebuah kegelisahan. Kegelisahan atas apa yang terjadi di sekitarnya. Kaum akademis menyebutnya *sense of crisis*, yaitu kepekaan untuk merasakan adanya masalah di sekitarnya. Visi ada sebagai pemecah kebuntuan dan solusi atas permasalahan yang terjadi. Apa jadinya presiden jika tidak memiliki *sense of crisis* ini? Apa jadinya presiden yang tidak memiliki visi? Atau bagaimana jika presiden memiliki visi yang salah?

Bukan hanya presiden, *sense of crisis* perlu pula dimiliki oleh setiap kita. Bila rakyat pun kehilangan *sense of crisis*, ini pertanda buruk. Sebuah peradaban sakit tengah dirintis atau bahkan berdiri tegak. Seperti apa peradaban yang sakit? Ridwan Kamil menyebutkan tiga ciri peradaban sakit, yakni pemerintah yang koruptif, pebisnis yang oportunistis, serta akademisi yang apatis. Amat disayangkan tentunya jika ketiga ciri tersebut masih melekat kuat pada negara kita.

Agar *sense of crisis* terus melekat dalam diri pemimpin, kedekatan dengan rakyat yang dipimpin mutlak harus ada. Pemimpin seperti presiden harus hidup dekat rakyatnya. Bagaimana bisa pemimpin membela kepentingan rakyat jika dia tidak tahu rasanya menjadi rakyat jelata? Bagaimana bisa

pemimpin merasakan penderitaan rakyat jika dia tidak hidup berdampingan dengan warga di bawah? Sudah bukan saatnya lagi presiden, pebisnis, ataupun akademisi menjadi kaum elitis. Mereka tidak seharusnya hanya menggunakan otak, tetapi juga hati. Karena pertemuan antara hati dan akal akan menjadi kekuatan terbesar yang dapat dimiliki manusia.

Tentu saja memiliki *sense of crisis* tidak cukup. Harus ada keberanian dalam mengungkapkan kegelisahan ini, keberanian yang juga disertai tindakan. Kita tentu tak asing lagi dengan kalimat hikmah berikut, "Sebuah negara jatuh bukan karena berkuasanya orang-orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang yang berilmu." Dan Brown, dalam karyanya yang berjudul *Inferno*, menyebutkan pernyataan yang lebih tajam mengenai hal ini: "*The darkest places in hell are reserved for those who maintain in their neutrality in times of moral crisis.*"

Pelayan

Menjadi pemimpin berarti berkuasa, terkenal, dan terlihat hebat. Mungkin itu salah satu sebab orang berbondong-bondong untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Namun, boleh jadi semua pengidam kursi presiden itu belum menyadari bahwa hakikat seorang presiden itu pelayan bagi rakyatnya; bukan sebaliknya, orang yang getol minta dilayani.

Menjadi presiden berarti siap memikirkan kepentingan rakyatnya melebihi kepentingannya sendiri. Menjadi presiden berarti menjadi orang pertama untuk menghadapi masalah, menjadi orang terakhir yang menerima rezeki, dan menjadi teman kerja di saat rakyat bekerja. Seorang presiden tidak akan takut merugi karena memberi. Sesungguhnya, dengan memikir-

kan kepentingan orang lain, kepentingan bagi kita sendiri akan terpenuhi.

Di sisi lain, menjadi seorang presiden tidak hanya bicara soal jabatan, tetapi juga seberapa besar pengaruh yang berhasil ditularkannya pada rakyatnya. Seorang presiden yang tidak berhasil memberikan pengaruhnya kepada rakyat, dia hanya berakhir sebagai pemimpin formalitas. Maka, menjadi seorang presiden berarti menjadi seorang teladan yang patut dicontoh bagi rakyatnya. Dialah cerminan dari sebuah negara yang dipimpinnya, yang gerak-geriknya menjadi perhatian bagi dunia.

Kita bisa belajar pada Umar bin Abdul Aziz. Kisah mengenai kejujuran dan integritasnya yang tinggi sebagai pemimpin dunia telah diceritakan dari masa ke masa. Lilin (sebagai pengganti lampu) pun dia tiup jika tidak digunakan untuk membicarakan kepentingan negaranya. Tidur saat sakit pun dia tunda untuk mengurus kecurangan yang terjadi di antara rakyatnya. Kemewahan dari fasilitas sebagai pemimpin dikembalikannya untuk rakyat. Tidak heran bila dalam umur pendek kepemimpinannya, masyarakat yang dipimpin Umar hidup tenteram sejahtera.

Negarawan Sesungguhnya

Telah jelas bahwa seorang presiden haruslah menjadi seorang negarawan dalam kepemimpinannya. Namun, kenegarawanan ini bukan milik presiden semata. Seorang presiden negarawan pun akan mengalami banyak kesulitan jika tidak didukung oleh sifat kenegarawanan. Tidak cukup hanya pada diri seorang presiden, sifat negarawan perlu dimiliki oleh setiap dari kita, setiap dari masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana caranya menjadi seorang negarawan?

Menjadi seorang negarawan berarti berpikir mengenai kepentingan publik, mengenai negaranya secara utuh. Lebih jauh lagi, negarawan berpikir secara komprehensif mengenai hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Dia tak lagi berpikir terkotak-kotak sesuai keahliannya saja, tetapi memandang sesuatu secara utuh dalam lingkup negara. Dia akan berpikir untuk memajukan negaranya secara bersama-sama, berkolaborasi dengan elemen bangsa yang lain, karena pasti suatu masalah tidak akan dapat diselesaikan dengan bidangnya saja.

Menjadi negarawan bukan berarti menjadi negarawan seorang diri tanpa peran pihak yang lain. Dia adalah orang yang mampu menularkan sifat-sifat kenegarawanannya kepada orang-orang di sekitarnya, mampu mengajak mereka untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik untuk negaranya. Dia tidak tampil sebagai bintang tunggal, tetapi sebagai fasilitator yang membantu sesamanya tumbuh. Dia tidak berdiri menjulang di antara lainnya, tetapi turut berjuang bersama untuk menggapai cita-cita yang tinggi.

Setiap dari kita dapat menjadi seorang negarawan, meskipun tak setiap dari kita dapat menjadi seorang presiden. Seorang negarawan sejati adalah orang yang bersedia menghabiskan waktunya untuk berbuat demi kepentingan bersama. Dia terus mengasah *sense of crisis* seraya terus belajar sebagai pelayan bagi kepentingan orang banyak.

Dia juga mampu dan mau merendahkan egonya untuk dipimpin; bukan justru saling menjatuhkan dan membuktikan pihak lain yang salah. Dia sadar bahwa menyalahkan orang lain tak membuatnya menjadi benar. Integritas yang hendak dibangun bukan berdasarkan ego menyalahkan orang lain.

Dia sadar bahwa dirinya harus menjadi solusi bagi negaranya, bukan justru menjadi tambahan beban tanggungan negara yang sudah banyak ini. Jadi, meskipun bukan presiden, dia akan terus bekerja merawat Indonesia.[]

Yunia Faizah Arsy

Memunculkan Presiden Negarawan



Presiden sering dimaknai khusus sebagai pemimpin negara meskipun arti umumnya adalah yang mengepalai suatu bidang atau organisasi. Negarawan (*statesman*) sendiri istilah yang menggambarkan karakter sosok yang mampu dan mau berkontribusi besar untuk negaranya. Presiden negarawan jelas menjadi sosok idaman yang diharapkan dapat memimpin negeri kita ini. Keberadaannya hingga kini masih dirindukan, masih dinantikan di ambang pintu.

Apakah benar-benar ada presiden negarawan ini? Kalau iya, di mana dia sekarang? Masih tertidurkah atau sedang dalam persiapan?

Negeri ini tengah krisis pemimpin yang berkarakter, krisis negarawan, krisis presiden yang berkarakter negarawan. Ungkapan-ungkapan itu terus digaungkan. Miris mendengarnya, apalagi jika dikorelasikan dengan jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 250 juta lebih. Dengan jumlah ini apakah tidak ada lagi perempuan yang mampu melahirkan sosok presiden negarawan, atau tidak ada lagi ayah yang menjadi model, atautkah karena kontaminasi lingkungan yang membuat sosok negarawan itu amat susah lahir di Indonesia?

Menurut Mahfud MD, Indonesia miskin karena pemimpinnya tidak menjadi negarawan yang benar. Pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, dan juga keprihatinan senada dari banyak tokoh, menggambarkan buruknya kondisi negeri kita saat ini. Mungkin banyak di antara kita sering mendengarnya sehingga menjemukan tatkala diulang-ulang di media. Pasalnya, pihak yang dikritik tidak kunjung mau berubah. Walaupun demikian, keprihatinan yang dilontarkan para tokoh mampu melecet sebagian orang, memantik semangat sebagian pemuda yang sedang merangkak menyusun harap. Sudut pandang pesimis ataukah optimis akan menentukan cara kita menyikapi kondisi Indonesia saat ini.

Di tengah pesimisme banyak pihak, harus selalu ada harap dan keyakinan di tengah usaha yang kita lakukan. Banyak potensi yang Indonesia miliki, begitu juga dalam hal sumber daya manusia. Sosok presiden negarawan masih bisa dilahirkan kembali dari rahim Ibu Pertiwi. Presiden negarawan yang dibutuhkan oleh negeri ini adalah yang memimpin dengan jiwa, kejujuran dan keberanian selalu jadi senjatanya, rendah hati dan keikhlasan sebagai perisainya, serta kesejahteraan rakyat adalah landasan pergerakannya.

Presiden negarawan itu punya cita-cita besar yang realistis untuk negerinya. Dia tidak mudah mati ketika kegagalan bergantian menyapa. Mungkin istirahat sejenak akan dipilihnya; bukan untuk melupakan tujuan, melainkan untuk menyusun kembali strategi agar kesejahteraan benar-benar bisa diraih. Dia tidak benar-benar mati ketika jasadnya sudah terkubur di bumi. Cita-cita besar untuk negerinya akan diteruskan oleh presiden negarawan selanjutnya karena itu bukan cita-cita pribadi, bukan untuk pemenuhan kantong sendiri atau kelompoknya.

Kita memang masih krisis negarawan, tapi tidak sampai kehabisan stok calon pemimpin negarawan. Masih ada pemimpin bangsa yang bisa dipercayai, diteladani dan dipelajari strategi memimpinya. Masih ada harap untuk Indonesia nanti. Sekarang saja sudah mulai bermunculan model pemimpin yang tetap menjaga semangat negarawannya.

Pintu Perubahan

Himpitan dan kesenjangan yang masih terasa saat ini dapat menjadi peluang melahirkan sosok-sosok negarawan muda di kemudian hari. Negarawan lahir dari rahim penderitaan. Dengan demikian, kompleksnya permasalahan yang ada di negeri ini kini, merupakan potensi munculnya *problem solvers* yang mumpuni. Pemuda tengah mengasah kecakapannya dan mempersiapkan diri untuk masanya kelak.

Saya memercayai bahwa presiden negarawan itu ada dan akan muncul ketika momentum puncak kesiapan dan kematangan pribadinya bertemu dengan waktu yang tepat. Keberadaannya benar-benar dibutuhkan oleh negara.

Ketika seorang presiden negarawan memimpin sebuah negara, dia tetap tidak bisa bekerja sendiri. Dia perlu berbagi peran dalam berbagai bidang. Negarawan yang memiliki keahlian dan spesifikasi ilmu dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan lain-lain sangat dibutuhkan untuk tetap berada dalam bidangnya. Sektor yang kerap dipandang marginal tersebut perlu sentuhan tangan ahli agar kompleksnya permasalahan dapat terurai dan terselesaikan. Saat yang sama, negarawan dalam ranah pemerintahan (politik) juga hadir untuk menggantikan pejabat-pejabat yang membuat sistem perpoli-

tikan nasional rusak. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap panggung politik diharapkan perlahan pulih. Agar masyarakat kembali percaya bahwa politik negara merupakan unsur penting yang harus terjaga dari kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Untuk menjadi sosok negarawan dalam bidang apa pun, sikap kenegarawanan tidak bisa hanya dimunculkan sewaktu-waktu. Negarawan harus sudah menjadi karakter yang melekat dan menggambarkan seperti apa tokohnya. Kejujuran, amanah, dan profesional merupakan bekal yang wajib dimiliki oleh negarawan.

Sebagai rakyat biasa, terkadang kita hanya menilai pemimpin yang ada sudah berkarakter negarawan atautkah belum. Kita luput untuk menyadari bahwa diri kita juga seharusnya berubah. Karena negarawan tidak hanya berlaku pada sang penguasa atau pejabat di pemerintahan, namun juga kita semua. Oleh karena itu, kita secara pribadi perlu terus memperbaiki kekurangan dalam diri. Bukan hanya menanti perubahan pada orang lain, bukan hanya menanti hadirnya sosok presiden negarawan yang diharapkan dapat mengubah kondisi negeri ini. Sungguh tepat perkataan Leo Tolstoy, “Banyak orang tahu bagaimana orang lain harus berubah, namun sedikit yang tahu bahwa diri mereka yang seharusnya berubah.”

Akhirnya, kita perlu memupuk optimisme sembari terus bekerja. Negeri ini masih punya banyak pemuda yang—boleh jadi—memiliki kekuatan besar menurut Presiden Soekarno namun belum disadari oleh si empunya, “Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia!” Maka, kualitas negarawan mudalah yang jelas dapat mewujudkan asa presiden

pertama kita ini. Masalah yang menumpuk bukan berarti akhir dari negeri ini. Akhir itu rahasia Tuhan. Tetaplah berjuang dan berharap bahwa setelah amukan badai akan muncul kembali cerahnya sinar mentari perubahan. Setelah bertubi-tubi dan mendalamnya masalah negeri ini, akan ada solusi yang menghampiri.

Sudah seharusnya kita semua yang masih memiliki tekad membara, tak perlu menunggu datangnya presiden negarawan di ambang pintu. Karena kitalah sendiri yang seharusnya berjalan tegak menuju pintu itu. Berjalan dengan keberanian dan keikhlasan yang selaras, menuju pintu kejayaan negeri tercinta: Indonesia. []

Asma Azizah

Andai Negarawan itu Karya Sastra



Orang selalu bilang bahwa Indonesia kekurangan sosok pemimpin ideal yang mampu mengampu negerinya menjadi lebih baik. Saat ini masyarakat Indonesia tidak tahu lagi harus mengidolakan siapa sehingga siapa saja mereka idolai. Hilangnya sosok teladan inilah yang pada akhirnya menimbulkan hipotesis bahwa kita, masyarakat Indonesia, tidak tahu ke mana bangsa ini harus berlayar.

Sebelum berbicara tentang presiden negarawan, ada sedikit bagian yang harus diperjelas. Kepemimpinan bukan hanya berbicara tentang pemimpin. Kepemimpinan adalah berbicara tentang pemimpin dan siapa yang dipimpin. Itu artinya kepemimpinan bukan sistem satu tangan yang terus menjulur tanpa butuh tangan lain untuk melaksanakan tugasnya.

Strukturalisme dan Pragmatisme Kepemimpinan

Strukturalisme dan Pragmatisme Kepemimpinan ini bukan teori baru yang lahir begitu saja. Teori ini—jika bisa dikatakan sebagai sebuah teori—mengadopsi teori dalam kesusastraan, yaitu strukturalisme dan pragmatisme sastra. Teori ini jelas tidak bisa diserap secara mentah oleh bab kepemimpinan. Na-

mun, saya hanya akan mengambil beberapa sudut pandang yang bisa disesuaikan dengan tema kepemimpinan.

Teori strukturalisme adalah teori yang meneliti dan menelaah unsur-unsur internal yang ada dalam suatu karya sastra. Disebut strukturalisme karena jelas meneliti struktur suatu karya sastra, bentuk juga bagian internalnya. Boleh disebut, teori ini mengesampingkan komponen eksternal yang bisa saja berpengaruh pada penilaian suatu karya sastra.

Adapun teori pragmatik adalah teori yang berpusat pada pembaca. Pragmatik di sini bukanlah ‘pragmatis’ ataupun ‘pragmatisme’, dua kata yang sering kita dengar sehari-hari yang berarti ‘mengambil jalan cepat untuk meraih keuntungan’. Pragmatik dalam dunia bahasa dan sastra berarti studi yang mempelajari makna yang diucapkan penutur atau penulis dan tafsirannya oleh pendengar atau pembaca. Pragmatik tidak akan bisa berjalan tanpa adanya lawan bicara.

Strukturalisme dan pragmatisme inilah yang coba saya terapkan pada pemimpin dan yang dipimpin. Keduanya akan mengikat sosok pemimpin dan rakyatnya.

Seorang pemimpin yang strukturalis adalah sosok pemimpin yang melihat objek yang ada di depannya apa adanya. Apa bentuk fisik yang terlihat dari objek tersebut menunjukkan sosok objek tersebut. Seorang pemimpin yang memimpin Indonesia, harus mengakui Indonesia sebagaimana kelihatannya. Dia tidak akan menuntut atau memandang sama Indonesia—dengan korupsi, kesenjangan ekonomi, dan lainnya—dengan negara lain yang tentu saja punya karakter tersendiri. Dalam arti lain, dia tidak akan mengutuk Indonesia dengan segala ke-

bobrokannya karena di sisi lain Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang luar biasa.

Menurut Jalaluddin Rakhmat, seseorang menjadi manusia besar—pemimpin—ketika dia memiliki kemampuan intelektual untuk memahami realitas dan kemampuan bertindak yang tepat. Dia bukanlah seseorang yang hanya berkuat pada teori filsafat yang berupa konsep dan gagasan besar. Tapi ia harus bisa menangkap realitas. Ia harus mengerti apa yang terjadi pada zamannya (Rakhmat, 1999: 174).

Kemampuan untuk memahami realitas inilah yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, yang pada akhirnya bisa membuat seorang pemimpin mengambil keputusan yang tepat. Seorang pemimpin yang tidak melihat fakta, atau cenderung melihat fakta lain yang tidak berhubungan, tidak akan bisa mengambil keputusan yang tepat karena objeknya berbeda. Indonesia tidak bisa disamakan dengan Korea Selatan dalam hal kemajuan ekonomi, kendati keduanya mendapatkan kemerdekaan dari Jepang dalam waktu yang hampir bersamaan. Indonesia dan Korea Selatan memiliki corak budaya dan manusia yang berbeda, yang tentu saja mengakibatkan perbedaan proses kemajuan, baik dalam hal ekonomi ataupun hal lainnya.

Lalu bagaimana dengan pragmatisme kepemimpinan? Pragmatisme di sini berpusat pada orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Mereka yang dipimpin inilah yang akan memberikan *feedback* terhadap suatu kepemimpinan, yang tentu saja akan menjadi penentu dan penimbang bagi keberlangsungan suatu kepemimpinan ke depan.

Terkadang kita sering pesimis dengan pemimpin yang saat ini memimpin kita, apalagi jika melihat hasil kepemimpinan-nya yang seakan tidak berubah ke arah yang lebih baik. Jika Anda pernah melihat film *Red Cliff*, Anda akan melihat suatu adegan yang menyentuh, yaitu saat tentara Cao-Cao—yang sedang terkena penyakit tifus—merindukan keluarganya di kampung halaman. Yang mengejutkan, apa yang dirasakan tentara tersebut juga dirasakan oleh Cao-Cao—bahkan lebih. Apa yang kemudian dilakukan Cao-Cao adalah menyemangati tentara-tentaranya bahwa mereka sekarang berada dalam nasib dan tujuan yang sama.

Di sini diperlukan adanya perubahan paradigma terhadap seorang pemimpin. Jika kita—orang yang dipimpin—diibaratkan sebagai pembaca dan pemimpin itu diibaratkan sebagai karya sastra, kitalah yang berkuasa penuh untuk menilai pemimpin kita. Kita memang layak mengkritik pemimpin namun selayaknya kritik sastra, kritik dilontarkan bukan hanya untuk mengkritik, tapi juga untuk membangun.

Namun, di sini strukturalisme bukan hanya untuk pemimpin dan pragmatisme bukan hanya untuk yang dipimpin. Seorang pemimpin selain sebagai seorang strukturalis, dia juga harus bisa menjadi pragmatis. Selain bisa menilai realita, dia juga harus memikirkan sisi orang-orang yang dipimpinnya. Dia harus bisa menafsirkan penilaian orang tentang dirinya, yang akan menjadi perbaikan bagi dirinya sendiri.

Mencari Pemimpin Strukturalis-Pragmatis

Tidak mudah sesungguhnya mencari objek yang bisa disesuaikan dengan teori yang kita inginkan. Mencari pemimpin

strukturalis sekaligus pragmatis jelas tidak mudah karena itu berbicara tentang tataran pemimpin ideal. Namun, Presiden Bolivia Evo Morales bisa menjadi contoh.

Evo Morales memimpin Bolivia sejak 2006. Dia merupakan presiden pribumi pertama Bolivia. Latar belakangnya petani koka, profesi seperti kebanyakan masyarakat Bolivia lainnya. Di sini ada satu poin penting bahwa seorang pemimpin strukturalis hanya bisa lahir dari masyarakat itu sendiri. Seorang pemimpin tidak bisa struktural—merasakan realita rakyat dan negaranya—jika dia tidak pernah hidup seperti kebanyakan rakyatnya. Dia harus tahu apa rasanya sakit jika ingin tahu sakitnya orang lain. Ada sama rasa di sini, yang harus sama-sama dimiliki.

Morales juga yang menolak himbuan Amerika Serikat untuk menghentikan penanaman koka karena bisa berpengaruh terhadap produksi kokain. Dengan perasaan seorang mantan petani koka, Morales menolak himbuan Amerika Serikat. Morales menganggap bahwa koka adalah tanaman turun-temurun bangsa Andes, dan digunakan sebagai obat, bukan menyalahgunakannya menjadi kokain. Morales tahu perasaan rakyatnya—pragmatisme—jika koka itu dimusnahkan hanya karena permintaan asing.

Setelah diresmikan menjadi presiden, Morales langsung melakukan nasionalisasi untuk perusahaan migas dan sumber daya lainnya, yang tentu saja mengakibatkan kecemasan di kalangan investor asing. Morales sadar bahwa sumber daya alam yang dimiliki negerinya harus dimiliki oleh masyarakatnya sendiri, bukan lari ke tangan-tangan asing. Dia menyadari kesenjangan yang diakibatkan tidak meratanya pendapatan,

lantas memperbaikinya lewat nasionalisasi perusahaan-perusahaan vital. Tidak butuh waktu yang lama, Morales pun berhasil memperbaiki perekonomian Bolivia.

Kejelian melihat realita menyebabkan Morales tahu apa yang harus dia perbuat selanjutnya untuk menyelesaikan masalah yang juga menjadi realita di hadapannya. Jika seorang pemimpin tidak strukturalis, tidak mampu melihat realita dan fakta sebagaimana adanya, maka dia hanya akan melihat ke depan namun tidak berpijak pada tanah yang dia tinggali. Dia mempunyai visi, tapi tidak tahu apakah visi itu bisa dia realisasikan di tempatnya berada.

Kasus Indonesia

Bila Bolivia memiliki Morales, bagaimana Indonesia saat ini? Adakah pemimpin strukturalis-pragmatis?

Kita ambil dua nama yang di media digadang-gadangi pemimpin masa depan Indonesia: Joko Widodo dan Anies Baswedan. Jika boleh diibaratkan, kepopuleran Joko Widodo (populer dengan nama Jokowi) dan Anies Baswedan saat ini sama dengan maraknya novel pop di rak-rak toko buku. Novel dengan gaya pop dan akrab di masyarakat—dengan tingkat golongan tertentu—dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan *blusukan*-nya langsung mengena di masyarakat karena sejatinya masyarakat adalah sang *blusuker* itu sendiri. Anies Baswedan pun mulai bisa menarik perhatian masyarakat dengan Gerakan Indonesia Mengajar, yang jelas menjadi alternatif jawaban atas keresahan masyarakat akan pendidikan nasional yang terus bermasalah.

Rasa mereka berdua—dan beberapa orang lainnya—yang bisa menyesuaikan dengan rasa Indonesia itulah yang disebut strukturalis sekaligus pragmatis. Mereka melihat realita di sekitarnya, dan apa adanya, untuk kemudian mengambil tindakan solutif. Realita ini saja tidak cukup jika sisi pragmatis—sisi rasa lawan bicara—tidak bekerja lantaran sisi inilah yang bekerja untuk memahami Indonesia itu sendiri.

Mencari seorang pemimpin tidak semudah mencari tokoh wayang berkapabilitas dalam legenda Mahabharata. Manusia memang mudah membuat tokoh ideal tapi sulit membuatnya ideal. Mencari seorang pemimpin strukturalis sekaligus pragmatis jelas tidak semudah mencocokkan teori tersebut dengan kondisi kepemimpinan Indonesia sekarang. Bahkan pencocokan tersebut mungkin sama sekali tidak cocok. []

Dini Fuadillah Sofyan

Model Negarawan Muda



Indonesia memiliki banyak keberagaman dari berbagai aspek. Beragam etnis, agama, golongan, terdapat di banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi bahasa yang berbeda-beda. Jika kita tidak memiliki kepemimpinan yang baik dalam mengelola negara, maka negeri ini akan rentan perselisihan yang tak kunjung usai. Padahal, saat yang sama, keadaan Indonesia saat ini dekat dengan keterpurukan akibat penjajahan.

Indonesia memang sudah merdeka dari kolonialisme. Tapi, belum merdeka dari penjajahan ekonomi. Negara ini dijajah secara halus. Sumber daya alam, mineral, manusia, dieksploitasi oleh negara adidaya di berbagai belahan dunia. Siapa yang tak tergiur dengan kelimpahan dan kekayaan alam negeri ini? Hampir semuanya berlomba-lomba memanfaatkan kita. Penulis merasa, detik ini Indonesia tidak memiliki seorang pemimpin. Presiden yang ada hanya robot yang dikendalikan oleh pihak asing. Identitas bangsa ini sebagai negara perlahan-lahan usang. Harta benda, integritas, moralitas, pikiran, perasaan, kejujuran telah tergadaikan untuk kepentingan individu dan kelompok kebanyakan penguasa di Indonesia.

Saat ini sudah jamak pemimpin yang enggan berkontribusi bagi rakyat. Saat ini, para pemimpin berlomba-lomba mengeruk harta benda dan kekayaan bangsa serta rakyatnya. Hati nurani para pemimpin bangsa sudah ternoda oleh warna hitam pekat. Warna hitam itu berasal dari sifat keserakahan, rasa tak pernah puas dan rasa ingin terus memiliki apa saja yang berada di sekitarnya.

Sebagai Model

Pemimpin itu tidak perlu mengobral janji yang banyak, harapan kelewat batas tanpa aksi nyata, serta gemar mengkritik dan menghujat orang lain. Permasalahan di negeri ini sudah sangat pelik, mengakar, berbudaya serta lumrah dipandang bukan masalah.

Negeri ini selalu jadi target negara asing, tempat uji coba berbagai kepentingan. Negeri ini sudah terlalu lama dijajah, bahkan meski penjajahan saat ini tampak halus namun dampaknya lebih menyengsarakan. Negeri ini sudah lama dibodohi, dijadikan kambing hitam, diperalat, disalahgunakan.

Lalu, apakah rakyat Indonesia lainnya yang masih mencintai negeri ini akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut? Jawabannya, masih ada yang peduli. Mereka tidak lain adalah kaum muda yang sedang dipersiapkan untuk negeri ini bebas dari penjajah yang sebenarnya. Merekalah para negarawan muda.

Negara ini butuh para pemuda yang memiliki integritas tinggi, kejujuran, keterbukaan, rasa terhadap sosial yang tinggi, peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, serta berani bertindak dan mengambil keputusan. Kata kunci seorang negarawan

muda yaitu nekat dalam memperjuangkan hak rakyat, kewajiban sebagai pemimpin dan tidak mudah di interferensi oleh pihak yang memiliki kepentingan untuk kehancuran bangsa.

Negarawan muda merupakan model, panutan bagi siapa pun. Model—atau yang sering disebut tokoh berpengaruh—adalah sosok yang mampu menebar kebaikan, manfaat dan sesuatu terhadap dirinya, lingkungan, bahkan negaranya. Menjadi seorang model yang berintegritas tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan aksi nyata dan perjuangan sehingga memberikan pengaruh pada orang lain untuk mencontoh dan mengikuti.

Model bukanlah figur publik (*public figure*). Tidak setiap figur publik otomatis model. Betapa banyak figur publik ternyata tidak memberikan keteladanan positif bagi orang lain. lain halnya dengan model, dia ada karena memang memiliki sesuatu yang layak dicontoh. Pemuda yang berprestasi dan menjadi figur publik boleh jadi banyak. Namun, mereka belum disebut model negarawan muda apabila masih mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kemanusiaan sesama seraya berbangga dengan prestasinya. []

Fachry Aidulsyah

Heroisme Pemimpin



Setiap memasuki musim pemilihan umum, rakyat disuguhi janji-janji para kandidat yang berlomba-lomba ingin dipilih sebagai wakilnya. Rakyat, selaku pemilih, dibujuk sedemikian rupa dengan berbagai macam jargon yang lebih sering tanpa tindakan nyata. Jargon yang menjanjikan berbagai macam kesejahteraan dan kebahagiaan hanyalah bayangan semu yang tidak pernah terwujud hingga si calon terpilih mencalonkan lagi dalam pesta demokrasi lima tahun berikutnya. Selalu begitu.

Selain dihujani jargon-jargon para politisi, Indonesia saat ini masih dikuasai oleh orang-orang yang menganggap seorang pemimpin adalah yang menduduki jabatan kepemimpinan formal atau memiliki kedudukan tinggi. Dampak dari anggapan ini, muncul dua orientasi besar orang-orang berambisi mendapatkan posisi kepemimpinan tersebut, yaitu ekonomi-politik dan kehormatan.

Secara orientasi ekonomi-politik, kekuasaan aparatus negara dianggap sebagai sumber terpenting pengakumulasian kapital dan privatisasi sektor untuk keuntungan pribadi. Dari sini fenomena baron perampok (*robber barons*) yang ge-

tol melakukan jual-beli suara dan rekayasa mesin politik pun menyeruak di Indonesia.

Terkait dengan orientasi kehormatan, banyak di antara kita yang menganggap bahwa tinggi atau rendahnya jabatan yang dimiliki seseorang sangatlah menentukan tinggi atau rendahnya kemuliaan hidup dan kekayaan. Penilaian inilah yang dicari-cari para penggila kekuasaan. Padahal, bukanlah tinggi atau rendahnya jabatan yang utama, melainkan bagaimana pemegang kekuasaan itu mengoptimalkan diri untuk menyelesaikan amanah sebaik mungkin. Itulah esensi dari kemuliaan pemegang kekuasaan.

Berbicara tentang kepemimpinan, sudah sejatinyalah kita menyadari bahwa pada dasarnya kepemimpinan tidaklah hanya sebatas dimaknai sebagai sebuah posisi jabatan, melainkan hal yang terpenting dari kepemimpinan adalah karakter individu kita yang mampu memajemen diri, menjadi teladan yang baik untuk ditiru oleh orang lain karena kedisiplinan, sikap, kata, sikap, dan tindakan kita untuk berbuat lebih dalam berkontribusi bagi kemanfaatan orang lain.

Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, kita tidak sedang berbicara soal “inilah aku”, melainkan kita sedang berbicara “bagaimana dia, bagaimana mereka.” Risalah kepemimpinan sejati akan mengantarkan jiwa kita untuk berkata, “Ini bukanlah untuk kepentinganku, melainkan ini adalah kepentingan mereka”. Wajarlah jika dalam hal ini, pemimpin yang baik adalah mereka yang pintar merasa, bukan mereka yang merasa dirinya pintar.

Perihal di atas akan membuat kita bertanya-tanya: siapakah pemimpin yang pintar merasa itu? Dalam hal ini, kepintaran

seseorang tidaklah diukur dari seberapa banyaknya kita bisa menjawab soal-soal kognitif secara baik dan benar. Kepintaran seseorang merasa dapat dilihat dari sejauh mana dia bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi kebermanfaatan orang lain.

Oleh karena itu, heroisme seorang pemimpin tidaklah diukur dari sejauh mana dia pandai berbicara, tapi saat yang sama dia justru selalu mengakumulasi kekayaan pribadinya di tengah masyarakat yang masih menderita. Sebaliknya, heroisme seorang pemimpin adalah ketika yang dibicarakan selaras dengan yang diperbuatnya. Dari sinilah dia pun dicintai banyak pihak. Bagi seorang pemimpin, kebahagiaan sejatinya tidak lain kebahagiaan masyarakatnya. Pertanyaannya, sudahkah ini terjadi di Indonesia tercinta kita? []

Annisa Rosdiana

Presiden Produk Panggung Politik



Semua orang punya potensi yang sama untuk menjadi negarawan. Namun sayangnya, hanya ada tiga cara untuk menjadi presiden di Indonesia. Pertama, bergabung dengan partai politik yang memiliki elektabilitas tinggi. Kedua, menjadi penguasa ekonomi kapital alias konglomerat. Ketiga, menjadi sosok yang fenomenal.

Jika hanya tiga cara di atas yang tersedia, maka sosok negarawan bisa layu sebelum berkembang. Tapi kita tak boleh pesimis. Setiap orang punya peran dalam melahirkan presiden negarawan. Dua kunci yang membuka jalan kelahiran presiden negarawan, yaitu membangun panggung politik yang sehat dan menggunakan hak pilih dengan bijak.

Pemilihan presiden bagaikan panggung politik. Orang-orang yang ada di atas panggung berkepentingan untuk menjadi penguasa. Demokrasi memang memberi kebebasan pada siapa pun agar tampil di panggung tersebut. Kemudian rakyat menyaksikan penampilan mereka, dan memilih satu terbaik sebagai si raja panggung.

Saat ini panggung politik diwarnai banyak noda. Mulai dari politik uang hingga politik adu domba. Demi menarik simpati, rakyat disogok dengan uang atau sembako. Kadang hanya diiming-imingi janji palsu selama kampanye. Beberapa menyikut lawan, dengan menebar fitnah di ruang publik.

Politik kotor adalah suatu kejahatan. Seperti caranya, politik kotor dilakukan oleh penjahat, dan akan melahirkan pemimpin jahat. Politik uang berpotensi melahirkan koruptor. Korupsi menjadi salah satu upaya balik modal selama kampanye. Jika tak korup, politikus kotor berpotensi jadi benalu. Bukannya melaksanakan kebijakan prorakyat, dia malah sibuk dengan pencitraan dan kepentingan pribadi.

Membersihkan panggung politik memerlukan peran serta masyarakat. Untuk itu, mari sapu para pengotor politik. Jangan biarkan mereka lolos dan tampil di panggung. Sekalipun lolos, jangan hiraukan mereka. Laporkan setiap kecurangannya kepada pengawas pemilu. Tepis sogokannya. Jangan lekas percaya dengan pencitraannya. Cari bukti dan telusuri masa lalunya.

Tidak hanya menyingkirkan yang kotor. Mari beri ruang bagi sosok bersih untuk maju ke atas panggung. Dukung mereka dengan hak pilih yang kita miliki. Menggunakan hak pilih dalam proses pemilihan umum adalah ciri masyarakat yang baik. Dengan memilih, kita telah berkontribusi terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Selain itu, memilih adalah cara terbaik dalam menentukan nasib kita ke depannya. Kelak sang terpilih menjadi pemimpin, juga penentu kebijakan yang mengatur kehidupan bernegara. Semoga saja, pemimpin yang terpilih tak melupakan janjinya, apalagi melupakan rakyatnya.

[]

Elifas Omega Yusufadisyukur

Pemimpin yang Dipersilakan



Pemimpin yang baik adalah sosok yang menjalani proses sepenuhnya sebagai pemimpin dari lingkup terkecil dalam masyarakat. Dia mengalami sendiri hal yang juga dialami masyarakat dari lapisan terbawah. Nama baik yang dimilikinya sejak berproses dari tingkatan terendah menjadi investasi kredibilitas pribadi yang akan dituai dalam waktu ke depan karena mendapat pengakuan dan rekomendasi dari berbagai pihak yang telah mengenalnya.

Rekam jejak perjuangannya bisa dipercaya. Dalam hal ini, semakin berat dan besar perjuangan masa lalu seorang pemimpin, semakin matang dan peka pula tingkat kepedulian terhadap masyarakat. Sejarah tersebut menjadi pelajaran seorang pemimpin dalam menemukan karakter kuat dalam dirinya ketika dia sudah menjadi pemimpin. Kita bisa menganalogikannya dengan proses metamorfosis kupu-kupu yang memulai dari ulat dengan usaha keras hingga menjadi kepompong. Dalam usaha keluar dari kepompong, kupu-kupu juga menjalani proses yang berat dan harus dilalui sendiri oleh kupu-kupu tersebut. Jika kita membantu mengeluarkannya dari kepompong, justru kupu-kupu tidak bisa terbang.

Seperti kupu-kupu baru terbang indah, rakyat juga bersimpati dan menaruh perhatian serta harapan terhadap sosok yang teruji telah berkontribusi keras tersebut. Lawan-lawan politik yang mendeklarasikan niatnya sebagai oposisi berubah menjadi kawan kritis untuk membantu pemerintahannya kelak. Jadi, tidak ada lagi ancaman dan kegaduhan politik yang tidak perlu seperti marak hadir saat ini.

Dicintai Rakyat

Pemimpin sejati dalam kegiatannya senantiasa meninggalkan jarak dan mengabaikan kedudukan. Dia memilih untuk hidup sejajar dengan rakyat. Dia memahami bahwa seorang pemimpin adalah pelayan yang kehadirannya mampu mendatangkan kebahagiaan, menyelesaikan masalah, dan mendapatkan sambutan hangat penuh cinta dari rakyat. Pemimpin, baginya, bukanlah sebuah posisi, melainkan sebuah aksi. Dan semakin banyak aksi, semakin diakui kapasitas kepemimpinannya.

Beragam permasalahan bangsa Indonesia memerlukan sosok yang sigap melakukan aksi yang nyata untuk menanganinya. Karena jika dibiarkan berlarut-larut, negara dan rakyat Indonesia akan semakin banyak menderita. Ketika kesungguhan bekerja mengatasi beragam permasalahan menjadi watak pemimpin, dia pun dengan mudah dicintai rakyat. Jadi, rakyat mencintai pemimpinnya bukan secara tiba-tiba atau hasil pemaksaan. Ketika rakyat mencintai pemimpin, mereka pun akan senang hati mengikuti perintah dan arahan sosok yang dicintainya.

Kecintaan rakyat tidaklah hadir secara tiba-tiba seperti membalikkan telapak tangan. Sekadar pencitraan di media massa saja tidak cukup. Kecintaan itu hadir karena diawali kedekatan dalam berkomunikasi dengan rakyat. Sekat-sekat protokoler tidak dianggap harus ada, bahkan bisa jadi sering diabaikan. Kita pernah memiliki Soekarno, yang begitu akrab di hati rakyat. Setiap kehadirannya bersama rakyat selalu mengundang antusiasme tinggi.

Muncul sebuah bayangan pada masa mendatang tentang pemimpin Indonesia. Dia adalah sosok yang dikenal baik oleh rakyat melalui kesantunan dan kekuatan karakter yang melekat dalam pribadinya. Dia mudah untuk berdekatan dengan rakyat, terutama saat mendengarkan aspirasinya.

Dekat di hati rakyat dan membuang formalitas protokoler bukan berarti pemimpin sosok lemah. Sebaliknya, dia justru sosok yang tegas dalam bertindak dan menghadapi ancaman dari luar yang mencoba mengganggu stabilitas negara. Di samping itu, tangguh dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.

Seseorang yang melepaskan segala ambisi dan keuntungan sepihak yang diinginkannya, dan memilih mengabdikan sebesar-besarnya kepada negara, dialah sosok pemimpin negarawan. Dia tidak butuh proses rumit untuk menjadi Pemimpin yang Dipersilakan. []

Salsabila Khotibatunnisa

Keluarga Negarawan



Menjadi seorang negarawan bukanlah capaian yang mudah. Tidak setiap penguasa atau pemimpin jabatan di pemerintahan secara otomatis adalah negarawan. Menjadi negarawan hakikatnya hasil dari tempaan lama yang diterima sang tokoh dimaksud. Dan tempaan pertama tidak lain adalah keluarganya.

Keluarga merupakan sistem utama dan pertama dalam kehidupan setiap insan. Di dalam sebuah keluarga seorang calon negarawan dididik dan dibesarkan. Keluarga, yang merupakan unit sosial terkecil, memiliki beberapa fungsi yang dirumuskan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagai tempat keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Fungsi-fungsi inilah yang memiliki peranan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Keluarga merupakan tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi keyakinan bagi keluarga tersebut. Penanaman nilai-nilai agama merupakan hal yang

penting untuk ditanamkan sejak dini karena akan menjadi landasan bagi anak dalam menentukan sikapnya. Keluarga sebagai tempat pendidikan artinya keluarga berkewajiban memenuhi pendidikan setiap anggota keluarganya, baik pendidikan *hard skill* maupun *soft skill*.

Keluarga dengan berbagai fungsi lainnya merupakan sebuah sarana utama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang merupakan struktur terkecil dari sebuah bangsa. Tidak mungkin ditemukan sebuah bangsa tanpa ada sebuah struktur organisasi di dalamnya. Tiadalah pula sebuah struktur terbentuk tanpa hadirnya seorang pemimpin, dan pemimpin itu adalah individu. Satu dari banyaknya individu yang dilahirkan, dibentuk dan dididik dalam sebuah keluarga.

Keluarga memiliki banyak komponen di dalamnya yang akan membentuk kepribadian setiap individu. Ada manajemen di dalam keluarga, pengasuhan, pembagian tugas, dan sebagainya. Proses penanaman pola pikir, sikap, nilai-nilai karakter dan budaya semuanya terbentuk di dalam keluarga. Faktor pengasuhan menjadi salah satu faktor penting dalam menanamkan nilai-nilai dan pola pikir serta perilaku di dalam diri anak. Karakter seorang individu mencerminkan pola asuh di dalam keluarganya.

Keluarga dapat pula diibaratkan sebagai miniatur kecil sebuah negara yang di dalamnya akan ditemukan pola pembagian tugas antara ayah, ibu, dan anak, layaknya ditemukan di dalam sebuah negara dengan struktur kepemimpinan dan pembagian peranan. Dalam lingkup sebuah negara, individu merupakan komponen terkecil, dan keluarga merupakan struktur sosial terkecil. Kualitas seorang individu merupakan cerminan dari

kualitas keluarganya. Kualitas sebuah negara mencerminkan kualitas masyarakatnya, dan kualitas masyarakat mencerminkan kualitas keluarga yang dimiliki oleh masyarakat.

Dengan mengetahui keterkaitan erat keluarga, masyarakat, dan negara, seyogianya kita memulai memperbaiki yang kecil terlebih dulu, tanpa mengabaikan yang besar. Tantangan pembentukan keluarga sehat saat ini semakin besar ketika banyak kita temukan kehidupan keluarga yang hancur. Ibu membunuh anak, suami membunuh istri, ayah menghamili anak, dan berbagai permasalahan keluarga lainnya yang terlalu panjang jika disebutkan di sini. Singkatnya, sungguh rentan sekali kondisi keluarga di negeri ini. Belum lagi mahligai pernikahan sudah tidak lagi dianggap sesuatu yang sakral dan suci. Dengan begitu mudahnya nikah dan cerai dalam hitungan bulan ataupun pekan bahkan mungkin hari. Sekarang lihatlah negeri ini dengan kesemrawutan yang ada, mungkin semua cerminan dari kesemrawutan struktur keluarga dan kerentanan dari keluarga itu sendiri.

Oleh karena itu, membangun keluarga merupakan langkah yang semestinya perlu menjadi konsentrasi, baik oleh pemerintahan maupun setiap individu dan masyarakat itu sendiri. Karena keluarga adalah awal terbentuknya individu yang mampu membawa kemajuan bagi negeri ini. Jadi, omong kosong kita bisa melahirkan para pemimpin negarawan bila keretakan dalam keluarga Indonesia dianggap persoalan sepele. Bukanlah negarawan hanya terlahir dari keluarga yang membentuknya sebagai negarawan pula? Bukan keluarga yang dipenuhi persoalan rumah tangga yang tidak tertangani. []

Inspirasi Presiden Negarawan

Titis Sekti Wijayanti

Pemimpin Negarawan untuk Tanah Surga



“Kakek *ndak* ikut?” teriak Salman dari kejauhan.

“Kakek dengan siapa di sini?” tanya Salman sekali lagi saat menghampiri kakeknya.

“Sama Pak Gani Kepala Dusun, sama Bu Astuti, Pak Lanyong, Lizet, Pak Gaok, dan seluruh warga Indonesia yang ada di sini *lah*,” jawab Kakek.

“Kalau Kakek di sini, saya juga di sini *lah*,” tegas Salman.

“Kalau kau tak ikut, kau tak dapat pistol-pistolan,” ancam Ayah.

Percakapan di atas merupakan salah satu *scene* dalam film *Tanah Surga... Katanya*. Film yang di sutradarai oleh Herwin Novianto ini mengambil *setting* di sebuah desa terpencil perbatasan Indonesia dan Malaysia, tepatnya di Kalimantan. Film berkisah tentang Salman seorang anak kecil berusia sepuluh tahun yang ditinggal mati oleh ibunya. Ia memilih bertahan dengan Hasyim, kakeknya yang mantan sukarelawan konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1965. Ayah dan adiknya memutuskan pindah ke Malaysia demi kehidupan yang lebih baik.

Salman kecil tumbuh dan berkembang melalui cerita-cerita Hasyim mengenai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini kentara dalam beberapa adegan Salman di film tersebut. Salah satunya saat Salman diberikan tugas oleh Ibu Guru Astuti untuk membacakan puisi di depan dinas pendidikan yang berkunjung ke sekolah mereka. Satu-satunya sekolah di desa dengan tenaga satu orang guru yang mengajar dua kelas sekaligus dalam satu ruangan bersekat dengan satu papan tulis. Puisi yang dibawakan Salman berjudul *Tanah Surga*.

Bukan lautan hanya kolam susu (katanya)

Tapi kata Kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu

Kail dan jala cukup menghidupimu (katanya)

Tapi kata Kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara

Tiada badai, tiada topan kau temui (katanya)

Tapi kenapa Ayahku tertiuip angin ke Malaysia?

Ikan dan udang menghampiri dirimu (katanya)

Tapi kata Kakek, "Awat ada udang di balik batu!"

Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman (katanya)

Tapi kata Dokter Intel belum semua rakyatnya sejahtera, banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri

Puisi dengan kalimat-kalimat mudah dipahami isinya. Beberapa penggal kalimat tidak asing didengar sebagai syair lagu, sedangkan beberapa kalimat lainnya adalah kenyataan yang sedang terjadi di Indonesia. Jika para pemimpin negeri menyediakan sembilan puluh menit waktunya untuk menonton film

ini, puisi Salman akan menjadi cambuk bagi amanah yang sedang dijalankan. Benarkah kayu dan batu kekayaan bangsa Indonesia selama ini dipergunakan untuk membangun surga mereka sendiri?

Selain puisi, ada satu lagi adegan Salman yang menyentak hati. Bermula saat Salman memutuskan tidak masuk sekolah untuk bekerja agar dia dapat mengumpulkan uang guna pengobatan kakeknya. Suatu hari Salman pergi ke salah satu pasar di Malaysia untuk menjual barang dagangannya. Sepulang dari bekerja, Salman membeli sarung baru sebagai hadiah untuk kakek. Namun, di tengah jalan dia melihat seorang pedagang menggunakan kain merah putih sebagai penutup dagangan. Dengan santun Salman memanggil pedagang tersebut, kemudian menukarkan sarung barunya dengan kain merah putih penutup dagangan tersebut.

Dalam perjalanan pulang, saat mencapai jalan perbatasan Indonesia-Malaysia, Salman berteriak, "Balik kampung! Hidup Indonesia! Hidup Merah Putih! Hiduplah Indonesia!" sembari berlari dan mengibarkan kain merah putih dengan kedua tangan terentang ke atas

Melalui film yang dirilis 15 Agustus 2012 itu, sudah sepatutnya kita mengaca diri pada seorang Salman mengenai makna negarawan. Salman hidup di sebuah desa yang secara *de facto* dan *de jure* bagian Indonesia. Dia mengaku berkewarganegaraan Indonesia, namun betapa ironinya saat mengetahui bahwa mata uang yang digunakannya adalah ringgit. Belum lagi saat dia diminta menggambar bendera merah putih. Bentuk dan kombinasi warna merah putihnya sangat kacau, kecuali gambar yang dibuat oleh Salina, sang adik. Lebih mengagetkan lagi saat

lagu “Kolam Susu” yang dipopulerkan oleh Koes Plus, dianggapnya seperti lagu kebangsaan Indonesia.

Tanpa bekal teori dan definisi mengenai negarawan dalam buku-buku tebal atau ceramah panjang, jalan hidup menggariskan Salman dan teman-temannya layak menjadi inspirator keteladanan bagi bangsa ini. Benarlah adanya jika seorang negarawan tidak harus melulu lahir dalam ruang-ruang publik. Duduk, berdasi, bersahaja tanpa benar-benar meresap setiap lelap cinta mereka pada negeri yang disebutkan Indonesia.

Menjadi Presiden (Katanya)

“Pak, tanah kita tanah surga, ya?”

“Maksudnya itu negeri kita ini tanahnya subur, alamnya kaya raya.”

“Tapi, kenapa Ayah saya pindah ke Malaysia?”

“Ya mungkin di sana dia hidupnya lebih senang, lebih sejahtera.”

“Kalau begitu, tanah kita bukan tanah surga, Pak.”

“Begini Salman, wilayah Indonesia itu *kan* luas sekali, ya. Kamu *gak* cukup satu hari *pake* perahu buat keliling Indonesia. Jadi, butuh waktu lama, butuh kerja keras supaya bisa mengolah alam ini semuanya, supaya semua rakyatnya sejahtera. Sudah kamu tidak usah pikirkan itu, kamu belajar saja yang rajin supaya pintar. Nanti kamu bisa jadi pemimpin, baru kamu sejahterakan semua rakyat. Makanya ulangan jangan nilai nol.”

“Tadi saya dapat nilai empat, Pak.”

“Nah, bagus. Itu tandanya kamu bisa jadi pemimpin.”

“Jadi presiden?”

“Bisa.”

“Kalau si Linda yang dapat nilai satu?”

“Dia itu bisa... kamu angkat jadi menteri.”

“Kalau si Lizet dan teman-teman jadi apa?”

“Waduh, kalau Lizet dan teman-teman yang dapat nilai nol... hmm jadi rakyat yang harus kamu sejahterakan nantinya.”

Percakapan antara Salman dan Dokter Intel tersebut mengingatkan kita semuanya untuk bekerja keras mengolah alam Indonesia dari Pulau We sampai kota Merauke. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah gerakan yang dipelopori salah seorang menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Gerakannya bernama “Kerja, kerja, kerja demi Indonesia”. Kerja keras tanpa batas. Ketika rasa cinta itu benar bekerja maka hanya satu yang menjadi pembuktiannya, yakni persembahan terbaik bagi Indonesia tanpa pernah memperdebatkan untung dan rugi.

Ada hal patut dibahas terkait penjelasan Dokter Intel tentang angka empat untuk presiden, satu untuk menteri, dan nol untuk rakyat. Bisa jadi itu adalah angka yang benar-benar menjadi realitas penilaian mengenai kedudukan presiden, menteri, rakyat serta peran dan fungsinya dalam jajaran pemerintahan di Indonesia. Ironi. Rakyat bernilai nol, padahal pemimpin dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat bernilai nol dan presiden bernilai empat, Indonesia bisa berharap apa pada nilai-nilai tersebut? Sementara tantangan era globalisasi pada 10-20 tahun terus membayang. Tantangan kawasan pasar bebas, cadangan kekayaan

alam yang semakin tipis, semuanya menuntut pengelolaan yang terintegrasi dengan baik dan matang. Butuh kerja sama antara pemimpin dan rakyat.

Ketika Dokter Intel berpesan kepada Salman untuk rajin belajar supaya pintar dan bisa menjadi pemimpin, secara tidak langsung nasihat tersebut berlaku untuk semua generasi muda Indonesia. Kesiapan adalah hal yang harus selalu dipegang teguh oleh generasi Indonesia di mana pun dia terdidik dan lahir. Betapa sekolah menjadi suatu pekerjaan yang paling mudah dan menyenangkan di dunia ini. Sebab, ilmu menjadi bekal bagi seorang pemimpin untuk kapan pun siap menggiring rakyat masuk ke dalam pintu gerbang kemerdekaan yang sesungguhnya. Dengan ilmu, pemimpin-pemimpin dengan pribadi unggul akan lahir menghiasi panggung pemerintahan Indonesia.

Estafet Kenegarawan

Erie Sudewo pernah menuliskan, “Shalat dapat diwariskan, namun khuyuk tidak dapat diwariskan.” Mengambil analogi ini, berlaku sama dalam kenegarawan. Kekuasaan itu dengan mudah diwariskan, tetapi tidak dengan kenegarawan.

Ada jabatan publik yang didapat dengan bantuan orangtua ataupun keluarga, sekalipun itu ditempuh melalui proses demokrasi. Pengamat politik menyebutnya “dinasti politik”. Kekuasaan dimiliki dan seakan diwarisi oleh sebuah klan keluarga yang berpengaruh di tempat tersebut. Sayangnya, yang diwarisi sekadar jabatan, tapi tidak dengan kualitas kepemimpinannya.

Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa seorang negarawan tidak perlu lahir dari orang-orang yang dulunya berjasa pada negeri ini. Bisa jadi dia lahir dari keluarga sederhana, tapi terdidik tangguh dan mau bekerja keras demi sebuah misi: menjejahterakan Indonesia.

Kaderisasi menjadi solusi dalam melestarikan seorang negarawan. Tujuan kaderisasi kenegarawanan ini bukanlah dalam kerangka melanggengkan kekuasaan sebagaimana lazim ditempuh para politisi yang tengah berkuasa. Kaderisasi di sini merupakan proses mentransfer nilai sekaligus mengawalinya agar berjalan sesuai koridor kenegarawanan. Tidak harus dari jalur partai politik, melalui pendidikan-pendidikan cinta alam, kepanduan, dan olahraga pun bisa menjadi mediasi tertanamnya nilai-nilai kebangsaan dan pembentukan seorang pemimpin yang paripurna. []

Meyrizka Dwinanda

Pemimpin dengan Tiga Karakter Utama



Menjadi pemimpin yang diteladani merupakan tonggak sukses memimpin segala hal. Pemimpin yang mampu memberikan teladan yang baik, maka dia akan menjadi seorang pemimpin sejati. Dia tidak mengumbar kata-kata yang dirangkai menjadi janji indah untuk selalu diucapkan, tetapi cukup melakukan tindakan nyata.

Menjadi seorang pemimpin selain memberikan contoh dan teladan yang baik, juga memainkan diri sebagai pihak yang mau mendengarkan. Bersedia menjadi pendengar atas setiap masukan bawahannya. Bila ada yang mengkritiknya, justru seorang pemimpin harus bersyukur. Bukan mencari-cari kesalahan orang yang mengkritiknya.

Kritik memang kerap menyakitkan. Tapi, dari kritikhlah lahir energi kreativitas. Sebuah gagasan brilian akan hadir melalui masukan pihak lain. Hakikatnya seorang pemimpin negarawan terlahir bukan untuk besar oleh dirinya semata. Ada pengaruh dan inspirasi pihak lain. Kekuatan kerja sama itu pada akhirnya yang membingkai kepemimpinannya menjadi pantas disebut negarawan.

Memainkan peran kenegarawanan tidak melulu diperbuat para pemegang jabatan tertinggi. Kemampuan melihat kepentingan bersama lalu berandil di dalamnya merupakan kapasitas calon negarawan. Kita bisa membuka lembaran sejarah yang menerakan nama Salman al-Farisi. Salman adalah sahabat Nabi Muhammad yang menjadi aktor penting dalam Perang Khandaq. Kepintaran dan kecerdasannya membuat Muhammad dan para sahabatnya kagum.

Perjalanan panjang Salman bersama Nabi Muhammad memberikan banyak pelajaran. Kepribadian luhur terukir dalam jiwanya: bijaksana dalam memimpin, sederhana dalam hidup, dan cerdas dalam berpikir. Ketiga karakter ini menghiiasi kepribadian Salman semasa hidupnya.

Bijaksana dalam Memimpin

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bijaksana bermakna “selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya); arif; tajam pikiran; pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dan sebagainya) apabila menghadapi kesulitan.” Jadi, orang yang bijaksana biasanya sebelum bertindak disertai dengan pemikiran yang cukup matang sehingga tindakan yang dihasilkan tidak menyimpang. Si bijak tahu tindakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak.

Kebijaksanaan berkaitan erat dengan kecerdasan dan penekanan hawa nafsu atau keinginan. Contohnya saja dalam mengelola keuangan. Orang yang bijaksana bisa membedakan mana yang menjadi prioritas utama dan mana yang tidak terlalu penting dilakukan.

Saat ditunjuk menjadi gubernur Madain, Salman al-Farisi dikenal dengan sosok yang bijaksana dan sangat sederhana. Sebuah riwayat pernah menyebutkan bahwa ketika berkuasa, tidak ada yang berubah dalam diri Salman. Dia tetap terlihat seperti biasanya, seperti masih jadi rakyat biasa. Tidak aneh bila pakaian yang dikenakannya tidak mencerminkan Salman seorang penguasa. Dia juga menolak untuk menerima gaji dan memilih untuk memberikannya kepada rakyat. Ia lebih memilih makan dari hasil tangannya sendiri.

Ada satu pelajaran berharga untuk kita ketika Salman ditanya seseorang. Orang itu bertanya mengapa Salman seolah membenci kedudukan. “Kedudukan itu,” jawab Salman, “senang untuk didapatkan, akan tetapi sulit untuk dilepaskan. Itulah yang aku khawatirkan.”

Ternyata kekhawatiran Salman itu terbukti pada saat sekarang ini. Kita bisa melihat sikap para pemimpin saat menduduki jabatannya. Tidak hanya ingin berlama-lama, tapi juga mengambil keuntungan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Kita pernah memiliki presiden yang menggelari dirinya presiden seumur hidup. Kita juga pernah merasakan dampak dari presiden yang kerasan di kursinya hingga 32 tahun sebelum akhirnya rakyat memintanya turun secara paksa.

Hari ini, banyak penguasa di daerah-daerah yang tidak ingin jabatannya berpindah tangan. Kalaupun sudah selesai batas maksimal menjabat sebagai penguasa, dia mengkalinya dengan mendorong keluarganya sebagai pelanjut.

Sederhana dalam Hidup

Sederhana adalah suatu prinsip yang menjadi sikap dasar dalam berkepribadian. Penampilan sederhana saja belum menjamin kepribadian seseorang sederhana. Lain halnya jika kepribadian sederhana sudah ada lebih dulu, penampilan luar otomatis mengikuti.

Di atas sudah disinggung bahwa Salman lebih menyukai pakaian sederhana ketimbang bermewah-mewahan. Padahal, kunci untuk mempergagah diri ada di tangannya. Tapi, dia memilih tetap bersahaja kendati sudah menjadi penguasa.

Demikian pula dalam kepemilikan rumah. Salman hanya memiliki rumah tak melebihi ukuran kamar kos mahasiswa sekarang. Rumahnya itu sebenarnya tidak layak disebut rumah orang penting. Rumahnya sekadar untuk melindunginya dari panas terik matahari dan menyelimutinya dari dinginnya malam. Saat ini adakah rumah para pemimpin setipe dengan rumah Salman al-Farisi?

Cerdas dalam Berpikir

Soal kecerdasan, Salman tidak diragukan lagi. Salah satunya adalah idenya yang cemerlang ketika ia mengusulkan penggalian parit pada Perang Khandaq sehingga berujung pada kemenangan pasukan Islam. Selain kesederhanaannya, di hati para sahabatnya Salman juga ditempatkan pada posisi yang istimewa. Dia diberi kemampuan untuk menguasai pengetahuan sehingga dirinya diibaratkan lautan yang tak pernah kering.

Dalam sebuah riwayat pernah dikisahkan bahwa Salman menasihati sahabatnya yang bernama Abu Darda. Mengetahui sahabatnya itu selalu menghabiskan waktu istirahat malamnya

dengan mendirikan shalat dan mengisi siangya dengan berpuasa sehingga mengabaikan hak sang istri, Salman menegur dengan bijak. “Sesungguhnya matamu itu punya hak, keluargamu juga punya hak atasmu, puasalah tapi sesekali berbukalah, shalatlah, tapi juga tidurlah,” ujar Salman.

Pengaduan Abu Darda kepada Nabi Muhammad justru memunculkan dukungan Sang Nabi. “Sungguh,” sabda beliau, “Salman diberikan banyak ilmu pengetahuan.” Dengan kecerdasan dan ilmu yang dilihatnya. Nabi Muhamad pun memilih Salman sebagai seorang gubernur.

Kecerdasan pemimpin di negara kita memang terlalu jauh untuk dibandingkan dengan Salman. Ada kehadiran seorang nabi yang membimbingnya. Berbeda dengan kondisi sekarang. Tiadanya sosok nabi tidak berarti faktor kecerdasan boleh dihilangkan sebagai syarat memimpin. Ada yang bilang bahwa orang cerdas adalah orang yang tahu bagaimana cara untuk memanfaatkan sumber daya atau sesuatu itu dengan maksimal. Definisi ini masih koma karena untuk memanfaatkan sumber daya itu haruslah dilakukan secara tepat dan tidak melanggar hukum. Bukankah banyak penguasa atau pemimpin di tengah kita yang mengatasnamakan pemanfaatan sumber daya alam justru malah berujung menggadaikannya kepada kekuatan modal asing? Pemimpin semacam ini tentu saja bukan tergo-long cerdas walaupun dia bertitel doktor.

Salman ala Indonesia

Kehidupan Salman al-Farisi semestinya membukakan mata kita untuk memilih pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya. Kebijakan pemimpin dapat menentukan nasib rakyat, kesederhanaan pemimpin akan mengubah watak rak-

yat untuk bahu-membahu menjadikan semua rakyat hidup sejahtera. Begitu pula dengan kecerdasan pemimpin.

Seorang pemimpin harus menjadi contoh dan panutan bagi semua orang yang dipimpinya. Memiliki komitmen yang jelas dan sepenuh hati untuk membantu para rakyatnya. Keteladanan sangat kita butuhkan sekarang di semua sisi kehidupan, baik berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat, umat, negara, dan bangsa.

Keteladanan memang kita dambakan. Namun, ini tidak berarti kita harus menunggu lahirnya tokoh yang patut diteladani lebih dulu. Setiap kita sejatinya seorang pemimpin. Maka, kita pun bisa menjadi pemimpin yang diidamkan itu; pemimpin yang mampu memberikan keteladanan. Untuk mewujudkannya, kita bisa memulai dari pribadi kita sendiri saat ini juga. Tak perlu mencari-cari kesalahan orang lain karena sesungguhnya pribadi kitalah yang masih banyak kekurangannya dalam memimpin, terutama memimpin diri kita sendiri. Memimpin diri sendiri pun bukan tanpa pertanggungjawaban di akhirat kelak. Untuk itulah, keteladanan seorang pemimpin harus ada dalam diri kita masing-masing, baik selaku yang dipimpin, lebih-lebih bila kita menjadi pemimpin rakyat. []

Rifqi Abdillah

Pelajaran Habibie tentang Presiden Negarawan



Ousantara patut berbangga. Dahulu negeri ini pernah dipersatukan oleh kerajaan besar bernama Majapahit. Dari ujung Sumatera hingga Papua, bahkan negeri yang saat ini kita kenal dengan Malaysia dan Singapura, berada di bawah naungan Majapahit. Sebelum era Majapahit, Sriwijaya juga melakukan hal serupa, membangun kemegahan Nusantara hingga dikenal ke mancanegara.

Namun, kebanggaan masa lalu tetap tinggallah sejarah. Konteks bersatunya Nusantara pada era Majapahit berbeda dengan sekarang. Penyatuan Nusantara saat itu barulah sebatas pengaku dari kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan Majapahit terutama melalui mahapatihnya, Gajah Mada. Selepas sebuah kerajaan mengakui kedudukan Majapahit, nyaris tidak ada pembangunan yang dilakukan. Peningkatan kemakmuran hanya ada di sekitar lingkungan pusat kekuasaan Majapahit.

Saat ini secara administratif, Nusantara yang kini menjadi Indonesia juga sudah jelas peta wilayahnya. Suku-suku bangsa yang tidak lagi berbajukan kerajaan bersatu dalam wadah negara kesatuan berbentuk republik. Di ujung barat ada Pulau Sabang sebagai pulau terluar, di ujung timur ada Merauke. Di

ujung utara Pulau Miangas dan di selatan ada Pulau Rote. Sejak awal merdeka hingga pemerintahan saat ini, Indonesia secara *de jure* masihlah bersatu. Kasus lepasnya Timor Timur satu perkecualian.

Namun, membangun negeri dengan puluhan ribu pulau bukanlah perkara mudah. Tugas menyatukan negeri tidak sekadar memastikan bahwa sebuah pulau sudah resmi masuk ke dalam wilayah negara, namun juga memastikan bahwa penduduk di pulau tersebut telah menikmati hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka sebagai warga negara. Di sinilah tugas terberat seorang pemimpin negara bernama Indonesia.

Kita patut bersyukur pernah memiliki pemimpin seperti Soekarno, yang lantang berteriak menolak setiap bentuk imperialisme di Indonesia. Bukan hanya imperialisme politik, tapi juga perekonomian. Kita juga pernah memiliki pemimpin bangsa bernama Soeharto, yang bertekad memajukan Indonesia dengan bertumpukan pada perekonomian ketimbang politik aliran. Indonesia dicitakan menjadi negara yang makmur dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya.

Bersyukur pula kita pernah dipimpin seorang profesional dalam bidang teknologi dirgantara bernama Bacharuddin Jusuf Habibie. Meski kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia hanya 1 tahun 5 bulan, banyak pelajaran yang bisa dipetik.

Jauh-jauh hari sebelum memimpin negeri ini, Habibie meninggalkan pelajaran berharga yang patut diteladani. Jejak-jejak itulah yang menjadi benih penting lahirnya seorang pemimpin. Bahwa kepemimpinan Habibie hanya berlangsung singkat, penyebabnya bukan karena kegagalan atau ketidakmampuannya mengelola negeri ini. Murni yang terjadi ada-

lah proses politik. Ke depan, menolak anak bangsa yang punya potensi gemilang hanya karena kepentingan politik—sebagaimana Habibie alami—tidak boleh lagi terjadi.

Belajar dari Habibie

Pelajaran pertama dari kenegarawanan Habibie tampak ketika dia diminta kembali ke tanah air. Jabatan sebagai *Vice President* di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, ditinggalkan begitu saja. Dia memilih untuk fokus membangun industri teknologi tinggi negaranya.

Seorang negarawan, di mana pun dia berada, adalah orang yang selalu ingat akan tanah kelahirannya. Ada panggilan di dalam hati yang harus di penuhi manakala negara membutuhkan kontribusinya. Hari ini, ketika banyak mata dibuat silau oleh gemerlap kemegahan negara lain, diperlukan sosok pemimpin Indonesia yang mau memajukan negerinya. Dia adalah figur yang sadar bahwa masih banyak potensi di negeri ini yang harus dikembangkan.

Pelajaran kedua dari Habibie, kita juga belajar ide-ide baru. Banyak pihak yang mencerca gagasan Habibie tentang teknologi. Saat itu Habibie membandingkan harga produk industri tinggi dengan hasil pertanian. Dia menunjukkan bahwa harga 1 kg pesawat terbang sebesar USD 30.000, sedangkan dan 1 kg beras sebesar 7 sen (USD 0,07). Jadi, kalau kita ingin membeli 1 kg pesawat terbang, hampir setara dengan 450 ton beras.

Habibie tentu tidak berniat menyepelkan kedudukan beras sebagai makanan pokok bangsa Indonesia. Yang kurang ditangkap dari para pengkritik gagasannya adalah mengenai

visi Habibie tentang Indonesia masa depan yang bersumberkan ilmu pengetahuan. Negara kepulauan yang begitu luas membutuhkan transportasi cepat, dalam hal ini pesawat terbang.

Hari ini, gagasan Habibie terbukti manakala moda udara semakin merajai dalam arus lalu lintas banyak sektor hidup. Sayangnya, pesawat-pesawat yang melintasi udara Indonesia, walaupun dimiliki maskapai dalam negeri, diproduksi oleh perusahaan asing. Kita kadang menyepelkan gagasan futuristik Habibie, sampai-sampai perusahaan negara yang mengurus soal pesawat pun dikerdilkan.

Seorang presiden negarawan harus mempunyai ciri khas berupa prinsip dan keyakinan yang kuat dalam membangun Indonesia masa depan dengan senjata pamungkas yang dia kuasai dan punya. Prestasinya dalam pembuatan pesawat N-250 menjadi bukti bahwa dia tidak hanya mampu di tataran konsep, tapi juga teknis.

Habibie mengajarkan kepada kita bahwa idenya untuk mengembangkan teknologi industri tinggi dalam membangun Indonesia sebenarnya bukan isapan jempol. Sayangnya, euforia Reformasi mengabaikan para politisi untuk berpikir ke depan. Habibie ditolak, idenya juga dilabrak. Padahal, boleh jadi ketika ide Habibie diterapkan hingga kini, masyarakat di Papua saat ini tidak perlu membeli bensin dan sembako dengan harga ber-puluh kali lipat lebih tinggi demi mengganti biaya operasional pesawat yang masih tinggi. Bisa jadi, ketika ide Habibie dilaksanakan, biaya pengangkutan produk pertanian akan lebih murah, cepat, dan mudah sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati hasilnya.

Pelajaran ketiga dari Habibie adalah sifatnya yang tidak ambisius bila menyangkut kekuasaan. Posisi presiden bagi seorang negarawan hanyalah salah satu posisi untuk bisa melayani rakyat. Ditolak para politisi dan kelompok yang antipati kepadanya, Habibie tidak memaksakan kehendak untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pemilihan Umum 1999. Dia memilih berkontribusi dengan profesi yang pengetahuannya yang dimilikinya. Tetap dengan visi dan misinya membangun Indonesia.

Berbicara presiden negarawan, tidak hanya tentang kontribusi saat masih menjabat, tetapi juga kontribusi sebelum dan sesudah menjabat. Presiden adalah posisi tepat untuk melihat kondisi Indonesia secara luas dan komprehensif. Ibarat di mercusuar, saat menjadi presiden seperti berada di puncak mercusuar. Momen ini seharusnya dimanfaatkan untuk memikirkan tindak lanjut pengabdian setelah dia selesai menjabat.

Menanti Presiden Negarawan

Pesta demokrasi bernama pemilihan presiden sebenarnya diharapkan sebagai cara menyeleksi sosok pemimpin sejati, alias pemimpin negarawan. Bukan sosok yang hanya ingin berkuasa lantas setelah itu memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Sayangnya, dalam tiap pesta demokrasi lima tahunan, bayangan pesimisme hadirnya sosok negarawan sejati masih begitu besar. Nama-nama yang berambisi menjadi presiden belum mencerminkan sosok pemimpin, apalagi negarawan.

Sejatinya jika berbicara presiden negarawan, kita juga sedang membicarakan proses. Proses menjadi seorang pemimpin itu sendiri tidaklah sebentar. Butuh waktu 10, 20, atau 30 tahun

lagi mungkin. Bibit-bibit itu bisa jadi masih berada di bangku sekolah saat ini. Dididik oleh guru-guru terbaik, yang selalu memberikan teladan dan contoh bijaksana. Diasuh oleh orangtua yang selalu menanamkan nilai agama dan moral. Ditempa oleh amanah-amanah yang membuatnya semakin jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan ikhlas. Sosok presiden negarawan itu bisa jadi masih harus menyelesaikan kuliahnya saat ini. Di tengah berbagai macam godaan dunia, harta, tahta, maupun lawan jenis.

Poin penting dari proses melahirkan presiden negarawan ini adalah bukan terletak pada mencari siapa dia. Bukan itu. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita, sebagai elemen bangsa yang masih peduli dengan nasib bangsa ini, selalu mengawal dan memastikan anak-anak bangsa ini terus mendapatkan pendidikan terbaiknya. Presiden negarawan 2020, 2030, dan seterusnya hanyalah salah satu posisi saja. Hanya satu unsur dan peran dalam membangun Indonesia ke depan.

Masih banyak posisi lainnya yang membutuhkan sifat ke-negarawanan. Dari mulai menteri, anggota DPR, hakim, jaksa, polisi, TNI, jurnalis, dokter, pedagang, bahkan tukang sapu sekalipun. Semua harus merasakan bahwa menyatukan Nusantara juga butuh peran semua pihak. Semua harus menyadari bahwa untuk membangun Indonesia ini dibutuhkan sifat ke-negarawanan. Sifat yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan baik, Habiebie pernah memainkan peranan ini.

Indonesia ke depan pada hakikatnya tidak hanya membutuhkan presiden untuk membuatnya bersatu. Tetapi sebuah tim

besar, di mana orang-orang di dalamnya punya sifat kenegawanan yang agung. Di tangan merekalah, Indonesia yang adil dan sejahtera akan terwujud. Semoga. []

Wildan Ghiffary

Beda Singapura dan Indonesia



Banyak yang bilang Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi alamnya dengan tepat. Kalimat ini sudah saya dengar sejak duduk di bangku sekolah dasar. Sampai hari ini pula, dosen saya pun masih mengulang kalimat yang sama itu. Artinya, tidak kurang dari sepuluh tahun negara kita masih jalan di tempat. Atau jangan-jangan malah berjalan mundur.

Sekarang mari kita bandingkan dengan Singapura. Negara ini tidak memiliki *natural resources* namun berhasil menyejajarkan diri dengan negara maju. Yang diperbuat Singapura adalah menggunakan potensi manusia untuk memajukan negara. Apakah manusia Singapura lebih hebat daripada Indonesia? Nanti dulu untuk berkesimpulan.

Bila dipikir-pikir, Indonesia sebenarnya kekurangan apa? Kita punya semua sumber alam terbaik dunia, potensi manusia di Indonesia juga besar. Dalam setahun, untuk satu kampus semisal di Universitas Padjajaran saja menerima 8000 mahasiswa baru dan meluluskan setidaknya 12.000 mahasiswa strata satu dan diploma. Pertanyaannya, ke mana perginya mereka setelah tidak lagi berjas almamater Unpad? Ini baru satu kam-

pus. Jadi apa mereka sekarang? Ke mana perginya spirit teriakan “hidup mahasiswa” saat sudah melebur dengan masyarakat? Bukankah mahasiswa (katanya) agen perubahan? Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini saja, sudah berapa alumni yang dihasilkan? Berapa banyak skripsi yang bisa menjadi solusi permasalahan negeri ini yang dihasilkan (mudah-mudahan tidak berakhir di gudang kampus)?

Menarik untuk menelisik Singapura, negara yang dengan lahan terbatas seakan tak pernah berhenti tumbuh. Negara yang konsep awalnya “taman kota”, tapi sekarang berkembang menjadi “kota dalam taman”. Negara ini menjadi negara maju tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga mutu. Yang menarik adalah negara ini dibangun tahun 1959 dengan kondisi menegenaskan. Awalnya negara itu berisikan para nelayan Indonesia dan Malaysia sehingga mereka sering dipandang sebelah mata oleh negara lain kala itu. Maklum saja, Singapura tidak punya apa-apa.

Di situlah menariknya. Dengan ketidakpunyaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terbatas, Singapura di kemudian hari lebih berkembang bahkan lebih maju daripada Indonesia. Ini bukti bahwa kemajuan suatu negara tidak hanya tergantung dari seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga dengan memajukan potensi sumber daya manusianya. Singapura dikenal memiliki disiplin tinggi sehingga dijuluki sebagai kota denda (*fine city*). Aturan tidak hanya menjadi hukum belaka, tapi sudah menjadi *value* bahwa disiplin dan profesionalitas adalah dua hal yang tak terpisahkan dari Singapura. Penegakan aturan semacam inilah yang amat susah diterapkan di tanah air kita.

Optimis berubah! Inilah tugas kita sebagai pemuda Indonesia walau tampak jalan masih panjang dan terjal. Tak dimungkiri di dunia Internasional sedikitnya ada dua hal yang menggambarkan Indonesia di mata dunia. Pertama, pengalaman saya ketika mengikuti Greifswald International Students Festival di Jerman pada 2012. Dalam even ini, semua delegasi menampilkan budaya masing-masing dalam sesi *Cultural Performance*. Delegasi Indonesia yang berjumlah sembilan orang memilih berbusana batik.

Yang menarik, saat kami semua baru saja menginjakkan kaki di panggung, delegasi dari negara lain berteriak. “Poco! Poco! Poco! Poco!” Mereka adalah delegasi Amerika Serikat, Jerman, Italia, Rusia, Belarus, dan negara-negara Afrika, serta Micronesia. Meskipun mereka banyak di antara mereka belum tahu negara kita, mereka tahu tentang poco-poco—selain juga batik tentunya. Sungguh bangga menjadi bagian dari Indonesia yang budayanya dikenal dunia dari negara besar hingga negara terpencil.

Pengalaman kedua, dialami teman saya saat mengikuti AEON Student Exchange pada November 2012. Saat sesi *workshop*, teman saya duduk di barisan paling depan karena memang antusias mengikuti program tersebut. Tepat duduk di belakangnya adalah delegasi Jepang. Setengah jam *workshop* berjalan, datang delegasi Thailand. Dia duduk tepat di sebelah delegasi Jepang. “*Do you come from Indonesia?*” Tanya si Jepang dengan bahasa Inggris terbata-bata. Delegasi Thailand sontak menggelengkan kepala seraya berkata, “*I come from Thailand.*” Tidak ada masalah dengan kedua delegasi itu walau mungkin si Thailand merasa malu. Lain halnya dengan teman saya

di depan keduanya. Dia menahan amarah begitu mendengar percakapan singkat itu. Apakah setiap yang terlambat itu pasti manusia Indonesia? Sayangnya, kebiasaan kita di sini itu sudah telanjur dikenal di mancanegara.

Dalam kreativitas budaya kita boleh berbangga bisa dikenal luas. Tapi nanti dulu soal kedisiplinan karena kita juga dikenal sebagai bangsa *ngaret*. Padahal, dengan disiplin Singapura mengubah wajah negaranya. Sebaliknya, dengan ketidakdisiplinan pula kita seperti terpuruk.

Tentu dalam benak setiap warga Indonesia menginginkan negara ini tidak lagi dihina dengan predikat buruk seperti dalam kasus ketidakdisiplinan. Boleh saja banyak kalangan pesimis Indonesia mampu bangkit mengejar ketertinggalannya dari Singapura. Entah mengapa pesimisme itu selalu hadir meskipun prestasi putra-putri Indonesia di kancah internasional tidak terbilang sedikit bahkan terkadang melampaui capaian Singapura dalam satu kesempatan even Olimpiade Sains.

Lagi-lagi kalau mau tunjuk jari, manusia Indonesianyalah yang memurukkan capaian positif yang ada. Olimpiade Sains berhasil digenggam, tapi inovasi teknologi bangsanya kurang digarap serius. Keberpihakan pemerintah tidak begitu jelas, baru sebatas wacana dan rencana. Tidak heran bila setelah era Habibie lewat N-250, tidak ada inovasi yang sungguh-sungguh selain gegap gempita kontroversi mobil Esemka!

Padahal, Indonesia kurang apa? Kita punya sumber daya alam terbaik dunia, kita punya kampus yang menghasilkan lulusan berkualitas setiap tahunnya. Singapura maju hanya dibangun melalui mulut dan otak, sedangkan kita punya yang

mereka tidak punya. Lantas, kenapa kita masih menjadi negara tertinggal dari mereka?

Kemajuan bangsa memang terletak di pundak makhluk yang Anda lihat di cermin. Ya, diri kita sendiri. Terlebih bila kita diberikan kenikmatan berupa kesempatan menjadi mahasiswa. Sudah lama panggilan Bumi Pertiwi menanti sahutan kita. Sahutan untuk berbuat bagi sesama dengan masing-masing profesi dan minat yang dijalannya. Tegasnya, menjadi negarawan dalam kepemimpinan diri. []

Maya Puspita Sari

Pelajaran “Patch” Adams untuk Negarawan



Banyak terdapat kasus malpraktik dalam dunia kedokteran. Kasus yang paling sering adalah kasus yang menyangkut buruknya hubungan antara dokter dan pasien. Kasus Prita Mulyasari yang pernah mencuat di media massa salah satu di antaranya.

Prita awalnya didiagnosis demam berdarah berdasarkan hasil laboratorium. Keesokan harinya hasil laboratorium tersebut direvisi. Namun, dokter yang menangani belum menyampaikan diagnosis serta penatalaksanaan lanjut mengenai penyakit Prita. Karena merasa dirugikan dan tidak puas dengan pelayanan rumah sakit tersebut, Prita pindah ke rumah sakit lain. Di rumah sakit lain, Prita didiagnosis dengan penyakit gondongan, suatu penyakit yang menular disebabkan oleh virus. Penyakit ini mempunyai penatalaksanaan yang berbeda dengan demam berdarah. Dari sini awal Prita mengadukan rumah sakit pertama yang mendiagnosisnya terkena demam berdarah.

Dari kasus di atas, kita dapat mengambil pelajaran berharga tentang pentingnya komunikasi antara dokter dan pasien. Komunikasi merupakan suatu yang mutlak dilakukan oleh dokter terhadap pasien guna membangun rapor yang baik.

Sehingga, nantinya bisa didapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai pasien tersebut untuk menegakkan suatu diagnosis dan terapi yang tepat.

Kasus Prita merupakan contoh buruknya komunikasi yang terjadi antara seorang dokter dan pasien. Agar tidak berulang kasus serupa, tidak ada salahnya bila para dokter menimba pengalaman Hunter "Patch" Adams.

Adams adalah seorang dokter sekaligus aktivis sosial di Amerika Serikat. Adams berbeda dengan umumnya para dokter di sana ketika itu. Adams menganggap pengobatan harusnya mencakup dua sisi, yakni jasmaniah dan rohaniah, serta melihat bahwa humor atau keramahan merupakan obat terbaik untuk kesehatan. Adams konsisten menjalankan gagasannya itu, yakni mengobati pasien dengan cara yang unik: menghibur, bercanda, bermain-main dengan pasien hingga pasien tersebut melupakan kesedihan mereka. Tidak jarang dia pun berperan menjadi badut di hadapan pasien.

Banyak pasien yang menyukai Adams karena sikapnya yang ramah dan memahami kondisi pasien. Adams juga pandai mengambil hati pasien karena dia tidak pernah memandang pasien berdasarkan usia.

Akan tetapi, metode dan cara berpikir Adams ditentang oleh para dokter dan profesor sekolah kedokteran. Adams tetap maju terus, tidak peduli dengan kecaman atau gugatan dari kolega dunia medis. Menurutnya, seorang dokter tidak hanya perlu mengobati penyakit pasien, namun juga membantu pasien untuk memiliki hidup yang lebih berkualitas.

Komunikasi Pemimpin

Adams memberikan banyak pelajaran berharga yang patut kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni lewat komunikasi. Komunikasi yang baik, akan menunjang pendekatan emosional yang baik pula. Bila dikaitkan dengan dunia kesehatan, Adams mampu memberikan komunikasi terapeutic yang baik, yakni komunikasi antara dokter dan pasien yang bisa menunjang kesembuhan pasien tersebut. Adams mampu mensinergikan antara perkataan yang diucapkan, perbuatan yang dipraktikkan, dan ekspresi yang memfasilitasi proses penyembuhan.

Persoalan komunikasi yang menyentuh sebenarnya tidak hanya harus dimiliki para dokter. Secara tidak langsung Adams sebenarnya mengajarkan kita sebagai calon pemimpin bangsa untuk senantiasa bersosialisasi dengan orang lain. Bergaul dengan banyak orang tanpa memandang kaya atau miskin, usia, suku bangsa, agama, dan saling membantu untuk mewujudkan impian dan cita-cita mereka selaku anak bangsa.

Jika dihubungkan dengan apa yang terjadi pada pemimpin Indonesia saat ini, kita akan mendapati banyak pemimpin yang miskin komunikasi dengan rakyat. Padahal, komunikasi merupakan hal penting dalam kepemimpinan. Rakyat Indonesia mengalami kesulitan dalam mengungkapkan tuntutan-tuntutan yang diinginkannya kepada sang pemimpin. Akibatnya, tuntutan aspirasi ditempuh dengan cara-cara anarkis. Di pihak pemimpin sendiri, mereka malah tidak memedulikan aksi-aksi rakyat itu sekalipun dilakukan dengan penuh kekerasan.

Selain memiliki wawasan yang luas, jujur, bertanggung jawab, dan berani dalam mengambil keputusan, seorang pe-

mimpin juga harus mempunyai keahlian berkomunikasi yang baik. Karena komunikasi dapat menentukan berhasil atau tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Setiap pemimpin pasti memiliki bawahan. Bawahannya tersebut akan mengeluarkan gagasan yang berguna sebagai referensi pemimpin dalam mengambil keputusan. Bisa dibayangkan bila kemampuan berkomunikasi pemimpin buruk, ide-ide brilian bawahan tersebut tidak terpahami dengan baik, yang pada akhirnya bisa menurunkan kualitas putusannya.

Seorang pemimpin, terlebih lagi sosok presiden negarawan, sudah semestinya menguasai kemampuan berkomunikasi sebagaimana dicontohkan Hunter "Patch" Adams. Dan bagi kita, yang juga masing-masing merupakan calon pemimpin, kenejarawan itu bisa dijalankan dengan memerhatikan kualitas komunikasi, apa pun pilihan profesi dan kedudukan kita. []

Ali Abdillah

Mengubah Pribadi Kecewa Menjadi Negarawan



Merujuk pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan berdirinya negara kita ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Tujuan negara Indonesia secara umum memiliki benang merah yang dapat ditarik dari keempatnya. Benang merah tersebut adalah negeri ini harus dikelola oleh orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri ataupun golongannya. Bukan masalah bila pengelola ini terdiri dari berbagai golongan karena memang itulah fitrahnya negara Indonesia. Apabila mementingkan dirinya sendiri ataupun golongan, maka kecenderungan—bahkan hampir pasti—memperkaya diri sendiri dan golongan semakin besar. Itulah yang sekarang terjadi di negeri ini.

Seharusnya paradigma yang dibangun adalah seberapa banyak yang bisa kita lakukan untuk negara ini. John F. Kennedy memopulerkan ucapan menarik, “Jangan tanyakan apa yang negerimu telah lakukan untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa

kaulakukan untuk negerimu.” Ucapan ini bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Menjadi benar apabila dihayati oleh seluruh warga negara dan juga termasuk penyelenggara negara, dan menjadikannya sebagai semangat berkontribusi untuk negara dan masyarakat. Akan tetapi, ucapan tersebut akan menjadi salah apabila digunakan oleh penyelenggara negara sebagai tameng agar masyarakat tidak usah memerhatikan kinerja penyelenggara negara.

Fakta yang kita saksikan saat ini, betapa banyak penyelenggara negara yang meruntuhkan kepercayaan yang telah diberikan rakyat kepada mereka. Kekecewaan itu muncul bukan tanpa alasan. Berita tertangkapnya para penyelenggara negara dalam kasus korupsi—baik di eksekutif, legislatif, dan bahkan di ranah yudikatif—berseliweran di hadapan publik. Bukan tidak mungkin, ucapan yang dipopulerkan oleh John F. Kennedy dibantah dan diubah menjadi, “Jangan tanyakan apa yang telah saya berikan ke negara ini, tapi apa yang telah penyelenggara negara ini berikan untuk rakyatnya.” Kondisi ini sungguh amat mengkhawatirkan. Negara ini sedang dalam kondisi yang tidak menentu untuk menentukan masa depannya.

Sosok Berdedikasi

Melihat fakta dan realitas saat ini, kita dengan mudah muak. Ternyata sulit mencari orang yang mau berdedikasi untuk negeri ini, yang mau mencurahkan segala waktu, tenaga, pikiran dan bahkan harta untuk Indonesia. Syukurnya, kegiatan di atas tidak selalu menulari yang di bawah. Masih banyak manusia Indonesia berdedikasi tanpa pamrih. Jauh berbeda dengan yang dicontohkan para pemilik kekuasaan yang banyak dijerat kasus hukum.

Sebut saja Pak Caca, pendidik di sebuah sekolah dasar di daerah pelosok di Pandeglang, Banten. Tepatnya di Desa Kur-taraharja, Kecamatan Sobang, pria asal Tasikmalaya itu sudah 30 tahun mengabdikan. Setiap hari sepanjang tujuh kilometer, dia harus berjalan kaki di antara jalan rusak penuh lumpur setinggi lutut orang dewasa. Yang kami perbuat di sekolah Pak Caca—melalui salah satu program BEM Universitas Indonesia, yaitu Gerakan UI Mengajar (GUIM)—masalah jauh dari yang telah diperbuat olehnya. Fasilitas minim dan medan menantang menyadarkannya untuk tidak menjadi sosok pengeluh. Pak Caca sadar, sebagai kepala sekolah, dia harus menjadi panutan bagi guru dan juga siswanya.

Kisah Pak Caca hanyalah satu dari sekian banyak kisah luar biasa pengabdian di negeri ini. Mengetahui kisah mereka yang berjuang ikhlas penuh dengan dedikasi menghapuskan pikiran bahwa negeri ini kehabisan orang baik yang mau mendedikasikan dirinya untuk masyarakat luas. Negeri ini membutuhkan lebih banyak orang seperti Pak Caca; sosok-sosok yang tidak memikirkan dirinya sendiri.

Masalah berikutnya, dikarenakan kondisi penyelenggara negara begitu mengkhawatirkan, banyak orang baik yang tidak ingin menduduki posisi tersebut sehingga mereka lebih memilih memikirkan diri sendiri. Keadaan semacam ini harus menjadi tampanan kita semua. Kita tidak suka terhadap sesuatu, tetapi kita tidak ingin mengubahnya juga. Padahal, yang dibutuhkan bukan hanya satu orang presiden, namun juga seluruh abdi negara yang siap mengelola negara dengan sebaik-baiknya tanpa memikirkan kepentingan personal maupun golongan, mulai dari posisi terbawah sampai posisi teratas.

Negara ini membutuhkan seseorang yang menempatkan prioritas cinta terhadap negaranya lebih tinggi dibandingkan kecintaan terhadap kepentingan pribadi dan golongan. Kepedulian terhadap suatu hal dapat lahir karena cinta, dan itulah yang harus tumbuh dan dimiliki oleh pengelola negara ini. Sudah terlalu banyak pengelola negara ini yang “berselingkuh” dari negaranya sehingga menjadikan negara ini “sakit hati”. Apa yang Pak Caca berikan terhadap dunia pendidikan adalah tentang cinta. Mencintai tempatnya mengabdikan dan berusaha menjadi panutan. Walaupun banyak berita miring tentang Indonesia, dia tetap bekerja dan mendedikasikan dirinya dalam dunia pendidikan.

Orang seperti Pak Caca adalah negarawan. Negarawan yang dimaksud bukan karena dia ahli tata negara atau memiliki kekuasaan di pemerintahan. Siapa pun kita bisa memainkan peran kenegarawanan selagi memiliki kompetensi dan juga kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Menjadi orang baik yang mau menempati posisi publik dan tidak mementingkan diri sendiri dan golongannya, semua dilakukan karena kecintaan yang begitu besar terhadap Indonesia. Bukan seperti politisi yang hanya memikirkan kepentingan partai, golongan, atau individu.

Memang bukan pekerjaan mudah menjadi negarawan, sebagaimana peran yang dijalankan Pak Caca di lokasinya bertugas. Namun apabila kecintaan terhadap negeri ini sangat besar, pastinya mimpi sebesar apa pun akan dilakukan. Tidak ada mimpi yang terlalu besar, yang ada hanyalah usaha yang terlalu kecil. Semoga kita menjadi bagian dari yang tidak pernah lelah mencintai dan berdedikasi untuk Indonesia. []

Toni Widiastanto

Presiden Peduli Pertanian



Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Sebuah negara dengan tingkat keanekaragaman yang luar biasa. Dari sisi penduduk Indonesia memiliki ragam etnis, suku dan budaya yang sangat beragam. Flora dan fauna yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Hingga keragaman hayati yang ada di Indonesia menjadi sumber plasma nutfah bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, isi perut bumi Indonesia sangat luar biasa. Emas, uranium, minyak, gas bumi, dan batubara ada di dalamnya.

Sebuah harapan besar akan hadirnya kemakmuran di Indonesia. Mengapa demikian? Seperti lirik sebuah lagu, saking suburnya tanah Indonesia, tongkat dan kayu ditanam pun akan tumbuh jadi tanaman. Sungguh negara yang sangat potensial dari sisi pertanian sehingga tidak salah Indonesia disebut negara agraris. Indonesia yang penduduknya masih banyak berprofesi petani sudah seyogianya mendapatkan perhatian khusus dari presiden. Arah kebijakan pemerintahan yang jalan sudah seharusnya dapat didistribusikan dalam rangka meningkatkan hasil pertanian.

Namun apa yang terjadi? Sayang seribu sayang, harapan tinggal harapan. Pertanian Indonesia jauh dari kemajuan. Para petani umumnya hidup dalam kemiskinan. Sungguh berbeda jauh dengan petani di Jepang sana.

Hancur porak-poranda akibat kekalahan pada Perang Dunia II, pertama kali yang dilakukan Jepang adalah memperbaiki infrastruktur penghasil pangan. Pemerintahan Jepang mengarahkan perbaikan sektor pertanian, selain juga perbaikan sektor pendidikan. Langkah ini sebuah upaya penguasa Jepang untuk lepas dari jurang penderitaan. Jepang memiliki sebuah prinsip: ketika rakyat kenyang kebijakan akan dapat berjalan lancar.

Tidak berbeda dengan Belanda, negara yang menjajah Indonesia berabad-abad. Sektor yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan di sana juga pertanian. Upaya awal yang dilakukan Belanda adalah membendung laut dengan membuat dam. Langkah ini sebuah upaya untuk menyediakan lahan kehidupan bagi penduduk Belanda.

Malaysia, negara yang dahulu banyak belajar dari Indonesia, kini sudah menjadi negara maju melalui revitalisasi bidang pertanian salah satunya. Kebutuhan pangan dalam negeri dapat terpenuhi. Jauh berbeda dengan jirannya di sini yang pemerintahnya lebih suka mengimpor. Riset yang terkait bidang pertanian diutamakan. Hasilnya dapat kita lihat, Malaysia salah satu produsen terbesar minyak sawit mentah (CPO) di pasar dunia dan mampu mencukupi sendiri kebutuhan kedelainya.

Thailand juga demikian. Sudah lama kita kenal negara itu sebagai lumbung pangan Asia Tenggara. Sebutan ini diraih de-

ngan dukungan pemerintah setempat. Para petani Thailand mendapatkan prioritas utama dalam konteks pembangunan negara. Dari sisi permodalan dan perlindungan hak-hak petani, pemerintah Thailand memberikan perhatian khusus. Bisa dikatakan, petani menjadi titik kunci kemajuan Thailand.

Beberapa prestasi negara lain di atas merupakan sebuah inspirasi bagi Presiden Indonesia. Bahwa dalam menentukan prioritas pembangunan bangsa dan negara sektor pertanian tidak dapat diremehkan begitu saja. Bukankah pangan sudah menjadi kodrat kebutuhan manusia? Setelah Reformasi 1998, entah atas dasar apa, ketahanan pangan seolah tidak perlu lagi menjadi perhatian khusus presiden.

Pertanian sendiri, dari kacamata Ilmu Pertanian, tidak hanya soal produksi pangan. Pertanian menurut Ilmu Pertanian mencakup budi daya tanaman, teknologi pertanian, teknologi hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, segala yang mencakup dengan tumbuhan, tanah, dan hewan akan tercakup dalam bidang pertanian. Seperti dianut oleh banyak negara, pembangunan dalam bidang pertanian disadari akan berpengaruh nyata bagi kemajuan Indonesia.

Indonesia pada dasarnya membutuhkan presiden negarawan yang mengetahui akar permasalahan bangsa. Presiden yang tentunya dapat memberikan efek perubahan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Sosok yang diharapkan itu tidak mengabaikan begitu saja potensi alam yang ada di Indonesia. Pertanian sesuai pengertian keilmuannya sudah menunggu untuk diberdayakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Saat yang sama, kebergantungan kepada impor

pangan semestinya menjadi tamparan keras bagi seorang negarawan, apa pun alasannya yang melatari lahirnya kebijakan impor tersebut. []

Moh. Amar Khoerul Umam

Belajar Memimpin dari Meja Makan



Pekerjaan besar bangsa Indonesia saat ini adalah berlomba-lomba menghadirkan jiwa pemimpin sejati dalam setiap diri. Ketika logika dan karakter pemimpin sejati tertanam, baik dalam pribadi pemimpin formal ataupun pemimpin informal, maka yang akan terjadi adalah perbaikan yang nyata di negeri ini.

Lalu, pemimpin seperti apakah yang ditunggu dan dibutuhkan oleh bangsa ini?

Dalam sebuah wawancara Andre Vltchek dan Rossie Indira dengan Pramodya Ananta Toer, yang dibukukan dalam *Exile: Conversation with Pramodya Ananta Toer* (2006), sastrawan yang sempat didominasi meraih Nobel Sastra itu mengeluh, “*All I know is that today’s Indonesians have no idea of what should be the concept upon which to build this country. People, and this includes our youth, just indulge in small talk, not how to achieve things. They’ve lost the culture of reading and prefer watching television. I think that most Indonesian families are the same. They just glue themselves to the television. There is no hunger for knowledge.*”

Perhatikan poin penting ucapan Pramoedya yang hurufnya ditebalkan. Banyak orang, tanpa terkecuali kalangan muda, lebih menikmati obrolan ringan ketimbang membincangkan gagasan mencapai sesuatu. Gagasan telanjur diidentikkan dengan sesuatu yang serius dan tidak perlu dimasuki oleh kalangan muda. Padahal, mereka itulah calon-calon pemimpin negeri untuk masa akan datang. Bila dengan gagasan besar mereka tidak (mau) akrab, masihkah ada harapan bermunculan pemikiran revolusioner mereka bagi Indonesia? Bukankah malas berpikir tanda malas untuk maju?

Sejatinya, pemimpin yang berpikir besar ingin mendapatkan pencapaian yang besar pula. Untuk menuju ke sana, hal paling mendasar untuk dibenahi adalah pola pikir. *Think big, dream big*. Namun demikian, berpikir besar bukan berarti tidak memikirkan hal yang kecil. Bagaimanapun juga hal-hal kecil dan detail memiliki arti penting untuk diperhatikan. Hal kecil adalah awal dari hal besar bahkan bisa menggagalkan hal besar. Sebagaimana Sun Tzu pernah katakan, “Karena sebuah paku, tapal kuda lepas; karena tapal kuda lepas, kuda terjerembab jatuh. Informasi pun tidak sampai ke barisan terdepan peperangan. Karena informasi tidak sampai, pasukan pun kalah dan akhirnya kekuasaan atas sebuah negara jatuh ke tangan lawan.”

Teringat saya dengan kepala keluarga dengan penempatan karakter yang luar biasa. Sebut saja Nugraha namanya, seorang pendidik di Program Magister dan Doktor Universitas Indonesia. Sejak kecil, dosen asal Tasikmalaya ini selalu dibesarkan dalam hal cara berpikir dan bersikap untuk memikirkan Indonesia sejak dini. Caranya, dilakukan dengan pembiasaan di meja makan. Ada kebiasaan yang didapatnya dari sang kakek. Jika makan bersama sang kakek, kerap kali kakeknya menegur,

“Habiskan makanannya, Nak, jangan disisakan. Di Indonesia ini masih banyak yang belum bisa makan.” Sang kakek juga selalu menasihatinya untuk tidak berlebih ketika makan, “Ambil makanannya jangan terlalu banyak. Lebih baik *nambah* daripada berlebih.”

Penasihat di Kementerian Pertahanan itu juga membesarkan anaknya dengan cara yang sama: selalu diajak berpikir tentang keindonesiaan. Karena, baginya, tanah air itu bisa diwariskan, sedangkan rasa cinta tanah air dan bela negara tidak dapat diwariskan.

Kedua pesan sederhana dari sang kakek Nugroho sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pesan itu memiliki muatan luar biasa. Seorang pemimpin selalu berpikir jauh ke depan tentang orang lain, bukan tentang dirinya. Sampai urusan sekecil makan pun demikian. Tidak membuang nasi dan lauk karena khawatir menzalimi rakyat lain yang belum bisa makan. Tidak ingin bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Demikian pula dengan filosofi mendasar untuk memilih menambah ketimbang membuang makanan yang berlebih. Hal ini mengingatkan kita untuk pandai merasakan, bukan merasa pandai.

Sifat pemimpin mesti ditanamkan sejak dini, mulai dari hal terkecil atau sepele. Namun, dari kesepelean itu ada nilai penting yang ditanamkan. Sederhana, visioner, dan empati adalah tiga sifat pemimpin yang dapat dipetik dari makan. Pemimpin dengan karakter Kepemimpinan. Pembiasaan ini amat berbeda dengan kegemaran membincang hal-hal ringan tapi penuh omong kosong, seperti dimaksudkan Pramoedya di atas. Nilai filosofilah pembedanya. []

Mandira Bienna Elmir

Dua Teladan Negarawan



Masih tergambar jelas suasana Rinbesihat, sebuah desa terpencil di Kabupaten Belu, ujung timur dari Nusa Tenggara Timur, menari-nari di depan mata. Bukan hanya tentang sekelompok anak remaja yang menjadikan kakak-kakak dari Jawa tempat curhat dengan berurai air mata di bawah pohon beringin di samping balai desa. Atau padang savana di belakangnya sejauh mata memandang. Tidak pula sekadar mengenang gunung berlapis-lapis yang tegak kokoh menjaga desa. Tapi semua. Semua yang ada di atas bumi Rinbesihat yang mungkin minus segalanya dalam tatap mata orang kota.

Bagi saya, sungguh Rinbesihat sangat meluapkan makna pembelajaran, atas beragam peristiwa yang pernah mendekati saya di sana. Tidak hanya tentang anak-anak yang setiap petang belajar sambil bermain di teras desa. Atau tentang Lesu, mantan bayi berlabel gizi buruk yang sejak kecil dipaksa mandiri karena ayah dan ibunya masing-masing telah pergi. Terbayang pula wajah anak-anak yang berjalan kaki berkilo-kilo meter untuk mencapai sekolah sembari membawa jerigen, yang pulang sekolah nanti diisi air sebagai oleh-oleh paling berharga untuk orangtua.

Presiden Negarawan

Yang membuat saya terantuk malu, di tengah beragam ‘penderitaan’ itu, belum pernah saya melihat warga mendemo kepala dusunnya. Semininim apa pun fasilitas desa, tak ada warga yang mencaci maki pemerintahan kecil mereka karena mereka tahu apa yang telah diupayakan pimpinan mereka.

Kami menyapa Kepala Dusun Dinleo Desa Rinbesihat ini dengan sebutan “Bapak Dusun”. Nama lengkapnya Mathius Eduk. Meski menjadi “kepala”, tidak sedikit pun Pak Mathius memosisikan diri sebagai “kepala”, yang memerintah saja.

Terbayang apa yang pernah dia lakukan pada kami. Termasuk kemurahhatian meminjamkan motor kepada mahasiswa yang tengah Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desanya. Bukan soal penyerahan kendaraan satu-satunya yang dia punya, namun atas pemikiran yang dalam bahwa jika saja motor tunggalnya itu dipakai mahasiswa, maka akan banyak pekerjaan penting yang berguna untuk warga bisa disegerakan.

Pak Mathius sangat meyakini, apa pun aktivitas kemasyarakatan yang dikerjakan mahasiswa, tentulah akan mendatangkan manfaat lebih besar bagi masyarakat, karena mahasiswa tersebut lebih cerdas, dan bisa berpikir lebih strategis ketimbang dirinya “Ah... otak adik-adik lebih baik dari *Sa pu* otak *tho...*,” ucapnya berkali-kali.

Saya sendiri pernah merasa tertampar saat pergi ke warung membeli kebutuhan pangan yang berjarak sekitar enam kilometer dari Dinleo. Tak dinyana, ternyata Pak Mathius juga tengah berbelanja di warung yang sama. Di tengah sergapan rasa malu, saya meminta maaf kepadanya dan mengungkapkan rasa bersalah karena telah membuatnya terpaksa berjalan

kaki ke warung tersebut, sementara motornya saya yang menggunakan. Yang membuat saya merasa lebih kian kecil adalah ucapan kebesaran hatinya yang menenteramkan, “Ah sudah... pakai saja... *Kakadong* kan mau pergi mengajar *tho*?”

Pak Mathius, dengan pendidikan ala kadarnya, juga berusaha keras menata administrasi dusun dengan apik. Dia dengan tekun selalu membuat laporan perkembangan dusunnya dengan menggunakan pena sederhana, karena memegang komputer pun baru dimulai dan dikenalkan mahasiswa KKN. Isi buku catatannya sangat detail, termasuk catatan ibu-ibu hamil dan kendala kehamilannya. Apa pun yang dilakukan selalu memprioritaskan kepentingan warga dusun. Setiap mewujudkan suatu program, dia pula yang paling terdepan mengulurkan segala yang dipunyainya. Padahal, jelas Pak Mathius bukan orang kaya. Sederhana pun baru di kelas paling dasar. Tapi, baginya, kepentingan warga, menduduki posisi teratas dalam skala prioritas. Melebihi kepentingan diri sendiri, apalagi kelompok dan bendera strata.

Pada saat kami ingin membuat *green house*, Pak Mathius pula yang merelakan kayu jati di halaman rumahnya. Pada waktu kami mencetuskan ide membuat kompos, dia mendahului kami memikul sendiri 500 kiloan kotoran yang dibutuhkan. Padahal, saat itu sebagian kami tengah *leyeh-leyeh* di pemondokan usai mengajar di sekolah.

Saat mendengar rumah kami nyaris disatroni maling, dia pula yang bersegera datang berbekal senter menerangi jalan yang tak berpenerang, dan sarung tenun menutupi badan dari suhu yang menggigilkan. Pak Mathius selalu merasa paling bersalah jika terjadi kecelakaan atau duka yang merundungi

warganya. Selain berada di barisan terdepan jika ada tugas dan beban serta kesulitan yang menghadang. Kepentingan masyarakat baginya di atas segala.

Bagi saya, kehadiran Pak Mathius yang rendah hati, selalu ingin belajar, melayani dan berkorban, sungguh suatu cahaya terang di tengah temaramnya suasana negeri. Di tengah keprihatinan menatap potret buram negeri ini, sejenak kembali menyelip optimisme diri, ketika terbayang segala perilaku yang dicontohkan kepemimpinan orang kecil seperti Pak Mathius Eduk.

Meneladani Hatta

Pengabdian Mathius Eduk mengingatkan saya pada Bung Hatta. Meski tidak pernah menjadi presiden, Hatta menjalankan peran sebagai negarawan sebaik dan sesempurna yang diikhtikannya. Mulai saat masih mahasiswa di luar negeri, mempersiapkan diri mengabdikan untuk bangsanya. Belajar sungguh-sungguh. Beragam bahasa dikuasai, seraya mendesain wujud negara merdeka yang dicita-citakannya. Saat kemerdekaan terwujud, Hatta pun tidak memikirkan kelanggengan kekuasaan namun fokus kepada kepentingan negara dan bangsa jangka panjang. Hatta secara konsisten, dengan sabar dan tekun, mewujudkan kesejahteraan mengangkat derajat bangsa. Lalu ketika cita-cita mulianya itu dihadapkan pada kepentingan kekuasaan, Hatta memilih melepaskan jabatan di pemerintahan.

Melepaskan jabatan bagi Hatta tidak berarti melepaskan tanggung jawab dan cita-cita untuk membangun Bangsa. Dan itulah contoh nyata negarawan sejati. Hingga hayatnya telah menyatu di dasar bumi pun, kisah-kisah heroik Bung Hatta

tetap disebut dengan penuh haru dan diserukan dengan rindu. Sungguh berbeda dengan pemimpin pemerintahan kita yang lain.

Saya tidak perlu menyisir satu per satu kutu-kutu para presiden dan pemimpin negeri ini. Jika kita jujur menilai, tanpa menghilangkan jasa yang mereka pernah buat, namun hampir tak ada presiden yang benar-benar memilih baju negarawan ketimbang sebatas sebagai pemerintah atau penguasa. Belum ada yang betul-betul serius memikirkan bangsa dan memaksimalkan ikhtiarnya. Mulai dari Soekarno hingga presiden terkini, semua sibuk mengurus 'kebaikan' dan 'keselamatan' pemerintahannya sendiri. Bukan negara apalagi bangsanya. Dan yang menyedihkan, 'tradisi' ini diikuti pula oleh segenap jajaran pelaksana pemerintahan.

Padahal, presiden bisa leluasa memilih posisi. Apakah sekadar pemerintah yang notabene adalah jabatan yang dipergilirkan, ataukah menjadi negarawan, jabatan dan penghargaan seumur hidup untuk kepentingan janggan panjang.

Hampir selalu saya menggerutu sendiri. Dengan banyak berandai-andai. Jika saja orang-orang yang duduk di pemerintahan itu tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Jika saja mereka yang mengelola negara tidak hanya memikirkan kepentingan sesaat di masa mereka berkuasa. Jika saja mereka seorang negarawan, jasa dan kepemimpinannya tentulah akan abadi tak hanya berbilang tahun masa pemerintahan. []

Aksi Menjadi Presiden Negarawan

Faisal A. Kamil

Tiga Modal Kepemimpinan Negarawan



Sebuah penelitian oleh Kamil (2013) yang pernah dilakukan tentang faktor-faktor yang memengaruhi keterpilihan partai politik adalah adanya tokoh yang diusung, kinerja di parlemen, dan visi-misi partai politik bersangkutan. Tokoh menjadi faktor terkuat dalam menentukan pilihan politik warga negara dalam pemilu. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Baswedan (2004) terkait masalah faktor keagamaan dalam menentukan pilihan politik, membuktikan bahwa agama yang dianut seseorang tidak berbanding lurus dengan pilihan politiknya terhadap partai politik yang memiliki kesamaan agama calon pemilih.

Oleh karena itu, faktor tokoh menjadi penting dalam memilih pemimpin di era demokrasi digital seperti saat ini. Kemudian, isu sosiologis seperti keagamaan, daerah, suku/etnis, mulai ditinggalkan sebagai faktor yang menentukan. Figur menjadi penting mengingat proses demokrasi partisipasi yang dianut Indonesia saat ini membutuhkan pembuktian oleh tokoh yang diusung partai politik untuk menjadi presiden.

Moderat Memimpin

Tokoh menjadi panutan untuk memimpin warga negara. Apabila tokoh tidak mampu mewakili kepentingan semua golongan, maka menjadi nihil dukungan terhadapnya. Tokoh boleh menjadi sesuatu yang sentral dalam pemilihan umum, tetapi nilai-nilai di balik tokoh tersebut yang menjadi penguat kedipilihan makna kepemimpinan.

Moderat adalah sebuah nilai strategis yang harus dimiliki tokoh pemimpin. Moderat di sini adalah proses memahami perbedaan yang ada di sekeliling dirinya. Contohnya adalah mengerti kondisi seseorang yang tidak sepikiran bahkan sesuai dengan konsep kita atas suatu hal. Penelitian Baswedan tersebut membuktikan bahwa faktor agama tidak menjadi penting dalam menentukan pilihan atas partai politik. Nilai moderat yang dimiliki tokoh menjadi kunci atas peluangnya untuk menjadi pemimpin yang disegani dan dihormati masyarakat.

Saya ingin mengambil contoh kasus yang pernah dialami sendiri, selaku mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada. Sampai 2012, Fisipol UGM belum memiliki organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas. Sudah 13 tahun organisasi kemahasiswaan di Fisipol bubar karena masalah klasik: monopoli salah satu golongan.

Menjadi sulit bagi saya pribadi dan beberapa rekan mahasiswa Fisipol untuk menyalurkan aspirasi di tingkat fakultas dan universitas apabila tidak ada wadah bersama yang mewakili seluruh jurusan dan elemen mahasiswa yang ada. Akhirnya, bersama rekan-rekan seperjuangan yang saat itu duduk sebagai ketua-ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan bebera-

pa ketua dan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), kami melakukan propaganda untuk mewacanakan pentingnya organisasi wadah yang dapat merepresentasikan seluruh elemen mahasiswa Fisipol.

Proses pewacanaan tersebut sulit butuh kerja keras mengingat saat itu saya tidak memegang posisi strategis apa pun di lingkungan Fisipol, selain mengantongi predikat Mahasiswa Berprestasi pada tahun itu juga. Ditambah lagi adanya perpecahan sikap beberapa elemen mahasiswa karena trauma monopoli sebagian golongan yang dulu pernah terjadi. Sebuah sejarah gelap organisasi kemahasiswaan di Fisipol yang berujung pada pembubaran organisasi tersebut. Maka, dibutuhkan kerja keras ekstra dari segenap tim pendukung pembentukan lembaga baru yang steril dari monopoli salah satu golongan dengan membuat sistem yang kolektif-kolegial dan pengawasan seimbang.

Berkat kerja sama yang serius dan kreatif, akhirnya wacana pembentukan sebuah organisasi wadah dapat dilakukan. Dilaksanakanlah Kongres Mahasiswa Fisipol (KMF) pada Juni 2012, dan saya diamanahkan sebagai Koordinator Umum sebuah lembaga baru yang bernama Senat Mahasiswa Fisipol. Kongres dihadiri oleh seluruh elemen mahasiswa di Fisipol lewat organisasi HMJ dan UKM. Tetapi, hal itu bukan titik akhir dari perjuangan.

Setelah Senat Mahasiswa Fisipol berdiri, kami sebagai pengurus memiliki amanah untuk meyakinkan semua mahasiswa di Fisipol, bahkan hingga dosen-dosen, dan pengurus Dekanat bahwa sebuah lembaga wadah telah terbentuk dan memiliki pengaruh penting untuk merepresentasikan kepentingan-kepentingan seluruh mahasiswa Fisipol. Kami pun

mulai melakukan sosialisasi untuk meyakinkan pentingnya organisasi ini. Pada November 2012, diadakan kongres untuk memantapkan organisasi ini secara formal dengan dikeluarkannya surat resmi pengakuan dari Dekanat. Dan hal itu pun dapat terjadi dengan mengganti organisasi Senat Mahasiswa Fisipol menjadi Keluarga Mahasiswa Fisipol yang terdiri dari Dewan Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif dan Majelis Mahasiswa sebagai lembaga legislatif.

Dari pengalaman yang diceritakan di atas, saya ingin mengemukakan bahwa tanpa nilai-nilai moderat yang dipraktikkan seorang pemimpin, kita tidak akan mampu untuk mempersatukan dan mengambil hati orang-orang untuk mendukungnya. Proses memahami apa yang diinginkan orang-orang yang kita pimpin menjadi kunci seorang presiden negarawan. Dan salah satu nilai yang memengaruhi untuk memahami perbedaan adalah nilai moderat.

Sekarang kita lihat bagaimana kasus kekerasan yang terjadi karena tidak adanya nilai moderat yang dipraktikkan orang-orang. Mereka sibuk memikirkan egoisme golongan dan konsepsinya pribadi atas suatu hal tanpa memahami apa yang menjadi aspirasi orang-orang lain yang ada di sekitarnya. *He is not a god, and he can not control of the truth.* Saya sangat tidak percaya terhadap pemimpin yang memaksa, sosok pemimpin yang menjual klaim kebenaran. Mereka hanya memiliki satu kebenaran tunggal, dan menganggap semua yang di luar konsepsinya adalah pendosa dan pecundang. Pemimpin adalah manusia, dan manusia pasti akan berbuat salah. Oleh karena itu, harus ada sistem desentralisasi kekuasaan, humanisme pilihan kebijakan, dan memahami perbedaan, termasuk hal-hal

fundamental dalam sosial-budaya untuk mencapai suatu konsensus bersama. Semua itu tertuang dalam satu kata: moderat.

Amanah dan Mulut

Setelah moderat, ada lagi nilai yang wajib dimiliki seorang presiden negarawan, yaitu amanah. Penulis menganalogikan makna amanah ini dengan makna mulut sebagai organ tubuh manusia,

Ada pemimpin Indonesia di masa lalu yang belum lama berselang mengenang saat kali pertama berdiri di depan forum dunia dalam pertemuan Food Agriculture Organization (FAO) di Roma pada 1985. Kira-kira dia mengatakan seperti ini:

“Saudara bayangkan, seorang yang lebih dari enam puluh tahun ke belakang masih anak bermandi lumpur di tengah kehidupan petani di Desa Kemusuk saat itu naik mimbar dan bicara di depan sekian banyak ahli dan negara-negara dunia, sebagai pemimpin rakyat yang baru berhasil memecahkan persoalan yang paling besar bagi lebih dari 160 juta mulut.”

Ada dua hal yang menarik untuk ditelisik dari pernyataan di atas. Pertama, seolah-olah manusia Indonesia itu hidup untuk makan, dan bukan makan untuk hidup. Kedua, mulut menjadi penting di masa (baca: rezim) tersebut. Kalau diingat bahwa, dan mungkin juga diharapkan, agar mulut tidak boleh dipakai untuk omong selain untuk makan. Kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, dan lain-lain, dikerdilkan atau dilarang total, karena semuanya memakai mulut untuk berbicara, dan berbicara artinya berpikir, dan berpikir sangat dekat jaraknya dengan menuntut freedom of the people (Dhakidae, 2013).

Saat ini, *freedom of the people* dengan mekanisme pemilihan umum sudah menjadi rutinitas dalam kehidupan berdemokrasi di tengah kita. Sayangnya, demokrasi yang bisa melahirkan keadilan sekaligus pula menjadi ajang pameran mulut. Agar bisa dipilih, calon-calon pemimpin itu mengumbar janji dengan menggunakan kendaraan demokrasi. Yang bisa diperbuat masyarakat dalam kondisi demikian adalah berhati-hati memilih calon pemimpin. Lihat, cermati, dan rasakan pikirannya apabila dia berbicara tentang konsep mulut.

Memilih pemimpin adalah juga memilih seorang yang akan mengemban amanah. Amanah adalah bagian penting dari seorang pemimpin. Amanah itu tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab atas mulut rakyat yang dipimpin, dan tanggung jawab pula atas banyaknya mulut yang dibungkam.

Menjadi pemimpin harus mampu bersikap amanah. Amanah untuk memerdekakan warga negara dari kebungkaman dan kebodohan yang menjeratnya sejak era penjajahan, dan mungkin hingga kini masih terjadi di sebagian dari kita. Amanah untuk memerdekakan bukan saja hak berbicara dan makan, tetapi juga untuk berpikir sesuai dengan konsepsinya, dan terbuka terhadap perbedaan menjadi nilai yang luhur bagi seorang presiden negarawan.

Seorang pemimpin hanyalah pelayan. Dan sudah menjadi tugas pelayan untuk menuruti apa keinginan tuannya, yaitu masyarakat. Bukannya membajak tuannya atas nama klaim kehendak tuannya, padahal sarat kepentingan pribadi dan egoisme kelompok.

Mengemban amanah dengan baik merupakan harapan sekaligus impian setiap warga atas pemimpinnya. Ini berlaku

bagi kita sebagai calon pemimpin Indonesia. Apabila kita nanti memimpin, tinggal kita pilih dua makna mulut di atas: fokus pada memberi makan jutaan mulut ataukah memberi mulut kebebasan sebagai organ output pikiran kita yang merdeka. Anda akan memilih yang mana?

Inovasi

Setelah nilai-nilai moderat yang dianutnya diterapkan, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya dijalankan secara amanah, seorang pemimpin belum boleh berpuas diri. Pemimpin harus memiliki inovasi yang kreatif dalam memimpin.

Untuk menjadi seorang pemimpin, butuh dikenalan yang memadai. Hal yang membuat seseorang memiliki kedikenenalan yang memadai adalah memiliki modal, antara lain uang, ilmu, dan karya.

Uang penting karena menjadi sumber penggerak dan salah satu faktor untuk dikenal. Uang memang dapat membeli banyak hal, bahkan kesetiaan. Tetapi, modal uang saja tidak akan mampu menjadi bekal dalam proses kepemimpinan.

Ilmu menjadi penting karena dengan ilmu seorang pemimpin akan mampu membagi konsep yang dipikirkannya kepada orang-orang banyak. Dengan ilmu pemimpin mampu mendorong orang yang dipimpinnnya untuk melakukan perubahan.

Modal berikutnya adalah karya. Karya akan dikenal sepanjang masa. Karya dapat berupa pemikiran dalam bentuk tulisan, berupa warisan konsep atas sebuah sistem yang berpengaruh, bisa juga berupa bentuk-bentuk fisik yang dapat dilihat dan dirasakan.

Untuk menjadi pemimpin, dibutuhkan ketiga modal tersebut. Kita dapat memilih salah satunya, atau semuanya. Yang jelas, tanpa modal tersebut kita tidak akan mampu menjadi pemimpin. Itu merupakan syarat. Pemimpin tidak dilahirkan, tetapi dibentuk oleh keadaan atau sistem yang terorganisasi. Ada juga yang membentuk dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin dengan modal-modal di atas.

Setelah kita paham mengenai modal untuk kepemimpinan, berikutnya pemimpin dituntut untuk berinovasi. Tanpa inovasi yang cemerlang, pemimpin tidak akan mampu mencatat sejarah. Kita bisa ambil contoh Gerakan Indonesia Mengajar yang digagas oleh Anies Baswedan. Produk inovatif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pendidikan nasional di Indonesia itu membuat Anies kian dikenal sebagai tokoh pemimpin muda masa depan Indonesia.

Sebelumnya juga B.J. Habibie, saat masih menjabat Menteri Riset dan Teknologi, dengan pesawat dan kebijakannya ingin membangun industri padat modal di bidang penerbangan dan teknologi. Merupakan hal inovatif apabila dilihat, walau tidak terbilang banyak orang yang mengkritiknya saat itu, dan bahkan menghambatnya hingga kini. Tetapi, Habibie kadung dikenal dalam sejarah sebagai pencetus kebijakan pesawat buatan Indonesia. Itu sebuah karya. Dan karya tersebut menjadi modalnya untuk menjadi presiden Indonesia yang berkarakter kendatipun tidak panjang usia jabatannya. []

Nuroel Tri Isna Wijaya

Melawan Virus Kucing Rakus



Ketika semua bangsa berlomba-lomba menggoreskan sejarah yang mendunia melalui gebrakan inovasi yang menginspirasi, negara yang begitu kita cintai ini justru terlalu sibuk mencakar sejarahnya dengan air mata dan darah.

Sebanyak 250 juta lebih jiwa dipimpin kucing miskin, bodoh, dan rakus. Kalau kucing rakus menjabat sebagai pemimpin, negara pun akan digadaikannya dengan murah. Sempurnanya, kucing itu memiliki banyak teman yang tak kalah rakusnya.

Kucing bersayap, pasti congkaknya selangit. Dicakarnya apa saja yang bisa membuat dirinya puas. Tak peduli bila yang dicakarnya itu sang garuda sekalipun.

Cakaran pertama di langit, negara ini dipayungi skandal korupsi. Si kucing rakus menyukseskan kebijakan korupsi di mana-mana bersama komplotannya. Cakaran kedua di bumi, negara yang katanya agraris ini ternyata dimiskinkan produktivitasnya, terutama dalam dunia pertanian dan perkebunan. Belum lagi sumber daya alam yang dieksploitasi habis-habisan. Ampasnya diterima rakyat miskin Indonesia, hasilnya dibawa ke luar negeri. Cakaran ketiga, terhadap ideologi bangsa. Bhine-

ka Tunggal Ika dan Pancasila yang menjadi pemersatu atas in-dahnya keanekaragaman kultur Indonesia dikoyak dengan konflik-konflik yang terus bergulir seolah berpacu dengan waktu. Bahkan mahasiswa pun terkotak-kotak dengan organisasi yang mereka sembah agungkan.

Tiga cakaran itu akar permasalahannya adalah kualitas dan karakter sumber daya manusia Indonesia, terutama para pemegang kendali negara ini. Kita telah kehilangan sosok negarawan. Terlebih sang presiden negarawan. Presiden yang memiliki jiwa negarawan memiliki jawaban atas permasalahan mendasar bangsa ini. Sebagai negara agraris sudah selayaknya kebijakan pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan pangan.

Agar virus kucing rakus tidak menulari, sudah saatnya kelompok berpendidikan menyatukan barisan. Membuat format gerakan masif membangun desa. Atau program mengajar bersama anak-anak petani. Sudah saatnya mahasiswa harus sanggup berjuang bersama rakyat, bukan lagi menjaga jarak. Berguru kepada negarawan petani, belajar tentang hakikat kedaulatan pangan bersama mereka.

Memperkuat basis kekuatan melalui pendidikan karakter dan berbudaya karya adalah tahapan fundamental yang harus dilakukan. Karena Indonesia masa depan adalah kualitas dan karakter manusianya saat ini. di sinilah tanggung jawab kaum muda negarawan; merekalah kandidat pemangku estafet perjuangan bangsa. Semua ini adalah proses. Berproses bagi seorang negarawan muda adalah niscaya. Tahapan inilah yang mendewasakan pemahaman hingga akhirnya menduduki amanah sebagai pemimpin negarawan.

Untuk itu, wahai negarawan muda, bersiaga dan berjuanglah! Lawan kucing-kucing rakus! []

Harry Utama Putra

Menggagas Perjuangan Bersama Aktivistis Mahasiswa



Sejak Reformasi 1998 berujung dengan mundurnya penguasa Orde Baru, mahasiswa terbuai dengan angin kenyamanan. Bila dulu penguasa otoriter yang dilawan, saat ini masalah yang dihadapi adalah diri mereka sendiri. Mahasiswa disibukkan oleh urusannya masing-masing sehingga menggiring mereka menjadi individu-individu pragmatis. Mahasiswa seakan diabu-abukan dengan berbagai kebijakan yang dibuat rezim. Alhasil, teriakan mahasiswa era sekarang hanya mampu membuat pemangku kebijakan bergeming.

Keadaan pragmatis yang melanda dunia mahasiswa tersebut jelas sangat membahayakan. Mengapa? Karena mahasiswa yang siap terjun ke dunia nyata haruslah benar-benar mahasiswa yang sudah teruji karakternya. Sehingga, tidak ada lagi kaum intelektual yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bila pragmatisme sudah mendera, apa lagi yang bisa diharapkan dengan kepemimpinan orang-orang muda itu di kemudian hari?

Kita tidak boleh lupa bahwa rata-rata pemimpin-pemimpin atau pemegang jabatan di negeri ini lahir dari rahim kaderisasi kampus. Kini imunitas kader pemimpin kampus sangat rentan oleh virus-virus perusak. Ancaman-ancaman, baik yang kasar ataupun menggiurkan, silih berganti hadir ke relung pemikiran para kader kepemimpinan di dalam kampus. Tidak sedikit para aktivis kampus itu akhirnya terpesona rayuan untuk mengkhianati rakyat dan berselingkuh dengan pemegang kekuasaan. Ditambah lagi doktrin-doktrin birokrat kampus juga semakin bergema di telinga mahasiswa, semisal keutamaan segera lulus kuliah ketimbang sibuk berdemonstrasi. Padahal, kalau mau jujur, prestasi akademis saja tidak cukup untuk membenahi bangsa ini. Mahasiswa harus keluar dari situasi ini.

Jujur, diri ini sangat iri sekali ketika melihat rekaman video senior-senior aktivis mahasiswa yang ketika berjuang turun ke jalan membawa masa begitu banyak. Argumen-argumen yang tajam dalam kritikan mereka menjadi headline banyak media masa. Sekarang sangat jauh berbeda kondisinya, aksi mahasiswa hanya melibatkan belasan orang. Apatisme mahasiswa sudah semakin menjamur dan sporanya sudah menempel di dalam hati-hati mereka. Memikirkan diri sendiri untuk cepat lulus dan bekerja sudah menjadi keyakinan mainstream di dada banyak mahasiswa.

Akankah kita menyerah dengan keadaan memilukan itu? Tidak. Harapan itu masih ada. Di sinilah peran strategis kaderisasi yang ada di kampus. Lembaga-lembaga kemahasiswaan seperti BEM, DPM, HMJ, UKM, ataupun organisasi kedaerahan, bahu-membahu membenahi karakter para kadernya. Didukung juga oleh peran eksternal kampus yang juga

melakukan persiapan seperti HMI, GMNI, PMII, KAMMI, dan elemen lainnya, seperti suatu harmoni dalam menjadikan individu-individu cendekiawan muda bangsa ini memiliki karakter yang kuat dan berdaulat.

Pastinya setiap organisasi memiliki pemahaman, ideologi, dan ranah kerja masing-masing yang kerap kali menimbulkan dinamika dunia pergerakan mahasiswa. Adanya perbedaan semestinya bukan lagi untuk dipersoalkan, apalagi dibesarkan. Pada kenyataannya, menyatukan suara di lapangan tidaklah mudah. Mahasiswa terpecah belah oleh kepentingan masing-masing, dan sering kali karena sentimen perbedaan organisasi. Ketika berada dalam suatu forum diskusi, satu dan yang lain berusaha keras mempertahankan argumentasinya. Ujungnya, kesia-siaan saja yang didapat.

Padahal, ada kepentingan bersama yang lebih utama dari hadirnya banyak organisasi mahasiswa. Yakni kaderisasi kampus di setiap tubuh organisasi mahasiswa itu semakin menunjukkan peningkatan dalam melahirkan para pemikir-pemikir baru untuk kemajuan bangsa ini. amat disayangkan apabila calon-calon pemimpin masa depan itu sudah tersekat dengan perbedaan bendera.

Di sinilah dibutuhkan upaya duduk bersama memikirkan Indonesia. Teramat berat dan pelik masalah Indonesia diselesaikan oleh satu organisasi mahasiswa. Merumuskan visi bersama jauh lebih produktif ketimbang berjalan sendiri-sendiri. Indonesia tidak akan berubah di tangan satu dua orang saja. Indonesia tidak akan mampu mengalahkan kepentingan asing dengan satu orang saja yang memperjuangkannya. Indonesia membutuhkan pemuda-pemuda yang mau bersatu padu

dengan bermodalkan integritas, martabat, dan karakter dalam kemajuannya.

Leadership Team of Indonesia

Saat ini bukan lagi zamannya membicarakan figuritas, melainkan membicarakan ide-ide; tidak lagi membicarakan perbedaan, tapi mengedepankan kekompakan; serta tidak lagi bertanya apa yang negara berikan kepadaku, tapi bertanya apa yang bisa kuberikan untuk negara ini. Maka, gagasan pembentukan Leadership Team of Indonesia menjadi salah satu solusi untuk membangun kembali bangsa ini. Presiden negarawan dalam sebuah super Leadership Team of Indonesia yang akan memberikan harapan baru dan menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan bangsa ini.

Sudah banyak darah yang tertumpah, air mata yang menetes, serta peluh yang membanjiri perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Kaum muda harus ingat itu semua sehingga berlapang dada untuk terpanggil dan menggantikannya dengan ukiran-ukiran prestasi. Bukan lagi dengan perpecahan sesama mereka. Dengan demikian, kebersamaan perjuangan para negarawan muda harus terus-menerus dijaga. Bukan lagi bercerai-berai gara-gara berebut ingin menjadi pertama di kursi kekuasaan. Sebab, dalam posisi apa pun dan di mana pun, mereka tetap bisa memainkan peranan selaku pemimpin negarawan. []

Arnova Reswari

Mahasiswa, dan Pemimpin Negarawan



Tidak bisa dimungkiri bahwa hari ini saya dan pembaca buku ini bermimpi besar untuk Indonesia. Pahami bahwa kami tercetak di universitas gagah bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Ada suatu kegelisahan yang menghantui kami, kegelisahan untuk segera terjun ke masyarakat. Kegelisahan untuk berkontribusi.

Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Begitu sabda Nabi Muhammad yang sangat saya yakini hingga kini. Dengan berbagai keterbatasan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran (menurut pengakuan beberapa teman mahasiswa, fakultas ini paling berorientasi untuk belajar saja; tidak untuk aktivitas lain), bentuk kontribusi kecil saya diaktualisasikan melalui organisasi kampus.

Meskipun organisasi yang saya ikuti masih dalam lingkup fakultas, aktif di dalamnya memberikan pelajaran yang tidak didapatkan di bangku kuliah dan di laboratorium anatomi kampus. Di dalam kelas, saya belajar tentang seluruh organ tubuh manusia, dari ujung rambut kepala hingga jempol kaki. Di organisasi, saya belajar tentang karakter manusia yang sebenar-

nya. Tentang cara memanusiaikan manusia. Saking asyiknya, saya terperangkap dalam hobi mempelajari manusia—tentu saja, di luar soal kedokteran.

Setelah tiga tahun lebih berkecimpung di dunia pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, tidak berlebihan jika saya simpulkan bahwa organisasi merupakan miniatur negara. Di dalam organisasi, ada pemimpin, aturan, program kerja, dan rakyat yang juga merasakan kepemimpinan kita.

Mungkin efek dalam pengelolaan organisasi kampus tidak sebesar dalam pengelolaan negara. Pun tidak sepenuhnya bisa disamakan karena bicara negara tentu melibatkan banyak sistem. Di organisasi, karena lingkup kerjanya kecil, efek yang dirasakan pun kecil. Meskipun berefek kecil, hal itu tidak akan mematikan semangat aktivis untuk terus berkontribusi. Karena para aktivis mahasiswa paham bahwa tidak ada masalah tentang besar kecilnya pekerjaan selama mereka ikhlas dan ber-sungguh-sungguh melakukannya.

Kontribusi Profesi

Predikat mahasiswa tidaklah abadi. Satu fase siap menanti saya ketika tidak lagi menjadi seorang mahasiswa. Kelak ketika gelar dokter resmi disandang, komitmen dan kontribusi langsung bagi masyarakat menjadi ujian pertama. Layakkah saya menjadi seorang dokter? Jika iya, dokter yang seperti apa? Tentu saya akan membuang pilihan untuk menjadi robot berjas putih yang tidak punya hati dari dalam pikiran saya jauh-jauh. Menjadi dokter yang memegang teguh janji profesi pun pembuktian profesi ini terbuka melahirkan para negarawan. Karena hakikatnya pemimpin negarawan bisa dari profesi mana pun dan

dengan cara pengabdian yang berbeda-beda. Jika semua terjun ke ranah politik praktis untuk menjadi presiden negarawan, tentunya akan terjadi ketidakseimbangan. Bagaimana dengan sektor pertanian, kesehatan, teknologi, dan ekonomi?

Setiap orang terlahir dengan kompetensinya masing-masing, pun dengan lingkup kontribusi yang berbeda-beda. Saya memilih jalur spesialis untuk kontribusi pascakampus, dengan fokus pada kesehatan ibu dan anak. Alasan sederhana yang menguatkan saya hingga hari ini untuk tetap memilih jalur profesi adalah tidak ada lagi ibu yang meninggal dunia karena pendarahan pascapersalinan.

Dengan cita-cita kecil tersebut, saya berharap bisa memperbaiki minimal satu dari sekian banyak masalah Indonesia bahkan dunia. Seperti yang tertulis pada Millennium Development Goals yang dideklarasikan oleh 189 negara anggota PBB bahwa kesehatan ibu dan kematian anak merupakan 2 dari 8 masalah dunia yang harus segera ditangani. Bahkan hingga saat ini, pendarahan pascapersalinan menjadi salah satu penyebab kematian nomor satu tertinggi pada ibu hamil. Belum lagi dalam lingkup lain tentang kesehatan reproduksi remaja, tentang aborsi, tentang kanker mulut rahim, dan permasalahan ibu lainnya.

Hingga hari ini berapa banyak masalah kesehatan khususnya pada ibu dan anak, yang benar-benar tertangani? Bagaimana usaha pemerintah dan usaha dokter itu sendiri? Jika bukan mahasiswa kedokteran, yang kelak akan mendalami profesi dokter spesialis ibu dan anak, siapa lagi yang terpanggil untuk menyelesaikannya?

Saya percaya di mana pun kita berada, sekecil apa pun manfaatnya, tetaplah meniatkan semua kontribusi tersebut untuk ibadah. Proses pembelajaran itu panjang dan sampai napas terakhir. Karena itu, menjadi sebaik-baiknya khalifah di bumi ini merupakan pilihan saya ketimbang mengutuki birokrasi yang rumit, data yang penuh manipulasi dan korupsi yang merajalela.

Mungkin hari ini, saya dan pembaca adalah seorang mahasiswa, yang hanya bisa belajar di dalam kampus peradaban. Tetapi, sesungguhnya kami tidak diam. Kami sedang mengendap-endap dalam sebuah lorong kecil yang di depannya ada cahaya. Ikuti saja lorong kecil itu hingga nanti cahaya itu menyentuh kita!

Bersiaplah calon-calon pemimpin negarawan, masa depan Indonesia ada padamu! []

Satria Adi Putra

Dokter Negarawan



Salah satu masalah utama yang tidak boleh terlupakan di tengah banyaknya persoalan politik, ekonomi, dan hukum di negeri ini adalah kesehatan. Kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan semuanya tak ada artinya. Mengurus ekonomi, moneter, dan kebijakan fiskal memang penting. Tapi, untuk apa perekonomian sehat kalau rakyatnya sakit-sakitan?

Kesehatan merupakan masalah dasar masyarakat yang strategis. Permasalahan kesehatan menjadi langkah awal memperbaiki ketimpangan pelayanan dan kondisi masyarakat. Sejauh ini, kebijakan kesehatan hanya fokus pada persoalan kuratif (mengobati orang sakit). Belum gencar masalah perataan pelayanan kesehatan dan dokter berkarakter. Begitu pula tiadanya fokus meningkatkan taraf kesehatan pada orang normal. Boleh jadi ini disebabkan latar belakang presiden kita bukan dari dunia kedokteran.

Perbaikan kesehatan tentu saja tidak harus menunggu saldarnya para pengambil kebijakan. Sebagai tenaga muda yang kelak menggantikan generasi tua, kiranya perlu merefleksikan keberadaan selaku calon yang akan berkiprah dalam dunia

kesehatan. Ada empat refleksi yang bisa menjadi catatan bagi mereka yang bergerak dalam kesehatan, khususnya para dokter.

Pertama, selama 10 tahun ke depan dokter begitu banyak jumlahnya. Tapi prediksi 10 tahun ke depan juga, dokter berkarakter begitu sedikit jumlahnya.

Menjalankan program yang luar biasa baik dalam bidang kesehatan tak akan terjadi jika dijalankan oleh orang yang punya niat udang di balik batu. Programnya diniati demi kesejahteraan rakyat, tapi di tengah jalan anggarannya dikorupsi. Maka, kita butuh sosok-sosok dokter yang punya karakter mengabdikan, alih-alih memperkaya diri, seperti Ibnu Sina. Sosok-sosok yang membahagiakan pasien seperti Hunter "Patch" Adams. Dan banyak karakter positif lainnya. Yang jelas, tak hanya politikus yang perlu disoroti untuk menjadi sosok berkarakter, tapi dokter juga perlu punya karakter. Karena mereka juga punya andil menjadi negarawan Indonesia.

Untuk itulah, jika posisi Anda adalah dokter ataupun orangtua yang bercita-cita memiliki anak dokter, maka didiklah baik-baik karakter mereka. Bagaimana dengan kita yang masih duduk sebagai mahasiswa Kedokteran? Sudah pantaskah gelar dokter tertempel di nama kita? Sebuah gelar profesi dengan konsekuensi pengabdian dan pengorbanan; bukan sekadar konsekuensi upah tinggi dan status prestise.

Kedua, belajar dari kota itu kondisinya, tapi bertebaran di daerah itu tuntutan.

Kota kecil seperti Surakarta mempunyai 19 rumah sakit. Yogyakarta memiliki lebih dari 30 rumah sakit. Di Jakarta

bahkan ada 100 lebih rumah sakit. Bangga? Nanti dulu. Bagaimana keadaan di daerah-daerah? Amat timpang. Kondisi ini menyuratkan bahwa praktisi kesehatan berlomba menguasai kota daripada mengaplikasikan ilmu di daerah. Lalu bagaimana dengan sumpah profesi yang mengikrarkan diri kita untuk membaktikan hidup guna kepentingan perikemanusiaan—bukan kemanusiaan warga perkotaan saja?

Dokter yang punya karakter pasti menjalankan apa yang telah dia janjikan. Apalagi berjanji dengan membawa nama tuhan. Konsekuensinya, dia tak ragu lagi turun bertebaran di daerah-daerah. Banyak warga yang belum tersentuh tangan-tangan medis yang menantikannya.

Ketiga, kecerdasan tak cukup untuk hanya menangani perseorangan pasien. Niat baik tak pantas jika hanya tercurahkan buat perseorangan pasien. Kepandaian bertutur kata pun pantas di dengar rakyat.

Kesan dokter sering bersembunyi dari mengurus bangsa tidak sepenuhnya salah. Dokter lebih sibuk dengan dunianya sendiri sampai lupa keadaan yang terjadi di luar sana. Memang tidak semua dokter seperti ini; masih ada dokter yang peduli dengan arah perjalanan bangsa betapapun permasalahannya banyak.

Belum terlambat untuk berkontribusi. Jika petinggi-petinggi negara masih tidak paham solusi masalah kesehatan, apa yang kita perbuat? Jika tak ada lagi pejabat yang berkarakter dalam menentukan kebijakan kesehatan, apa yang kita perbuat? Akankah kita, para dokter, kompak diam menonton keadaan atau kompak beraspirasi?

Keempat, menjadi pengikut yang baik.

Jika kita belum memiliki kapasitas menjadi pemikir, konseptor, atau pemimpin, menjadi pengikut yang baik pun bukan aib. Pengikut terbaik dari profesi dokter. Sepakat? Tentu, menjadi pengikut yang cerdas. Jika ada yang salah, kita koreksi. Yang pasti, amanah wajib dokter adalah “membaktikan hidup guna kepentingan perikemanusiaan” sesuai isi Sumpah Dokter. ‘Hanya’ menjadi dokter pun tidak berarti melepaskan kesempatan sebagai seorang negarawan. Jadilah kita sebagai dokter negarawan. Tentu saja pembukitannya melalui andil kita kepada masyarakat; bukan pengakuan diri. []

Febrian Indra Rukmana

Negarawan Muda Bertani



Berakhirnya Orde Baru merupakan titik kemunduran bagi masyarakat Dusun Pancot, Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pancot dikenal sebagai sentra pertanian di Karanganyar, khususnya komoditas sayur-mayur.

Pertanian yang pernah berjaya di masa Presiden Soeharto berkuasa, kini menjadi komoditas tak berdaya. Para pemuda setempat sudah berganti orientasi. Menjadi petani sudah bukan lagi pekerjaan membanggakan. Mereka memilih menjadi buruh ke Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Sebagian lagi memilih menjadi buruh migran ke mancanegara.

Sebenarnya bukan salah Reformasi 1998 degradasi lahan pertanian di Pancot. Berdasarkan penelitian saya di sana, didapatkan informasi bahwa sejak 1995 sebenarnya produksi pertanian di sana mulai menurun. Penyebabnya adalah melonjaknya harga-harga bahan penunjang proses produksi pertanian, seperti bibit, pupuk, insektisida, dan pestisida. Puncaknya terjadi pada 1998 ketika krisis moneter menimpa Indonesia dan negara-negara lainnya. Harga-harga melambung tinggi termasuk harga kebutuhan pokok sehingga hasil produksi perta-

nian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani. Bila kebutuhan sehari-hari saja sukar dipenuhi, apalagi memulai proses produksi pertanian selepas panen.

Gonjang-ganjing ekonomi akhirnya mendorong warga Pancot berurbanisasi, khususnya para pemuda. Buruh pabrik, kuli bangunan, berdagang, mereka jadikan profesi baru. Bila pada 1995 sekitar 95 persen warga Pancot mempunyai mata pencaharian petani, kini kondisi berbalik 180 derajat. Pertanian nyaris menjadi dunia terasing di Pancot. Pekerjaan tani yang biasanya diwariskan secara turun-temurun antargenerasi kini tidak bisa lagi menjadi kebanggaan sebuah keluarga. Sudah langka mendapati anak muda yang memilih selepas lulus sekolah menengah bersedia turun ke sawah. Bila lulusan SMP atau SMA saja enggan ke sawah, lebih-lebih jebolan perguruan tinggi

Selain bertani, pekerjaan yang lazim dilakukan warga Pancot adalah memelihara kuda. Baik bertani ataupun memelihara kuda kini hanya cerita kebanggaan generasi tua. Era keemasannya pudar. Selain lebih menyita energi dan waktu, hasil yang diperoleh dari dua pekerjaan ini terbilang pas-pasan untuk ukuran warga di sana. Semisal lahan pekerjaan terbuka di Pancot atau lingkungan terdekatnya di Karanganyar, boleh jadi, cerita urbanisasi tidak terjadi.

Mengembalikan Pancot seperti di era jayanya saat Orde Baru bukan berarti saya mendukung rezim saat itu. Menurunnya kualitas pertanian juga tidak terlepas dari kebijakan Revolusi Hijau yang dengan gegabah dipaksakan pemerintahan Soeharto kepada para petani. Yang saya lakukan tidak lebih memerankan profesi untuk kemaslahatan bersama. Dari sini tantangan saya sebagai calon negarawan harus dijawab.

Betapa tidak menantang apabila yang menghuni sehari-hari di Pancot adalah generasi tua. Hanya 5 persen kaum muda yang masih bertahan di dusun kelahirannya itu. Sebuah kerugian bila anak-anak muda di sana sekadar jadi buruh yang di kota pun tidak berdaya. Mengkritik pilihan anak muda di sana tidaklah bijak karena faktanya mereka juga memiliki kebutuhan atau bahkan tanggungan hidup.

Sebagai kaum muda yang berlatar belakang pertanian, saya tidak hanya diam saja dengan kondisi tersebut. Setelah memetakan persoalan, saya berupaya memberikan solusi konkret untuk perbaikan di daerah tersebut. Semua ini berkaitan dengan tanggung jawab saya pribadi sebagai seorang negarawan muda Indonesia. Beberapa langkah yang saya cetuskan adalah sebagai berikut:

Pertama, menginisiasi sebuah gerakan sosial dalam ranah pertanian bernama “Gerakan Cinta Bertani”. Tujuannya mengajak semua pemuda yang masih sekolah di bangku SMP dan SMA untuk bertani dalam segala aspek, dan memberikan pendidikan tentang pertanian. Tentu saja misi utamanya adalah menumbuhkan kepemilikan terhadap pertanian di Pancot.

Kedua, mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar memasukkan kurikulum pertanian ke sekolah-sekolah yang ada di Desa Kalisoro. Dengan dimasukkannya pertanian ke dalam kurikulum, siswa sudah mengenal pertanian sejak dini sehingga diharapkan tumbuh kepemilikan terhadap dunia pertanian di lingkungan tempat tinggalnya.

Ketiga, bersama-sama pemerintah Desa Kalisoro dengan melibatkan LSM dan dinas yang bergerak di UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) melakukan pemberdayaan

masyarakat tentang ekonomi mandiri dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya alam dan manusia di Pancot.

Keempat, bekerja sama dengan Pemerintah Desa Kalisoro mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar untuk mengambil kebijakan perlindungan dan standardisasi harga hasil pertanian.

Dengan empat inisiatif di atas, semoga ada perubahan di Pancot. Sekecil apa pun perubahan itu penting, demi perbaikan kondisi warga di sana. Bagi saya pribadi, membersamai para petani di sana merupakan sebuah panggilan hati yang menyenangkan pula. Beban berat tiada terasa lagi tatkala hadir di tengah-tengah para petani desa. []

Dewi Ratna Diana Amelia

Perang Negarawan



Pada 2007, ASEAN Economic Community (AEC) disepakati oleh para kepala negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Salah satu pilar yang dibangun dari keberadaan AEC adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produk tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan modal yang lebih bebas.

Apa makna pilar tersebut? Akan ada peningkatan arus barang dan jasa ketika AEC ini dilaksanakan pada 2015. Barang impor akan masuk dari mana-mana. Bule-bule ASEAN pun akan dengan mudahnya kita jumpai di sudut-sudut tempat di tanah air. Ya, itulah era ketika tak akan ada lagi batas-batas negara. Semuanya bebas masuk, bebas bertransaksi dan bebas bertukar informasi.

Kita yang mahasiswa akan memiliki persaingan yang lebih ketat untuk memasuki pasar tenaga kerja. Kita yang memiliki keahlian yang baik, bisa saja bekerja di perusahaan Singapura atau Malaysia dan mendapat penghidupan yang lebih baik di sana. Namun, bisa saja kita tak mampu masuk ke dalam pasar tenaga kerja tersebut karena terlalu banyaknya persaingan.

Tidak aneh bila perusahaan Indonesia pun diisi orang asing. Mereka, tenaga kerja asing, memiliki keahlian di atas keahlian SDM Indonesia, tentu akan mudah mendapat pekerjaan di perusahaan yang ada di Indonesia. Sulit bagi kita bersaing dengan tenaga kerja asing jika kita tidak memiliki *skill* memadai. Akibatnya, pengangguran mungkin saja akan terus meningkat seiring diberlakukannya AEC.

Ada persoalan dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang mengakibatkan ketidaksiapan lulusan perguruan tinggi masuk ke pasar tenaga kerja ataupun membuat usaha sendiri. Belum ada *link and match* antara kompetensi keluaran pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Maka, masih dibutuhkan bekal tambahan bagi seorang lulusan kampus di tanah air, yaitu berupa program magang atau pelatihan di tempat kerja.

Menghadapi 2015, mahasiswa adalah para negarawan yang akan aktif berperang seiring penerapan AEC. Sudah seharusnya mahasiswa menyiapkan banyak hal selagi masih di perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi harus dapat melengkapi diri dengan berbagai keterampilan dan kompetensi kerja yang siap pakai. Dengan peningkatan kualitas SDM, pemuda Indonesia dapat bertahan dalam era perdagangan bebas ini. Peningkatan SDM berpengaruh terhadap peningkatan nilai jual produk maupun nilai jual tenaga kerja.

Layaknya menghadapi sebuah peperangan, maka kita perlu banyak amunisi. *Hard skill* berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, dan *soft skill* berupa kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, bekerja sendiri maupun dalam tim, berlogika dan menganalisis permasalahan—semua kemampuan ini merupakan bekal yang harus dipunyai setiap mahasiswa.

Terakhir, mengutip kata-kata dari Kahlil Gibran, “Generasi yang ganjil ini hidup antara tertidur dan terjaga. Di dalam tangannya, mereka menggenggam tanah masa lalu dan buih-buih masa depan.” Semoga kita selalu menjadi generasi yang terjaga dan sang penggenggam tanah masa depan. []

Muhammad Iqbal

Negarawan Teknolog



Indonesia adalah bangsa yang paling Go International. Tidak percaya? Tak perlu sulit untuk membuktikannya karena kita bisa melihat faktanya setiap hari.

Di pagi hari, banyak masyarakat Indonesia yang terbangun di kamarnya dengan ditemani oleh AC merek Jepang yang telah setia membuat tidurnya nyenyak sepanjang malam. Setelah itu, mereka akan ke kamar mandi dan mulai menggunakan produk-produk toiletries buatan Inggris ketika bersiap-siap. Di perjalanan menuju tempat kerja atau sekolah, mobil buatan Jerman pun senantiasa membersamainya di tengah-tengah jalanan Ibu kota yang macet, sambil sesekali mampir ke pom bensin asal Belanda yang terlihat sangat megah berdiri.

Saat beraktivitas di tempat kerja, selama satu hari penuh pun mereka dengan senang hati ditemani gadget produksi Korea Selatan. Di sela-sela bekerja atau saat istirahat, bercengkerama dengan teman-teman melalui media sosial buatan Amerika Serikat, ataupun bahkan sambil bermain *game* terkenal buatan Finlandia. Tidak lupa, saat urusan perut pun mereka tetap harus ditemani beras dari Thailand dan kacang

kedelai dari Amerika Serikat, yang mereka santap dalam bentuk makanan yang sangat khas Indonesia bernama tempe.

Astaga! Seinternasional itukah kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Seterjajah itukah bangsa ini sampai-sampai kehidupannya selalu harus dikungkung oleh produksi asing? Kekuatan yang menggerogoti dalam bisu nilai-nilai kemerdekaan yang telah diraih bangsa ini puluhan tahun yang lalu. Pertanyaannya, di manakah produk-produk asal Indonesia? Mengapa saat ini kita terkooptasi oleh ombak teknologi dari luar?

Sedih saat kita melihat rakyat negeri ini dengan bangganya memamerkan produk-produk asal luar negeri yang dimilikinya, dan beranggapan bahwa produk tersebut jauh lebih baik dibandingkan produk sejenis karya anak bangsa sendiri. Lebih sedih lagi tatkala para pemimpin kita juga menjual aset bangsa untuk kepentingan asing. Katanya, demi yang mereka sebut sebagai "pendapatan negara". Sayangnya, lagi-lagi sayangnya, para pemimpin kita masih terlalu pintar dan birokratis untuk bisa memahami kaitan kuat antara kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa.

Padahal, bila kita perhatikan bersama, negeri ini memiliki potensi yang sungguh sangat besar untuk menjadi bangsa yang mandiri. Seperti tak perlu diulangi terus-menerus karena kita sudah mendengarnya sedari SD, kita sama-sama sudah tahu betapa besarnya kekayaan alam bangsa ini.

Negeri ini memiliki garis pantai terpanjang keempat di seluruh dunia, dan merupakan penghasil rumput laut terbesar kedua setelah Filipina. Negeri ini pun juga disebut sebagai negara dengan sumber daya alam hayati terkaya kedua setelah

Brasil. Tak hanya itu, negara ini semakin berjaya dengan memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, dengan jumlah mencapai 29 gigawatt (GW) menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Minim Anggaran Riset

Masih percaya negeri ini pantas disebut miskin? Dengan data-data di atas saja kita seharusnya sadar bahwa predikat miskin itu salah besar bila disandang Indonesia. Yang membuat kita terlihat miskin saat ini adalah fakta bahwa kekayaan tersebut belum dapat dinikmati secara mandiri oleh masyarakat Indonesia. Apa gunanya kita memiliki cadangan minyak bumi yang besar bila pada akhirnya minyak bumi kita dikuasai perusahaan asing? Apa gunanya kita memiliki tambang emas yang berlimpah apabila kita dapat ditipu dengan mudahnya oleh perusahaan asing yang mengatakan bahwa hasil yang mereka ambil dari perut bumi Indonesia hanyalah tembaga? Apa gunanya kita punya sumber daya alam hayati yang kaya apabila bahan-bahan pangan saja belum dapat kita sediakan secara swasembada?

Apa gunanya kita punya produksi rumput laut berlimpah apabila untuk mendapatkan asam alginat dan karagenan saja (bahan-bahan penting dalam industri pangan, farmasi dan kosmetik) kita masih harus mengimpor dari luar, seakan kita tidak tahu bahwa bahan dasar keduanya adalah dari rumput laut? Apa gunanya seluruh kekayaan itu bila tak ada satu pun orang di negeri ini, bahkan pemerintah, yang tergerak untuk mengelola itu semua secara mandiri?

Tak bisa dimungkiri, salah satu faktor yang paling menentukan atas permasalahan ini adalah minimnya pengembangan

riset dan teknologi di Indonesia. Sehingga, sebanyak apa pun sumber daya alam yang kita miliki, kekayaan itu tetap tak akan bisa dirasakan oleh masyarakat secara mandiri karena tak adanya pelaku-pelaku teknologi yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Bila sudah begini, apa yang akan terjadi? Efeknya adalah kita akan banyak didikte dan diatur oleh asing mengenai pengelolaan sumber daya alam di negeri ini. Tak perlu susah-susah mencari contoh, kasus Blok Mahakam pun sudah bisa menjadi penggambaran yang baik hal ini. Di saat blok ini ingin dibebaskan dari kekuatan asing dan diserahkan ke Pertamina untuk dikelola, gaung suara yang meremehkan kredibilitas Pertamina untuk mengelola blok ini malah justru datang dari pihak pemerintah Indonesia sendiri!

Minimnya pengembangan riset dan teknologi di Indonesia memang selalu menjadi momok yang menyebalkan bagi para kalangan akademisi dan orang-orang yang memiliki kapasitas soal ini. Bagaimana tidak? Menurut Andrianto Handojo, Ketua Dewan Riset Nasional, saat ini pemerintah hanya mengalokasikan anggaran riset sebesar 0,08 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) bangsa ini. Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik, riset dan teknologi menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar, yaitu 13 persen. Maka, tak aneh pula bila jumlah publikasi penelitian ilmiah di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Dari sini kita menjadi tahu salah satu latar belakang ketidakmandirian bangsa ini terkait pengelolaan sumber daya alam. Namun, apakah hanya itu penyebabnya? Apakah untuk menghasilkan para pelaku teknologi yang berkualitas, yang mampu

dan mau berkorban untuk mengelola sumber daya alam bangsa ini secara mandiri, hanya membutuhkan dana besar untuk penelitian?

Krisis Nasionalisme

Untuk mengetahui lebih dalam, kita perlu melihat rekam jejak para ilmuwan besar Indonesia yang telah melalui perjalanan panjang di bidangnya walaupun perhatian dan penghargaan pemerintah kepada dunia riset dan teknologi masih rendah. Bacharuddin Jusuf Habibie tidak salah menjadi orang yang paling pertama disebut. Keseriusannya dalam menekuni teknologi, dan tekad yang besar bahwa ilmu yang dipelajarinya akan dapat memberikan manfaat besar bagi bangsanya, merupakan sikap hidup yang terus menemani langkahnya dalam setiap berjuang untuk bangsa. Betapa keras perjuangannya untuk bisa membuat Indonesia menjadi mandiri dalam bidang teknologi, khususnya di bidang kedirgantaraan yang dipimpinya. Penolakan berkali-kali, cibiran, cercaan, sogokan, sampai penawaran perempuan bayaran pernah dihadapinya. Namun, di tengah badai dan pergolakan hati itu dia tetap dengan tegas mempertahankan idealismenya, tak peduli berapa orang yang membencinya. Walaupun pada akhirnya pabrik pesawat terbang yang didirikannya pada era Orde Baru harus ditutup karena mengalami krisis ekonomi hasil rezim Soeharto, pengaruh dan keteladanan Habibie akan tetap membekas bagi kehidupan bangsa ini. Ya, dia adalah sosok pembaharu teknologi Indonesia yang sejauh ini belum tergantikan kebesarannya.

Selain Habibie, sosok lain yang bisa menjadi role model di dunia teknologi mungkin adalah Warsito Purwo Taruno, penemu teknologi pengobatan kanker dengan menggunakan tek-

nologi ECVT (Electrical Capacitance Volume Tomography)—peranti yang bekerja berbasis medan listrik statis. Perjuangan Warsito dalam mengembangkan teknologi ini tentunya pernah mengalami fase naik dan turun. Perjuangannya dulu hampir kandas ketika komputer yang berisi dokumen-dokumen penelitiannya rusak tersambar petir. Namun akhirnya, perjuangannya yang terus konsisten membuahkan hasil yang manis ketika dia menemukan teknologi pemindai 4D pertama di dunia, yang bahkan sangat ditaksir oleh pihak NASA.

Saat itu, tak mungkin bila Warsito tak ditawarkan penawaran kerja sama atau dana hibah riset yang besar untuk bekerja di Amerika Serikat. Namun, dengan penuh nasionalis, dia menolak untuk melakukan riset di luar dan memutuskan pulang kembali ke Indonesia untuk membuat lembaga risetnya sendiri. Alhasil, di negeri ini pun dia menjadi sosok yang cukup fenomenal, apalagi setelah berhasil menemukan teknologi pengobatan kanker yang jauh lebih efektif. Lagi-lagi, dari dirinya kita bisa melihat sosok ideal seorang ilmuwan dan pembaharu teknologi yang bukan hanya mampu mengajarkan bangsa ini akan sebuah kemandirian teknologi, namun juga akan sebuah kehormatan bangsa.

Setelah mengulas secara singkat dua orang tokoh pembaharu teknologi di Indonesia, boleh jadi ada pemikiran yang baru saja melintas. Penyebab Indonesia saat ini masih terpuruk di bidang riset dan teknologi, bahkan menjadi bangsa yang tidak mandiri dalam mengelola sumber daya alamnya, tidak semata soal rendahnya dana penelitian. Salah satu jawaban lain yang sangat mungkin adalah karena kekurangannya bangsa ini akan sosok-sosok pembaharu teknologi yang berkualitas dan

memiliki niat luhur untuk membangun bangsa ini. Ya, negeri ini sedang membutuhkan lebih banyak pemimpin di bidang sains dan teknologi yang mau berkarya dan berprestasi super serius bagi kemajuan riset sains dan teknologi di Indonesia. Negeri ini sedang membutuhkan orang-orang cerdas yang mampu berinovasi untuk kejayaan bangsa ini. Lebih dari itu, negeri ini sedang membutuhkan para teknolog negarawan yang mau melepaskan keegoisannya dan berpikir berbeda dari masyarakat umum untuk berkontribusi nyata bagi masyarakat dan negara selayaknya Habibie dan Warsito.

Sebenarnya banyak ilmuwan Indonesia yang pintar. Terbukti banyak di antara mereka memilih berkuprah di lembaga luar negeri untuk mengaktualisasikan ilmunya. Dari jumlah yang banyak itu, sayangnya tidak banyak yang seberani Habibie dan Warsito. Ya, inilah yang hilang dari negeri kita: sosok teknolog berkualitas yang mampu bermimpi dan bertindak luar biasa. Sosok teknolog yang mampu mendobrak status quo dan sosok teknolog yang ikhlas terus bergerak walau dalam kondisi yang kekurangan di negeri ini. Entah mengapa, rasanya sosok-sosok tersebut jarang sekali terlahir di negeri ini.

Potensi-potensi besar seperti dua nama ilmuwan tadi sebenarnya tidaklah jarang terlahir di Indonesia. Bahkan sejatinya, setiap manusia sebenarnya diberkahi kemampuan dari Tuhan Yang Mahaesa untuk bisa menerobos menjadi sang pembaharu. Namun, lingkungan di negeri ini menyebabkan potensi-potensi itu serasa terkubur oleh peradaban.

Koreksi Paradigma

Bangsa ini entah mengapa sudah sangat dibiasakan dengan paradigma pendidikan yang tujuan utamanya adalah hanya untuk menyejahterakan diri sendiri. Di rumah pun, para orangtua mendidik anaknya sekadar agar anaknya dapat mapan secara finansial ketika mereka sudah dewasa. Mereka akan lebih mementingkan berapa gaji yang dihasilkan anaknya dalam sebulan ketimbang kebermanfaatannya apa yang bisa anaknya berikan dari pekerjaannya. Tidak heran bila siswa-siswa cerdas yang ingin masuk ke perguruan tinggi bergengsi pun pada akhirnya hanya bermodalkan pola pikir “besar gaji” ketika mendaftar ke sebuah jurusan di perguruan tinggi.

Fenomena ini terus berulang dari generasi ke generasi. Apalagi di jurusan-jurusan rumpun ilmu sains dan teknologi seperti teknik ataupun Ilmu Komputer yang umumnya akan sangat mudah mendapatkan gaji di atas 10 juta rupiah setelah lulus. Alhasil, hasil pendidikan selama bertahun-tahun itu hanyalah menghasilkan para budak asing berijazah sarjana, yang rela melihat kekayaan bangsanya diambil asalkan mereka dibayar mahal. Sikap materialis-sentris ini pulalah yang menyebabkan banyak warga Indonesia yang berkuliah di luar negeri memilih untuk terus menetap dan bekerja di luar negeri dibandingkan kembali ke Indonesia.

Untuk itulah, pengubahan paradigma pendidikan di Indonesia mutlak harus dilakukan. Khusus untuk bidang sains dan teknologi, nilai-nilai kewirausahaan teknologi (technopreneurship) yang berlandaskan kebangsaan dan nilai luhur harusnya bisa dimasukkan ke dalam kurikulum jurusan-jurusan sains dan teknologi. Bila melihat perkembangan dunia yang

sudah sangat cepat seperti saat ini, kita harus segera mulai mencetak para pembaharu teknologi yang berkualitas untuk membangun kerajaan teknologi di negeri sendiri. Tujuannya jelas: jangan sampai kita terus-menerus dijajah oleh produk-produk asing, dan saat yang sama kita menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar untuk bangsa sendiri. Berawal dari ini, daya tawar bangsa kita lebih kuat di mata dunia.

Bayangkan bila 10-20 tahun mendatang akan ada sebuah pabrik geotermal hasil karya lulusan jurusan Teknik Kimia yang mampu menyuplai energi bersih bagi negeri ini. Atau akan ada pabrik mobil asli Indonesia hasil karya dari lulusan jurusan Teknik Mesin. Atau mungkin juga akan ada pabrik produk-produk turunan dari rumput laut hasil karya lulusan jurusan Teknik Bioproses. Untuk mencetak pemimpin-pemimpin pembaharu teknologi seperti ini, kita harus benar-benar serius untuk memperbaiki sistem pendidikan di negeri ini. Untuk mencetak pembaharu, khususnya di bidang teknologi, kita tak cukup hanya membekalinya dari segi *knowledge*, tapi juga dari segi *value*. Selain paham akan keilmuan teknologinya, seseorang yang ingin menjadi pembaharu di bidang teknologi harus juga memiliki nasionalisme, idealisme yang besar untuk kemajuan bangsa, dan tentunya kemampuan bersinergi dengan pelbagai pihak. []

Profil Penulis



ALI ABDILLAH. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ketua BEM Fakultas Hukum (2012). Saat ini menjabat Ketua BEM UI.

ANNISYAROSDIANA. Mahasiswa Jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Aktif sebagai Sekretaris

Kementerian Lingkungan Hidup BEM KM IPB 2013, koordinator asisten praktikum Oseanografi Kimia, serta volunteer Gerakan Cinta Anak Tani (GCAT). Pernah terpilih sebagai Duta Lingkungan Hidup IPB.



ARNOVA RESWARI. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pernah menjabat sebagai Human Resources and Development Director di Center for Indonesian Medical Student's Activities FK Unpad (2012-2013). Saat ini masih menjabat sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Keluarga KAMI Asy-Syifaa' FK Unpad. Di luar kampus aktif di lembaga nonprofit Volunteer Doctors.



ASMA AZIZAH. Mahasiswa Jurusan Bahasa Korea Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Aktif di KAMMI Komisariat UGM sebagai sekretaris jenderal, dan MAHASAKSI ID (Mahasiswa dan Siswa Anti Korupsi Indonesia) sebagai Human Resources Manager.

DEWI RATNA DIANA AMELIA.

Mahasiswa Konsentrasi Manajemen Keuangan, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Aktif di Indonesia Leadership Development Program, Lembaga Dakwah SALAM UI, Social Enterpreneurs Club, Garuda Youth Community, dan lain-lain.



DINAR RAMADHANI. Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung. Tim Kesenatoran Himpunan Mahasiswa Planologi Pangripta Loka ITB. Counselor for Elementary School Members in Indonesia Green Action Forum.

DINI FUADILLAH SOFYAN.

Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya. Ketua grup cendikia Kajian Sains Teknik (KST) FT Unsri. Ketua proyek sosial inovasi bank sampah di Desa Suka Merindu. Pimpinan daerah Badan Koordinasi Kegiatan Mahasiswa Teknik Kimia Indonesia (BKKMTKI) wilayah satu Sumatera.





ELIFAS OMEGA YUSUFADISYUKUR. Mahasiswa Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret. Aktif di Perkumpulan Petani Organik Karanganyar (PERNIK) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) cabang Surakarta.

FAISAL A. KAMIL. Mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Koordinator Senat Mahasiswa Fisipol UGM (2012). Menteri Kajian Strategis BEM KM UGM (2013).



FACHRY AIDULSYAH. Mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Pegiat Gerakan Indonesia Berdaulat!, Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI UGM (2013). Tim Formatur KAPMI Nasional.

FEBRIAN INDRA RUKMANA. Mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret. Ketua Umum BIRO AAI FISIP UNS (2013-2014) dan Ketua Korps Instruktur KAMMI Daerah Solo Raya



HAFIDZ ARFANDI. Mahasiswa Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Ketua Umum HMI MPO cabang Sleman (2013). Menteri Pengembangan Wacana BEM KM UGM (2012). Inisiator Komite Kedaulatan Energi UGM.



HARRY UTAMA PUTRA. mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Departemen Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Wakil Gubernur Mahasiswa FKIP Unsri (2013).

MANDIRA BIENNA ELMIR. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Wakil Ketua Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum (2013). Delegasi Indonesia untuk perdamaian dan aksi pembebasan Palestina dan Jerusalem pada Global March to Jerusalem, di perbatasan Jordan-Jerusalem (2012).



MAYA PUSPITA SARI. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Aktivistis Bulan Sabit Merah Indonesia sekaligus mahasiswa klinik di Rumah Sakit Muhammad Hoesin Palembang.

MEYRIZKA DWINANDA. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Wakil Ketua Kompas Muda, Ketua Divisi Pers BEM FKIP UNSRI, dan Pimpinan Usaha Lembaga Pers Mahasiswa Gelora Sriwijaya Periode 2012-2013. Salah satu perintis komunitas @PayungAmal yang kegiatannya membantu anak-anak panti asuhan.





MOH AMAR KHOERUL UMAM. Mahasiswa Fakultas Hukum UI. Kepala Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM UI 2013. Co-Founder CerdasMulia Leadership and Training Center.

MUHAMMAD IQBAL. Mahasiswa Program Studi Teknik Bioproses, Departemen Teknik Kimia,

Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Penggagas Rumah Terampil.



NUROEL TRI ISNA WIJAYA. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Koordinator Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia (IMAKIPSI) periode 2012-2013. Aktif di Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI) dan HMI komisariat Unsri.



RIFQI ABDILLAH. Mahasiswa Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Menteri Apresiasi dan Olahraga BEM KM IPB (2013). Pernah mengikuti Ekspedisi Ilmiah Studi Konservasi Lingkungan (SURILI) di Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi (2011) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Riau (2012).





SALSABILA KHOTIBATUNNISA. Mahasiswa Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Aktif di Forum Syiar Fakultas Ekologi Manusia (FORSIA-LDF FEMA), dan Koordinator Pemberdayaan Wanita di KAMMI Komisariat IPB (2012).

SATRIA ADI PUTRA. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret. Aktif di Yayasan Kesuma Islam Kedokteran, Bulan Sabit Merah Indonesia, Badan Analisis dan Pengembangan Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia (BAPIN ISMKI) dan Asisten Farmakologi FK UNS



TITIS SEKTI WIJAYANTI. Mahasiswa Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret. Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi 'SYMPHONY' UNS. Aktif dalam Komunitas Jujur Sebelas Maret.

TONI WIDIASTANTO. Mahasiswa Jurusan Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Menteri PPSDM BEM UNSRI (2013). Mandor Lapangan di Agro Training Center dan pendiri Study Agriculture Center (SAC).





WILDAN GHIFFARY. Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran. Delegasi Indonesia dalam World Leadership Conference di Singapura (2011), Greiswald Student Festival di Greiswald University, Jerman (2012). Saat ini menjabat Presiden Mahasiswa Unpad (2013).

YUNIA FAIZAH ARSY. Mahasiswa Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Senior Resident bagian Manajemen Program di Asrama TPB IPB, dan Tim Human Resources and Development Gerakan Cinta Anak Tani.



Profil

Beasiswa Aktivistis Nusantara (BAKTI NUSA) Dompot Dhuafa



A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu kunci untuk kebangkitan bagi sebuah bangsa dan salah satu elemen kebangkitan yang sangat berperan adalah para pemudanya. Karenanya pendidikan pemuda dan mahasiswa harus memperoleh perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa.

Beasiswa Indonesia Dompot Dhuafa adalah salah satu jejaring Pendidikan di Dompot Dhuafa yang berkhidmat pada peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan. Berbagai pengalaman dalam mengelola beasiswa investasi sumber daya manusia dan pemberdayaan, mengantarkannya untuk juga memperhatikan para pemuda khususnya aktivis mahasiswa yang penuh dengan semangat, idealisme dan potensi untuk perbaikan suatu bangsa. Padatnya aktivitas akademik dan non-akademik, ditambah dengan rongrongan untuk lebih realistis, membuat aktivis cenderung untuk tidak seimbang dan tergadai idealismenya. Padahal, idealisme itulah yang membuat mereka

terus berjuang, berkontribusi dan menebar kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berani, cerdas, aktif, dan punya integritas untuk melayani masyarakat, dan para aktivis mahasiswa memiliki semua modalnya. Selanjutnya tinggal bagaimana sistem dapat mendukungnya. Untuk itulah diperlukan sebuah program yang mampu mendukung dan menguatkan peran aktivis mahasiswa sebagai investasi untuk lahirnya pemimpin masa depan yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan masyarakat dan terus berupaya untuk berkontribusi menjadi solusi bagi kompleksitasnya problematika bangsa.

B. DEFINISI

Program ini bernama Beasiswa Aktivis Nusantara disingkat BAKTI NUSA. BAKTI NUSA adalah investasi sumber daya manusia yang mengelola biaya untuk pendidikan, pembinaan, dan pelatihan, serta pendampingan bagi aktivis mahasiswa.

C. TUJUAN

Program BAKTI NUSA bertujuan mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta program yang akan mengarahkannya menjadi sumber daya manusia yang berkarakter pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu berkontribusi dan berperan aktif di tengah masyarakat.

C. MISI

Adapun misi dari program BAKTI NUSA adalah:

1. Pengembangan diri peserta program yang berbasis karakter;
2. Membangun dan mengoptimalkan jaringan;
3. Mengoptimalkan peran penerima manfaat dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat;

D. BENTUK PROGRAM

Pelaksanaan program Beasiswa Aktivistis dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan yaitu:

1. Pemberian dana dukungan aktivitas;
2. Fasilitas pengembangan diri:
 - a. *Training*
 - **Character Building:** Pelatihan pembentukan karakter mahasiswa yang unggul dan kepemimpinan. Dilaksanakan setiap bulan.
 - **Training Value:** Pelatihan kerelawanan sosial yang dilaksanakan setiap bulan.
 - **Pelatihan Kepenulisan:** Pelatihan dan pendampingan penulisan yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan program.
 - b. *Coaching*
 - **Coaching Aktivistis:** Pelatihan dan pendampingan kepemimpinan praktis oleh fasilitator yang meliputi aspek agama, *leadership*, dan *managerial skill*, akademik, dan sosial. *Coaching* juga berperan sebagai sarana *sharing*, *monitoring* dan evaluasi bagi peserta

program oleh fasilitator. *Coaching* dilaksanakan setiap pekan.

- ***Coaching Tokoh***: Kunjungan dan diskusi bersama tokoh nasional sebagai sarana memperkaya wawasan dan gagasan bagi peserta program. Silaturahmi tokoh juga dilaksanakan sebagai sarana memperluas jaringan bagi peserta dan lembaga. Silaturahmi tokoh dilaksanakan setiap bulan.

c. Penugasan

Bentuk pembinaan yang lain dari Beasiswa Aktivistik adalah penugasan, baik secara perorangan maupun kelompok. Penugasan dilakukan dalam bentuk:

- Penulisan artikel (bulanan);
- *Focus Group Discussion* (bulanan);
- *Event* bersama penerima beasiswa (triwulan);
- *Social Project* (Tahunan).

d. Magang

Peserta BAKTI NUSA yang telah memasuki tahun kedua diberikan kesempatan terlibat dalam aktivitas kemanusiaan yang dilakukan di jejaring internal maupun mitra Dompot Dhuafa di Indonesia maupun mancanegara.

e. Delegasi

Program BAKTI NUSA memberikan dukungan dan kesempatan kepada peserta BAKTI NUSA untuk mengikuti kegiatan delegasi baik nasional maupun internasional.

f. Support S-2

Dukungan dan fasilitasi bagi peserta BAKTI NUSA yang merencanakan melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2.

3. Fasilitator

Seluruh rangkaian program dikelola oleh seorang fasilitator pada setiap daerah program. Fasilitator bertindak sebagai manajemen program sekaligus pendamping bagi peserta. Fasilitator adalah aktivis/tokoh lembaga kemahasiswaan di PTN daerah program masing-masing.

F. PESERTA

Peserta program ini pada tahun pertama terdiri dari 24 aktivis mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada tahun kedua, peserta program berjumlah 40 aktivis mahasiswa yang berasal dari 3 kampus program tahun pertama ditambah 3 kampus program baru yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), dan Universitas Sriwijaya (UNSRI). Pada tahun ketiga (2013), asal kampus peserta program bertambah satu, yakni Universitas Padjadjaran. Dengan demikian, ada 7 kampus yang mahasiswanya bergabung dalam program ini. Adapun penerima manfaat pada tahun ketiga berjumlah 47 aktivis mahasiswa.

G. KONTAK PERSON

Informasi lebih jauh tentang BAKTI NUSA bisa menghubungi:

- Arief Hudaya 085726007914

Negeri ini mengidap banyak penyakit, memiliki berjibun masalah. Alam melimpah ruah, tapi kita cuma jadi penonton yang baik untuk pesta pora bangsa-bangsa asing yang menikmati kekayaan milik kita. Kita pun hanya bisa mengeluh; mengumpati pemimpin kita yang abai membela aspirasi warga.

Kawan, sudah berapa sering kaudengar buruknya perilaku para pemimpin kita? Dan seberapa banyak kaudengar kerinduan banyak orang untuk hadirnya sosok pahlawan bagi negeri ini? Negarawan, oh negarawan, di mana-mana dia disebut. Sepertinya dia penyelamat Indonesia sesungguhnya. Namun, siapakah sebenarnya dia? Sudah ada atau telahirkan dia? Terlahir untuk hadir di sini, menjadi penyelamat Indonesia.

Sambut kehadiran dia, Kawan, sang negarawan. Para pemimpin, presiden negarawan kita. Figur yang mementingkan rakyatnya ketimbang usia jabatan. Rakyat dan rakyat yang selalu dipikirkan ketimbang kekayaan diri atau kelompoknya. Si bijak visioner yang berpikir cerdas mengantarkan negerinya guna bersaing di jagat dunia.

Percayalah, Kawan, tak kurang negeri ini memiliki orang yang siap kita sapa sebagai negarawan. Tak harus pemilihan presiden berlangsung lebih dulu untuk hadirnya dia. Presiden negarawan hadir pada momentum rakyatnya juga figur-figur negarawan. Bukan rakyat yang sekadar mengeluh, pendengki, dan penikam sesama. Ya, karena kitalah jua negarawan itu sendiri.

Presiden negarawan, karenanya, dihadirkan oleh kita semua. Bukan dia yang harus menghadirkan diri terlebih dulu. Usia muda yang melekat di diri ini momentum emas mengumpulkan energi besar menjadi negarawan dalam setiap jejak kiprah dan profesi. Maka, bersiaplah wahai negarawan muda! Bersiap pulalah untuk hadirnya sang pemimpin idaman yang dinanti: presiden negarawan bagi Indonesia baru!

